

# Partai Politik dan Representasi Politik Perempuan : Studi Kasus Strategi Kelembagaan Politik Partai Nasdem Dalam Meningkatkan Representasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

*by Shofi Dwi Syifa Faujiah*

---

**Submission date:** 19-Dec-2025 10:12PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2849487779

**File name:** Tesis\_Fix\_untuk\_Cek\_Turnitin\_1\_-\_Shofi\_Dwi\_Syifa\_Faujiah.docx (1.34M)

**Word count:** 27182

**Character count:** 187568



**47**  
**PARTAI POLITIK DAN REPRESENTASI POLITIK  
PEREMPUAN: STUDI KASUS STRATEGI KELEMBAGAAN  
POLITIK PARTAI NASDEM DALAM MENINGKATKAN  
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU  
LEGISLATIF TAHUN 2024**

**TESIS**

**3**  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Gelar S-2 Magister pada  
Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**SHOFI DWI SYIFA FAUJIAH  
NIM: 2310426003**

**22**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PROGRAM MAGISTER  
TAHUN 2025**

<sup>21</sup>  
**PENGESAHAN**

Tesis diajukan oleh:

Nama : SHOFI DWI SYIFA FAUJIAH

NIM : 2310426003

Program Studi : Ilmu Politik<sup>25</sup>

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Tesis : PARTAI POLITIK **DAN** REPRESENTASI **POLITIK**  
PEREMPUAN: STUDI KASUS STRATEGI  
KELEMBAGAAN POLITIK PARTAI NASDEM DALAM  
MENINGKATKAN REPRESENTASI POLITIK  
PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN  
2024

<sup>5</sup>  
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik, pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Menyetujui,

.....  
Ketua Penguji

**Dr. Nurdin.**  
Penguji/ Pembimbing I

**Dr. Deni Angela, S.IP., M.IP.**  
Penguji/ Pembimbing I

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Politik

**Dr. Ana Sabhana Azmy.,**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Tesis <sup>3</sup> ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SHOFI DWI SYIFA FAUJIAH

NIM : 2310426003

Tanggal : 10 November 2025

Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 November 2025

Yang Menyatakan,

**SHOFI DWI SYIFA FAUJIAH**

## KATA PENGANTAR/ PRAKATA

*Assalamualaikum Warahmaatullah Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah Tesis yang berjudul **“Partai Politik dan Representasi Politik Perempuan: Studi Kasus Strategi Kelembagaan Politik Partai Nasdem dalam Meningkatkan Representasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024”**. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita semua.

Penulisan karya ilmiah yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah yang mencoba menganalisa bagaimana bagaimana strategi kelembagaan Partai NasDem dirancang dan diimplementasikan dalam upaya meningkatkan representasi politik perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kebijakan afirmatif, pola kaderisasi, serta dukungan struktural yang diberikan partai kepada calon legislatif perempuan, sekaligus menganalisis efektivitas strategi tersebut dalam memperkuat posisi perempuan di ranah politik formal.

Proses perencanaan, penyusunan, pembuatan serta penyelesaian karya ilmiah ini, penulis tidak menafikan bahwa banyak sekali pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril, data, fasilitas, semangat dan motivasi, kritik dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Olah karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. **Dr. Nurdin.**, selaku Dosen Pembimbing I, dan Yth. **Dr. Deni Angela, S.IP., M.IP.**, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan pembelajaran terkait penyusunan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

2. Yth. Dr. S. Bekt Istiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Yth. Dr. Azwar, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Yth. Anwar Ilmar, S.Sos, M.IP., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Yth. Musa Maliki, Ph.D., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Yth. Dr. Ana Sabhana Azmy., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Segenap keluarga, Suami, Ibu, Bapak, dan Anak-anak ku yang selalu membuat semangat serta dapat senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material demi kelancaran penyusunan tesis ini.
10. Kawan- kawan Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki begitu banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan masukan yang membangun guna menciptakan manfaat nyata atas karya ilmiah ini.

Jakarta, 10 November 2025  
Penulis,

**Shofi Dwi Syifa Faujiah**

**47**  
**PARTAI POLITIK DAN REPRESENTASI POLITIK  
PEREMPUAN: STUDI KASUS STRATEGI KELEMBAGAAN  
POLITIK PARTAI NASDEM DALAM MENINGKATKAN  
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU  
LEGISLATIF TAHUN 2024**

**Shofi Dwi Syifa Faujiah**

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis strategi kelembagaan Partai NasDem dalam meningkatkan representasi politik perempuan pada Pemilu Legislatif 2024. Fokusnya pada kebijakan dan program partai yang mendorong partisipasi perempuan, seperti rekrutmen terbuka, pelatihan melalui Akademi Perempuan Nasdem, dan dukungan organisasi sayap Garnita Mahayati. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai NasDem berhasil mewujudkan komitmen terhadap kesetaraan gender melalui strategi inklusif dan berkelanjutan, terbukti dengan keterwakilan perempuan mencapai 30,4% di DPR RI. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan afirmasi gender yang terintegrasi dalam struktur dan budaya partai. Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan kapasitas elektoral, dominasi figur politik, dan minimnya dukungan media. Upaya selanjutnya adalah mengubah representasi deskriptif menjadi substantif. Partai Nasdem berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan hingga 30,4% melalui strategi rekrutmen inklusif, pelatihan kader, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Kesetaraan gender telah menjadi bagian dari budaya partai, meski masih menghadapi tantangan seperti kapasitas elektoral, dominasi figur, dan minimnya sorotan media. Keberhasilan ini perlu ditindaklanjuti dengan memastikan perempuan berperan substantif dalam proses kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Politik, Representasi, Kelembagaan, Perempuan

**POLITICAL PARTIES AND WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION: A CASE STUDY OF THE POLITICAL INSTITUTIONAL STRATEGY OF THE NASDEM PARTY IN INCREASING WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS**

Shofi Dwi Syifa Faujiah

*Abstract*

This study analyzes the institutional strategies of the NasDem Party in increasing women's political representation in the 2024 Legislative Elections. It focuses on party policies and programs that encourage women's participation, such as open recruitment, training through the Nasdem Women's Academy, and support from the Garnita Malahayati wing organization. Using a qualitative approach with a case study method, data was collected through interviews, observations, and documentation studies, then analyzed thematically with source triangulation to maintain validity. The results of the study show that the NasDem Party has succeeded in realizing its commitment to gender equality through inclusive and sustainable strategies, as evidenced by the 30.4% representation of women in the Indonesian House of Representatives. This success reflects the effectiveness of gender affirmation policies integrated into the party's structure and culture. However, challenges remain, such as electoral capacity gaps, the dominance of political figures, and a lack of media support. The next step is to transform descriptive representation into substantive representation. The Nasdem Party has successfully increased women's representation to 30.4% through inclusive recruitment strategies, cadre training, and strong institutional support. Gender equality has become part of the party's culture, although it still faces challenges such as electoral capacity, figure dominance, and lack of media attention. This success needs to be followed up by ensuring that women play a substantive role in the public policy process.

**Keywords:** Politics, Representation, Institutions, Women

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR/ PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>1. BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Praktis .....	11
1.4.2 Manfaat Akademis .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Teori dan Konsep .....	13
2.1.1 Teori Kelembagaan Politik .....	13
2.1.2 Teori Komunikasi Politik .....	15
2.1.3 Teori Representasi Politik .....	19
2.1.4. Teori Politik Perempuan .....	24
2.1.6. Partisipasi Perempuan dalam Politik.....	26
2.1.7. Sistem Pemilihan Umum .....	28
2.2. Penelitian Terdahulu .....	33
2.3. Kerangka Pemikiran .....	40
<b>3. BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>

3.1. Objek Penelitian .....	43
3.2. Jenis Penelitian .....	43
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.3.1. Wawancara .....	44
3.3.2. Studi Dokumentasi .....	45
3.4. Sumber Data .....	46
3.4.1. Data Primer .....	46
3.4.2. Data Skunder .....	47
3.5. Teknis Analisis Data .....	47
3.6. Lokasi Penelitian .....	48
3.7. Waktu Penelitian .....	48
<b>4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	51
4.1.1 Organisasi Sayap Perempuan Partai Nasdem .....	51
4.1.2 Perolehan Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Tahun 2025 .....	55
4.2 Hasil Penelitian; Analisa Peningkatan Kader Perempuan Nasdem pada Pemilu Legislatif 2024 (Pendekatan Kelembagaan) .....	57
4.2.1 Penempatan Kader Perempuan dalam Struktur Partai .....	58
4.2.2 Ideologi Partai Politik .....	58
4.2.3 Peran Aktivistik Perempuan dalam Partai Politik .....	65
4.2.4 Aturan Partai Politik Terkait Gender .....	69
4.2.5 Pengaruh Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak bagi peningkatan kader perempuan Nasdem pada pileg 2024 .....	76
4.3 Pembahasan .....	85
<b>5. BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran-saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>105</b>
<b>TRANSKIP HASIL WAWANCARA .....</b>	<b>110</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>187</b>

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
<b>3.1</b> Daftar Informan <b>Penelitian</b> .....	44
3.2 Waktu Penelitian .....	47
4.1 Struktur Pengurus Partai .....	49

**79**  
**DAFTAR GAMBAR**

	<u>Halaman</u>
3.1 Langkah langkah analisis data .....	47
3.2 Poster Akademi Pendidikan Perempuan Nasdem .....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Instrumen Penelitian.....	101
Hasil Transkrip Wawancara .....	110
Dokumentasi .....	187

## PENDAHULUAN

**1.1. Latar Belakang**

Partai politik memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik dan mempengaruhi kebijakan. Namun, meskipun penting, perempuan terus kurang terwakili dalam partai politik dan dalam posisi kekuasaan. Kurangnya tersebut, tidak hanya menghambat kemampuan perempuan untuk mempengaruhi keputusan politik, tetapi juga memperpetuasi ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

<sup>1</sup>Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non-diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik (Hardjaloka, 2012). Tahun 2024 partai politik yang menempatkan paling banyak perempuan adalah Partai Nasdem dengan perolehan 21 kursi (30,4 persen) (Prayudi et al., 2024). Pada sistem politik demokratis, partai politik memegang peran sentral sebagai wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan Bersama (Hutabarat et al., 2021).

Keberhasilan sebuah partai politik dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya dapat diukur dari berbagai indikator, seperti jumlah kursi yang berhasil diraih dalam pemilihan umum, popularitas di kalangan masyarakat, dan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diusung. Dalam konteks global, terdapat berbagai negara yang memiliki partai politik yang sukses dalam mencapai tujuan politiknya, baik dalam skala nasional maupun internasional (M. Jafar AW, 2015).

Representasi *substantive* juga dapat dipengaruhi oleh hubungan politisi dengan perempuan lainnya dan kecenderungan untuk menggunakan cara yang klientelistik, yang dapat mengurangi representasi substantive perempuan. Kuota gender di politik lokal juga dapat menciptakan elitisasi dan klientelisme yang

mengotori keterwakilan perempuan (Aramesti Artanti & Revo Linggar Vandito, 2024). Representasi *substantive* dalam politik Finlandia dan Denmark tidak hanya mencakup pembelaan terhadap kepentingan kelompok, tetapi juga bertujuan untuk memastikan tindakan yang mewakili berbagai pemangku kepentingan (Ramadhan & Rizal, 2023). Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang kuat dan efektif dalam pengambilan keputusan politik (Ramadhan & Rizal, 2023).

Di Indonesia, isu representasi politik perempuan telah menjadi hal yang telah lama menjadi perhatian. Contoh kasus di mana politisi perempuan telah dikritik karena tidak secara efektif memperjuangkan kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam gender mereka sendiri, yang semakin menyoroti kompleksitas representasi politik perempuan di negara ini (Eddy Roflin, Iche Andriyanu Liberti, 2021).

Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia harus ditempatkan di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih demokratis. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, fakta masalahnya perempuan masih terbatas dalam mengambil kendali penuh dalam bernegara dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, representasi perempuan di DPR sempat mengalami penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9,2% pada tahun 1999 (Hardjaloka, 2012).

Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pengesahan dan penerapan berbagai produk hukum (UU dan peraturan) seperti Permen PPPA No 13 Tahun 2021 tentang partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, pemberdayaan sebagainya, dan penetapan prioritas program-program pembangunan di tingkat nasional dan lokal yang sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan sosial, maupun kepentingan kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif khususnya sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), Pemilu 2009 (18,2%), Pemilu 2014 (17,3%), dan Pemilu 2019 (20,5%) (Mulyono, 2010).

**Tabel 1.1****Representase Keterwakilan Perempuan**

JK	1999-2004	2004-2009	2009-2014	2014- 2019	2019-2024	2024-
Perempuan	8,2%	11,5%	18%	17,3%	20,5%	21,9%
Laki-laki	91,8%	88,5%	82%	82,7%	79,5%	78,1%

Sumber: Data diolah, 2025

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam pemilu, tidak terjadi secara langsung, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

**Tabel 1.2****Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di beberapa negara ASEAN**

Negara	Persentase (%)
Timor Leste	38,5%
Singapura	29,5%
Filipina	28%
Laos	27,5%
Vietnam	26,7%
Indonesia	21,9%

Sumber: katadata.co.id diakses tanggal 16 Maret 2025.

Berdasarkan tabel di atas, Indonesia berada pada presentasi dalam keterwakilan perempuan yang cukup ideal dengan perolehan 21,9% dibandingkan dengan Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

**Tabel 1.3****Representasi Caleg Perempuan pada Partai Politik di Indonesia**

Partai Politik	Pemilu 2014		Pemilu 2019		Pemilu 2024	
	Caleg	Persentase	Caleg	Persentase	Caleg	Persentase
Nasdem	226	40,43%	221	38,43%	200	34,48%
PKB	210	37,63%	220	38,26%	204	35,29%
PKS	191	38,82%	210	39,62%	213	36,79%
PDIP	200	35,71%	215	37,59%	191	33,04%
Golkar	202	36,07%	217	37,80%	197	33,97%
Gerinda	203	36,45%	211	38,26%	210	36,21%
Demokrat	205	36,61%	223	38,92%	202	34,77%
PAN	207	36,96%	219	38,09%	213	36,66%
PPP	214	39,05%	233	42,06%	214	36,96%

Hanura	203	36,38%	177	41,45%	186	38,35%
PBB	206	37,05%	160	40,10%	194	41,01%
PKPI	200	37,11%	76	55,47%	-	-
Garuda	-	-	211	48,26%	234	41,42%
Berkarya	-	-	212	38,48%	-	-
Perindo	-	-	211	38,91%	230	39,79%
Buruh	-	-	-	-	208	35,92%
PKN	-	-	-	-	197	37,60%
PSI	-	-	-	-	225	38,79%
UMMAT	-	-	-	-	206	40,16%

Sumber: Data Diolah, 2025

Dapat dilihat dari tabel 1.3, bahwa partai yang mencalonkan dengan presentasi terbesar pada pemilu 2024 adalah partai Garuda dengan 41,42%, pada pemilu tahun 2019 partai PKPI dengan presentase 55,47%, dan pada pemilu tahun 2014 adalah partai Nasdem dengan presentasi 40,43%. Presentasi terkecil pada pemilu 2024 ada pada partai PDI-P dengan presentasi 30,04%, pada pemilu tahun 2019 PDIP diangka presentasi 37,04%, dan pada pemilu 2014 adalah partai PDIP dengan presentasi 35,71% (kpu.go.id diakses 24 Agustus 2025).

**Tabel 1.4**  
**Representasi Perolehan Perempuan pada Partai Politik di Indonesia**

Partai Politik	Pemilu 2014		Pemilu 2019		Pemilu 2024	
	Kursi	Persentase	Kursi	Persentase	Kursi	Persentase
Nasdem	4	11,43%	19	32,20%	19	30,4%
PKB	10	21,28%	12	20,69%	14	20,6%
PKS	1	2,50%	8	16%	9	17,0%
PDIP	21	19,27%	25	19,59%	27	24,5%
Golkar	16	17,58%	19	22,35%	20	19,6%
Gerinda	11	15,07%	12	15,38%	19	22,1%
Demokrat	13	21,31%	10	18,52%	9	20,5%
PAN	9	18,37%	7	15,91%	8	16,7%
PPP	10	25,64%	5	26,32%	-	-
Hanura	2	12,50%	-	-	-	-

Sumber: Data Diolah, 2025

Dapat dilihat dari tabel 1.4, partai yang memperoleh perolehan kursi terbesar pada pemilu 2024 adalah partai Nasdem dengan perolehan 30,4%, pada pemilu tahun 2019 partai Nasdem dengan presentase 32,20%, dan pada pemilu tahun 2014 adalah partai PPP dengan presentasi 25,64%. Presentasi perolehan

paling kecil pada pemilu 2024 ada pada partai PAN dengan presentasi 16,7%, pada pemilu tahun 2019 partai Gerindra diangka presentasi 15,38%%, dan pada pemilu 2014 adalah partai PKS dengan presentasi 2,50% (kpu.go.id diakses 26 Agustus 2025).

Partai Nasdem dalam gerakan perempuan dalam wilayah politik memiliki organisasi sayap Garnita Malahayati. <sup>20</sup>Garnita Malahayati adalah wadah bagi perempuan di bawah naungan partai Nasdem. Selain memfasilitasi para perempuan di partai Nasdem untuk berproses, organisasi ini fokus terhadap berbagai isu perempuan di Indonesia (Arianto, 2020).

Meskipun partai Nasdem telah mengikuti regulasi yang mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, seperti aturan kuota 30% dalam pencalonan legislatif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah dalam lingkup representasi perempuan partai politik partai hanya menempatkan perempuan dalam struktur internal partai sebagai pelengkap kuota 30%, keberadaan perempuan tidak diberi posisi pengambil keputusan atau hanya ditempatkan pada peran simbolis atau seremonial (Roselina, 2019). Apakah strategi yang dilakukan partai Nasdem melalui Garnita Malahayati benar-benar berjalan efektif dalam menasar akar masalah keterwakilan perempuan, apakah dukungan pelatihan, logistik, dan mentoring dilaksanakan dan berjalan ideal, dan bagaimana prestasi partai Nasdem dalam representasi perempuan bisa terus bertahan.

Masalah lain yang perlu disikapi dalam hal representasi politik perempuan adalah perempuan banyak menghadapi masalah teknis, kultural, sosial, dan finansial, dan partai Nasdem apakah benar bersungguh-sungguh mengarah pada *affirmative action* atau hanya sekadar memenuhi syarat administratif agar lolos verifikasi KPU (Siti Zaetun & Mar'iyah, 2020)..

Representasi politik perempuan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam sistem politik Indonesia. Meski regulasi afirmatif seperti kuota 30 persen telah diterapkan, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen <sup>73</sup>masih belum mencapai hasil yang optimal.

Oleh karena itu, kajian terhadap strategi partai politik khususnya partai Nasdem dalam meningkatkan keterlibatan perempuan pada Pemilu 2024 menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur internal partai, mekanisme rekrutmen

politik, serta orientasi ideologis partai berkontribusi terhadap penguatan posisi politik perempuan dalam arena elektoral (Siti Zaetun & Mar'iyah, 2020).

Partai NasDem berhasil mencapai keterwakilan perempuan sebesar 30,4% di DPR RI melalui pendekatan strategis yang inklusif dan terstruktur. Upaya tersebut diwujudkan melalui mekanisme rekrutmen terbuka, penguatan kapasitas kader lewat Akademi Perempuan NasDem, dukungan dari organisasi sayap Garnita Malahayati, hingga penempatan calon legislatif perempuan pada nomor urut yang dianggap strategis. Seluruh strategi ini didukung oleh struktur kelembagaan partai yang berbasis komunitas serta kepemimpinan partai yang konsisten mendorong prinsip kesetaraan gender (kpu.go.id diakses 26 Agustus 2025).

Langkah tersebut menjadikan NasDem sebagai model penerapan nyata kebijakan afirmasi 30%. Komitmen terhadap kesetaraan gender tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi sudah terintegrasi dalam sistem, budaya, dan mekanisme partai. Hal ini memungkinkan kader perempuan NasDem memiliki daya saing elektoral yang kuat dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan representasi politik perempuan di parlemen.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kesenjangan kapasitas elektoral yang membutuhkan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, dominasi politik berbasis figur, serta terbatasnya pemberitaan media yang menonjolkan kiprah perempuan. Tantangan terbesar adalah memastikan keterwakilan deskriptif benar-benar berkembang menjadi representasi substantif, yaitu keterlibatan aktif <sup>83</sup>perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap isu gender.

Implementasi strategi kelembagaan yang efektif menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks pemilu legislatif, pola komunikasi yang digunakan baik dalam internal partai maupun kepada publik memegang peranan penting dalam membangun citra, memperkuat dukungan, dan mendorong keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif maupun pemilih. Namun, masih diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana kelembagaan tersebut dirancang, disampaikan, dan diterima, serta sejauh mana strategi yang dijalankan mampu menjawab hambatan kultural, struktural, dan persepsi publik yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen.

Meskipun kampanye Nasdem didukung oleh konten visual menarik dan kata-kata yang mudah dicerna (infografis, video pendek, meme, hashtag viral, iklan berbayar), tantangannya adalah menjaga konsistensi dan kedalaman pesan politik agar tak sekadar populer tetapi juga substansial. Selain itu, strategi konten yang mengandalkan kolaborasi dengan *influencer*, meskipun efektif secara distribusi juga berisiko menyoroti narasi yang lebih bersifat hiburan daripada pendidikan politik.

Partai Nasdem juga menggandeng organisasi sayap perempuan seperti Garnita Malahayati untuk menjalankan kegiatan sosial-politik di dapil, sekaligus membangun kedekatan dengan pemilih perempuan melalui advokasi isu-isu seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan sosial. Selain itu, partai ini konsisten mengusung narasi kesetaraan gender dalam kampanye dan memberikan dukungan logistik serta media kampanye kepada caleg perempuan potensial, sambil menjaga koordinasi internal agar tidak terjadi konflik antarcaleg dalam satu dapil.

Nasdem menempatkan proporsi legislator perempuan tinggi pada 2019 (32,2%) dan kembali teratas dalam indeks proporsi perempuan per partai pada 2024 (28,99%) (Puskapol UI, 2019). Nasdem menggabungkan pendidikan politik konvensional lewat Garnita, sekolah legislatif, ABN, seminar & pelatihan daerah dengan kampanye digital yang aktif di TikTok dan Instagram untuk membingkai isu perempuan, merekrut kader, dan memberi eksposur berkelanjutan (Puskapol UI, 2019 dikutip news.detik.com diakses 15 Agustus 2025).

Menjelang Pemilu 2024, Partai Nasdem menerapkan strategi kampanye yang terbagi dalam tiga fase waktu: 12 bulan, 6 bulan, dan 3 bulan sebelum hari pemilihan. Pada 12 bulan sebelum pemilu, partai Nasdem fokus pada konsolidasi internal dengan memperkuat struktur partai hingga tingkat daerah, merekrut bakal calon legislatif melalui platform “Partai Nasdem Memanggil”, serta menyelenggarakan pendidikan politik dan pelatihan kader melalui “Akademi Bela Negara dan Sekolah Kader” (www.nasdem.id diakses 29 Agustus 2025).

Memasuki enam bulan sebelum pemilu, strategi diarahkan pada pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan orientasi bagi para caleg untuk mematangkan strategi dan memahami aturan kampanye, serta memperkuat koordinasi antara pengurus pusat dan daerah dalam rangka kesiapan logistik dan

pemetaan dapil. Tiga bulan menjelang pemilu, saat masa kampanye resmi dimulai 24 November 2023-10 Februari 2024), partai Nasdem mengintensifkan sosialisasi melalui kampanye tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye (APK), *door-to-door*, serta aktivasi posko kampanye hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada Pemilu 2024, Partai Nasdem mengoptimalkan strategi kelembagaan langsung dan tidak langsung yaitu secara digital, <sup>74</sup> memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter (X), TikTok, dan YouTube untuk menyebarkan konten yang variatif dan menarik seperti video pendek, infografis, polling interaktif, serta *live streaming* (IG/YouTube Live). Cara ini dilakukan melalui posting kolase foto berteks artistik untuk menciptakan kesan positif dan emosional di khalayak digital. Selain itu, penggunaan platform seperti Instagram terbukti efektif dalam menekan biaya kampanye karena sifatnya gratis dan mudah diakses, serta karena publik Indonesia cenderung mempercayai informasi yang tersebar di media sosial dibanding media konvensional. Melalui pendekatan digital yang kreatif, informatif, dan berbasis data, partai Nasdem berhasil meningkatkan jangkauan kampanye dan *engagement* yang lebih tinggi, terutama di kalangan milenial dan Gen-Z yang merupakan konstituen utama di era digital (Yuliandri, 2023).

Penelitian ini berupaya mengkritisi dan mengevaluasi kesenjangan antara wacana afirmasi dan implementasi di lapangan. Partai Nasdem, sebagai salah satu partai dengan citra progresif, menjadi objek strategis untuk dikaji dalam konteks bagaimana strategi kelembagaan dirancang untuk mengarusutamakan isu gender.

<sup>45</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, judul dalam penelitian ini adalah **“Partai Politik dan Representasi Politik Perempuan: Studi Kasus Analisis Strategi Kelembagaan Partai Nasdem dalam Meningkatkan Representasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Partai Nasdem sebagai salah satu partai nasionalis yang terbuka terhadap isu kesetaraan, terutama sebagai partai yang mendapatkan suara paling tinggi keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu 2024. Namun, pernyataan politik semata

tidak cukup, perlu ditelusuri bagaimana strategi tersebut diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, rekrutmen, pendidikan politik, dan penempatan calon legislatif perempuan yang kompeten dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas penelitian ini memfokuskan untuk membahas strategi kelembagaan politik partai Nasdem dalam meningkatkan representasi perempuan pada pemilu legislatif 2024 yang terstruktur, inklusif, dan berbasis afirmasi menembus ruang kekuasaan formal. Adapun pertanyaan penelitian utama yang diajukan <sup>33</sup> dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana strategi kelembagaan politik partai Nasdem dalam meningkatkan representasi politik perempuan pada pemilu legislatif 2024?
2. Bagaimana dampak penerapan strategi partai terhadap peningkatan representasi politik perempuan ada pemilu legislatif 2024?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam penerapan strategi partai terhadap peningkatan representasi politik perempuan ada <sup>30</sup> pemilu legislatif 2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dibuat tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi kelembagaan politik partai Nasdem dalam meningkatkan representasi politik perempuan pada pemilu legislatif 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan strategi partai terhadap peningkatan representasi politik perempuan ada pemilu legislatif 2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana tantangan dan hambatan dalam penerapan strategi partai terhadap peningkatan representasi politik perempuan ada pemilu legislatif 2024.

<sup>44</sup>

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholder* terkait untuk membuat langkah memperkuat kebijakan afirmasi atau bentuk implementasi gerakan politik perempuan dan perannya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keterpilihan dalam

Pemilihan Umum dengan mempedomani kebijakan tentang keterwakilan 30% melalui kebijakan dan strategi partai politik menggunakan representasi substansif.

#### 1.4.2. Manfaat Akademis

<sup>60</sup> Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan ilmu sosial dan ilmu politik tentang bagaimana implementasi keterwakilan 30% melalui kebijakan afirmasi terhadap keterpilihan perempuan pada Pemilihan Umum dengan gerakan politik perempuan pada organisasi Garnita Malahayati sebagai organisasi kader politik perempuan di Partai Nasdem sebagai partai yang mendapatkan presesntasi perempuan terbanyak pada Pemilu Tahun 2024.

<sup>102</sup>

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

##### <sup>17</sup> 1.1. Latar Belakang

##### 1.2. Rumusan Masalah

##### 1.3. Tujuan Penelitian

##### 1.4. Manfaat Penelitian

##### 1.4.1. Manfaat Praktis

##### 1.4.2. Manfaat Akademis

##### 1.5. Sistematika Penulisan

#### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

##### 2.1 Teori dan Konsep

##### <sup>49</sup> 2.1.1. Teori Kelembagaan Politik

##### 2.1.2. Teori Komunikasi Politik

##### 2.1.3. Teori Representasi Politik

##### 2.1.4. Teori Politik Perempuan

##### 2.1.5. Partisipasi Perempuan dalam Politik

##### 2.1.6. Sistem Pemilihan <sup>25</sup> Umum

##### 2.2. Penelitian Terdahulu

##### 2.3. Kerangka Pemikiran

#### 3. BAB III METODE PENELITIAN

##### 3.1 Metode Penelitian

##### 3.2 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Proses Pengumpulan Data

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.2. Sumber Data Primer

75  
3.3 Teknis Analisis Data

3.4 Validasi Data

46  
3.5 Lokasi Penelitian

3.6 Waktu Penelitian

#### **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Profil Institusional Partai Nasdem

4.1.2. Organisasi Sayap Perempuan Partai Nasdem

4.1.2 Perolehan Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

4.2. Hasil Penelitian; Analisa Peningkatan Kader Perempuan Nasdem pada Pemilu Legislatif 2024 (Pendekatan Kelembagaan)

4.2.1 Penempatan Kader Perempuan dalam Struktur Partai

4.2.2 Ideologi Partai Politik

4.2.3 Peran Aktivistik Perempuan dalam Partai Politik

4.2.4 Aturan Partai Politik Terkait Gender

4.2.5 Pengaruh Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak bagi peningkatan kader perempuan Nasdem pada pileg 2024

4.3. Pembahasan

4.3.1. Strategi kelembagaan politik partai Nasdem dalam meningkatkan representasi politik perempuan pada pemilu 2024

4.3.2. Dampak penerapan strategi partai terhadap peningkatan representasi politik perempuan pada pemilu 2024

4.3.3. Tantangan dan hambatan Partai Nasdem penerapan strategi politik partai terhadap peningkatan representasi politik perempuan pada pemilu 2024

#### **5. BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran- saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA  
DOKUMENTASI**

## <sup>4</sup> BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori dan Konsep

##### 2.1.1. Teori Kelembagaan Politik

<sup>93</sup> Teori Kelembagaan Politik (*Institutional Theory in Political Science*) merupakan salah satu pendekatan penting dalam ilmu politik yang berupaya menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga politik terbentuk, berfungsi, dan mempengaruhi perilaku aktor-aktor di dalamnya. Dalam pandangan Guy Peters, lembaga bukan hanya struktur formal seperti parlemen, partai politik, atau birokrasi, tetapi juga mencakup norma, aturan main, dan rutinitas yang membentuk cara aktor berinteraksi di arena politik. Melalui perspektif kelembagaan, fokus analisis bergeser dari sekadar siapa yang berkuasa menjadi bagaimana aturan dan struktur politik tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan serta hasil politik yang dihasilkan (Peters, 2020).

Secara umum, teori kelembagaan politik terbagi menjadi tiga pendekatan utama. Pertama, *historical institutionalism* menekankan bahwa lembaga terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, di mana keputusan masa lalu memengaruhi arah kebijakan dan perilaku politik masa kini (*path dependence*). Kedua, *rational choice institutionalism* menganggap lembaga sebagai sarana yang diciptakan aktor rasional untuk meminimalkan ketidakpastian dan mengatur interaksi politik secara efisien. Ketiga, *sociological institutionalism* menyoroti bagaimana nilai, budaya, dan norma sosial membentuk perilaku aktor dalam suatu institusi (Brilliant et al., 2022). Ketiga pendekatan ini memberikan cara pandang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika kelembagaan politik.

Berdasarkan Teori Kelembagaan Politik, analisis dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana struktur kelembagaan, aturan formal dan informal, serta norma yang berkembang dalam institusi politik membentuk pola perilaku aktor, memengaruhi proses pengambilan keputusan, dan menentukan hasil politik yang dihasilkan. Dengan mengacu pada perspektif Guy Peters, lembaga dipahami tidak hanya sebagai organisasi formal, tetapi juga sebagai seperangkat aturan dan

rutinitas yang secara historis terbentuk, dirancang secara rasional oleh aktor, serta dilegitimasi oleh nilai dan budaya sosial, sehingga ketiganya menjadi pisau analisis untuk menjelaskan dinamika kelembagaan dalam konteks yang diteliti.

Dalam konteks Indonesia, teori kelembagaan politik banyak digunakan untuk menganalisis partai politik dan sistem demokrasi. Studi tentang Partai pemenang pemilihan legislatif, misalnya, menggunakan teori kelembagaan internal partai untuk menilai efektivitas organisasi dan kaderisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat-baik dalam struktur maupun budaya organisasi-menjadi faktor kunci keberlanjutan partai (Arifin et al., 2021). Di sisi lain, banyak penelitian menemukan bahwa meskipun partai-partai politik di Indonesia memiliki struktur formal yang lengkap, kelembagaan internalnya masih lemah dalam praktik, terutama dalam hal demokratisasi internal dan kaderisasi yang berbasis meritokrasi (Komarudin, 2019).

Teori kelembagaan politik memberikan sejumlah implikasi penting. Institusi yang kuat dan mapan cenderung menghasilkan stabilitas politik karena memiliki aturan yang jelas dan legitimasi sosial yang tinggi. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah dapat menyebabkan ketidakpastian, konflik internal, dan ketergantungan pada figur karismatik. Selain itu, perubahan kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui reformasi hukum atau regulasi, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya organisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh para aktor politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Hoefler (2022) yang menyatakan bahwa kelembagaan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan (Hoefler, 2022).

Dengan demikian, teori kelembagaan politik tidak hanya membantu memahami struktur dan fungsi lembaga formal seperti partai politik, parlemen, atau lembaga negara, tetapi juga memberikan kerangka analitis untuk menilai bagaimana norma, sejarah, dan budaya politik membentuk praktik demokrasi. Dalam penelitian-penelitian mengenai representasi politik perempuan atau penguatan partisipasi masyarakat, teori ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana institusi politik memberikan ruang yang inklusif dan berkelanjutan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan.

### 2.1.2. Teori Institusionalisasi Partai Politik

#### 1. Struktur Organisasi Partai

Struktur organisasi sebuah partai biasanya terdiri dari komite pusat atau kelompok kepemimpinan yang mengawasi operasi partai dan menetapkan arah keseluruhannya. Kelompok ini sering didukung oleh komite atau departemen lain yang fokus pada area spesifik seperti penggalangan dana, kelembagaan, atau perekrutan kandidat. Anggota-anggota komite ini biasanya dipilih atau diangkat berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka, memastikan bahwa partai memiliki beragam suara yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan. Dengan memahami bagaimana berbagai komponen ini bekerja sama, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana sebuah partai berfungsi sebagai unit yang kohesif dan bekerja menuju pencapaian tujuannya.

Struktur organisasi partai menggambarkan bagaimana anggotanya diatur dan bagaimana pengambilan keputusan internal dilakukan. Struktur ini mencakup pembagian tugas di antara berbagai tingkatan partai, hierarki peran kepemimpinan, serta kebijakan dan pedoman yang mengendalikan operasional partai. Memahami struktur organisasi partai sangatlah penting untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan dilaksanakan, serta bagaimana kekuasaan dan pengaruh dialokasikan di dalam partai. Berbagai elemen struktur organisasi partai dan bagaimana elemen-elemen tersebut memengaruhi tujuan dan operasional partai akan dibahas di bagian ini (Umagapi, 2020).

Teori Institusionalisasi Partai Politik digunakan sebagai alat analisis untuk memahami sejauh mana organisasi sayap partai perempuan, khususnya *Garnita Malahayati* dalam struktur Partai Nasdem, telah menjadi bagian integral dan fungsional dari proses politik internal partai. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas, adaptabilitas, dan kedalaman struktur dalam organisasi partai untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja politik, termasuk dalam hal representasi perempuan.

Muhamad (2023) menerangkan: Struktur organisasi partai politik dapat bervariasi, dengan beberapa memiliki struktur yang lebih terpusat dan keputusan politik diambil oleh kelompok elit tertentu, sementara yang lain lebih demokratis melibatkan lebih banyak anggota dalam proses pengambilan keputusan. Contoh

partai politik Islam dengan struktur hierarkis adalah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. AKP memiliki <sup>14</sup> jajaran kepemimpinan yang terdiri dari ketua partai, dewan pusat, dan cabang lokal dan regional di seluruh Turki. (Sarjon & Jufriadif, 2018; Muhamad et al., 2023).

## 2. Ideologi Partai Politik

Pandangan, nilai, dan prinsip yang memandu kebijakan dan kegiatan partai politik disebut ideologi. Ideologi ini dapat sangat beragam di antara partai-partai dan memengaruhi sikap mereka terhadap hal-hal seperti kebijakan luar negeri, kesejahteraan sosial, dan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Para pemilih harus memahami filosofi partai <sup>91</sup> agar dapat memilih yang paling sesuai dengan tujuan dan keyakinan mereka. Struktur dan organisasi internal partai politik, serta metodenya dalam memerintah dan memenangkan pemilu, juga dapat dipengaruhi oleh filosofinya (Celis, 2009).

Gerald (2019) menerangkan; Ideologi partai politik di Indonesia mencakup berbagai spektrum, mulai dari Islam, Nasionalis Religius, Nasionalis Sekuler, Kristen, hingga berbagai varian lainnya. Beberapa partai politik memiliki ideologi yang berbeda-beda, seperti PDI-P yang menganut Nasionalis Sekuler, PKS yang menganut Islam, dan Partai Damai Sejahtera yang menganut Kristen. Terdapat juga partai yang berada di kategori <sup>42</sup> 'Kiri' (Nasionalis-Sekuler), 'Kanan' (Islam), dan <sup>42</sup> 'Tengah' (Catch-all Party) berdasarkan jarak ideologis dan positioning ideologi-nya (Gerald, 2019; Ayrudin Yeby Maasan, 2017).

Misalnya, sebuah partai dengan ideologi yang lebih konservatif mungkin memprioritaskan intervensi pemerintah yang terbatas dalam ekonomi dan menekankan tanggung jawab individu, sementara sebuah partai dengan ideologi yang lebih liberal mungkin mendukung lebih banyak keterlibatan pemerintah dalam program kesejahteraan sosial dan memprioritaskan kesetaraan serta keadilan sosial. Perbedaan ideologi ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan yang signifikan antara partai-partai dalam isu kebijakan dan dapat membentuk lanskap politik secara keseluruhan. Pada akhirnya, memahami dan mempertimbangkan ideologi partai politik sangat penting bagi pemilih untuk sepenuhnya memahami implikasi dari pilihan mereka di kotak suara.

<sup>76</sup> Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan dan pemilihan, mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan representasi perempuan, mengadvokasi kesetaraan gender, serta menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan politik perempuan, partai politik dapat berkontribusi secara signifikan dalam menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan di ranah politik. Karena partai politik menyediakan beragam sudut pandang dan meningkatkan debat politik, lebih banyak perempuan di partai politik akan bermanfaat bagi demokrasi dan masyarakat luas. Untuk memajukan kesetaraan gender dalam politik, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan di partai politik (Rawat, 2014).

Proses di mana pejabat terpilih bertindak atas nama dan membuat pilihan yang mewakili kepentingan dan preferensi rakyat yang memilih mereka dikenal sebagai representasi politik. Karena memungkinkan pendapat rakyat didengar dan dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan, gagasan ini penting bagi pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini, representasi politik bertindak sebagai penghubung penting antara rakyat dan pemerintah, menjamin bahwa tuntutan dan kepentingan publik dipertimbangkan ketika kebijakan publik sedang dikembangkan dan dilaksanakan. Pemerintah akan kesulitan untuk mewakili beragam kebutuhan dan sudut pandang konstituen mereka secara tepat tanpa adanya representasi politik (Celis & Childs, 2012).

### <sup>27</sup> 3. Aktivis Perempuan dalam Partai Politik

<sup>67</sup> Salah satu isu penting yang menekankan pentingnya aktivis perempuan di partai politik adalah Aktivis Perempuan di Partai Politik. Di ranah politik, perempuan-perempuan ini berperan krusial dalam perjuangan keadilan sosial, hak-hak perempuan, dan kesetaraan gender. Suara perempuan diperkuat dan kebijakan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka di masyarakat didorong melalui partisipasi mereka di partai politik. Perempuan didorong untuk mengenyam pendidikan karena mereka menyadari tanggung jawab (Kiftiyah, 2019).

*Although the term "contagion" is commonly used, its descriptive and uncritical application to single-case studies has made it difficult to see how frequently the theory's initial requirements are not fulfilled. Using a comparative analysis of West European nations, we aim to reexamine the core claims of contagion theory. Our results cast doubt on and/or qualify its basic assumptions*

as they are currently understood<sup>85</sup> and emphasize the necessity of taking into account both intra-party and external issues. (Kenny & Verge, 2013).

Aturan partai politik terkait gender memainkan<sup>112</sup> peran penting dalam membentuk representasi dan partisipasi individu dalam ranah politik. Aturan-aturan ini sering kali menentukan proses seleksi untuk kandidat, alokasi sumber daya, dan struktur keseluruhan partai. Dengan memeriksa aturan-aturan ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana dinamika gender diperkuat atau ditantang dalam partai politik.

Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi motivasi di balik keterlibatan aktivis perempuan dalam partai politik dan dampak yang mereka miliki dalam membentuk agenda politik. Aktivis perempuan dalam partai politik sering kali didorong oleh keinginan untuk menciptakan perubahan dan menantang status quo. Mereka membawa perspektif yang unik ke meja dan bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa isu-isu perempuan tidak diabaikan atau disingkirkan dalam diskusi politik. Melalui dedikasi dan advokasi mereka, para wanita ini mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan wanita dalam masyarakat. Dengan menyelami motivasi dan dampak aktivis perempuan dalam partai politik,<sup>89</sup> kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kontribusi mereka dalam membentuk lanskap politik yang lebih inklusif dan adil.

Gerakan perempuan baru mulai terbentuk di Prancis pada abad ke-18. Pandangan dunia<sup>5</sup> Pencerahan (Aufklärung), yang meyakini bahwa manusia dikaruniai kemampuan menggunakan akal untuk mencari kebenaran, menjadi penggerak gerakan ini. Karena semua orang—laki-laki dan perempuan—pada dasarnya logis, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan tingkat kecerdasan mereka. Kecerdasan diyakini sebagai prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera (Jovani, 2014).

Setelah dianiaya dan dieksploitasi, perempuan akhirnya bangkit untuk membela diri. Perempuan secara historis hanya dipandang sebagai ibu yang tidak bisa bergerak. Istilah "perempuan" adalah konstruksi yang sangat sewenang-wenang yang hanya berfokus pada seksualitas patriarki (Hakim, 2020; Imron, 2015; Shalihin & Firdaus, 2019).

Kristien Samiyati adalah calon dari Partai Nasdem <sup>98</sup> dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Nusa Tenggara Timur. Partai Nasdem telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu dan telah memenuhi kuota 30% untuk perempuan dalam pemilu 2014 dan 2019 (Jovani, 2024).

Hubungan antara <sup>68</sup> Pendidikan Politik tentang Anti-Korupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik sangat penting untuk kualitas politisi perempuan dan untuk menghindari dilihat sebagai sekadar alat oleh kelompok oligarki-patriarkal. Namun, pendidikan politik di partai-partai politik masih kurang substansial dalam hal anti-korupsi dan penguatan kualitas kader perempuan. Proses rekrutmen di partai politik tertutup dan tidak berdasarkan prestasi, menghambat pemberdayaan politisi perempuan (Mirza et al., 2021).

Selain itu, memahami dampak dari aturan-aturan ini dapat membantu kita menilai kemajuan yang telah dicapai menuju kesetaraan gender dalam politik. Misalnya, beberapa partai mungkin memiliki pedoman yang mendorong inklusi perempuan dan gender terpinggirkan lainnya dalam posisi kepemimpinan, sementara yang lain mungkin masih beroperasi dengan praktik-praktik yang ketinggalan zaman dan diskriminatif. Dengan menganalisis dan mengkritik aturan-aturan ini, kita dapat mendorong perubahan yang diperlukan untuk <sup>57</sup> memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pada akhirnya, memeriksa aturan partai politik terkait gender sangat penting dalam memajukan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

### 2.1.3. Konsep Komunikasi Politik

Dalam bukunya *Political Communication and Social Theory* (Davis, 2002, p. 17), Aeron Davis menguraikan berbagai pendekatan teori untuk memahami komunikasi politik dalam demokrasi modern. Davis membahas demokrasi, representasi politik, dan ruang publik dengan merujuk pada teori Habermas mengenai ruang publik dan gagasan Pitkin tentang representasi (Davis, 2002, p. 34). Davis menekankan bahwa komunikasi politik berfungsi sebagai penghubung antara warga negara dan wakilnya, meskipun sering kali realitas media dan politik jauh dari ideal deliberatif. Selanjutnya, Davis menyampaikan tentang partai politik,

ia menjelaskan fenomena profesionalisasi partai yang mengutamakan strategi kampanye dan pencitraan politik ketimbang dialog substantif dengan publik (Davis, 2002, p. 50).

Aeron Davis menghubungkan kajian komunikasi politik dengan teori-teori sosial untuk memahami bagaimana pesan, simbol, dan wacana politik dibentuk, disebarluaskan, serta memengaruhi proses demokrasi modern. Davis memanfaatkan berbagai kerangka teoritis, seperti Teori Ruang Publik Habermas yang menempatkan media sebagai arena diskusi dan pembentukan opini publik; Teori Representasi Politik dari Pitkin yang menjelaskan fungsi komunikasi politik sebagai jembatan antara warga negara dengan wakilnya (Davis, 2002, p. 34). Teori *Mediatization Politics* yang menyoroti dominasi logika media dalam membentuk agenda politik; serta teori elitisme dan jaringan elit kosmopolitan yang menegaskan bahwa arus komunikasi politik sering kali dikuasai oleh segelintir kelompok elit (Davis, 2002, p. 81). Selain itu, Davis juga mengulas konsep *managed democracy* yang menunjukkan bahwa partisipasi publik kerap dikelola secara strategis oleh aktor politik (Davis, 2002, p. 158).

Davis mengidentifikasi delapan dimensi utama komunikasi politik. Pertama, dimensi struktur media dan politik, yang membahas perbandingan sistem politik dan media, termasuk regulasi, kepemilikan, serta relasi antara keduanya (Davis, 2002, pp. 1–17). Kedua, dimensi representasi dan ruang publik, yang menelaah bagaimana isu serta aktor politik dihadirkan dalam media dan forum formal seperti parlemen (Davis, 2002, pp. 18–34). Ketiga, komunikasi partai dan pemasaran politik, yang mencakup strategi kampanye, pencitraan tokoh, dan pemanfaatan teknologi komunikasi (Davis, 2002, pp. 40–50). Keempat, produksi dan rutinitas jurnalistik, yang menelusuri hubungan jurnalis dengan sumber berita, pengaruh agenda setting, dan tekanan ekonomi-politik terhadap produksi berita (Davis, 2002, pp. 60–81). Kelima, politik selebritas dan modal media, yang menyoroti peran figur publik dan personal branding dalam membangun popularitas politik (Davis, 2002, p. 97). Keenam, media baru dan partisipasi publik, yang mengkaji peran media digital dalam memperluas ruang partisipasi politik sekaligus tantangan *fat democracy* (Davis, 2002, p. 113). Ketujuh, komunikasi politik global, yang melihat bagaimana isu internasional seperti perang atau kebijakan luar negeri

diproyeksikan ke dalam wacana nasional. Terakhir, dimensi krisis komunikasi publik, yang mencermati menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media dan politisi (Davis, 2002, p. 158).

Setiap dimensi tersebut memiliki indikator yang dapat digunakan dalam penelitian. Misalnya, dimensi struktur media dan politik dapat diukur melalui tingkat konsentrasi kepemilikan media, akses media bagi partai kecil, dan independensi redaksi. Dimensi representasi dan ruang publik dapat dilihat dari proporsi pemberitaan isu politik, keberagaman aktor yang disorot, serta keseimbangan pandangan pro dan kontra. Pada dimensi komunikasi partai dan pemasaran politik, indikatornya mencakup intensitas iklan politik, strategi *branding*, dan variasi media kampanye. Dimensi produksi jurnalistik dapat dianalisis melalui ketergantungan pada sumber resmi, kecepatan siklus berita, dan pola framing yang digunakan. Sementara itu, politik selebritas dapat diukur dari frekuensi kemunculan politisi di media hiburan, citra personal yang dibangun, dan hubungan antara popularitas dengan substansi isu. Media baru dan partisipasi publik diukur dari interaksi daring, partisipasi diskusi online, dan efektivitas mobilisasi digital. Untuk komunikasi politik global, indikatornya meliputi liputan isu internasional, narasi media tentang peristiwa luar negeri, dan peran aktor global. Sedangkan pada krisis komunikasi publik, indikatornya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media dan politisi, persepsi bias pemberitaan, dan tingkat apatisisme politik (Davis, 2002, pp. 120–151).

Dalam *strategic development* politisi harus mengerti mengenai *developing product*:

- a) Pertama, yang perlu dipahami tentang produk politik adalah bahwa produk politik tidak hanya berbentuk kebijakan. Produk politik juga mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh partai meliputi organisasinya, konferensi atau konvensi, tokoh dan pimpinan partai, politisi dan kandidat terpilih.
- b) Kedua, menentukan strategi, hal ini berhubungan dengan menetapkan tujuan dan berpegang teguh pada tujuan agar tetap fokus. Para elit politik memiliki banyak tujuan selain hanya memenangkan pemilu seperti mengejar ideologi, kebijakan maupun undang-undang tertentu,

mendapatkan dukungan dari segmen baru di pasar, menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan, meningkatkan keanggotaan dan memenangkan kendali pemerintahan.

- c) Ketiga, *strategi development* selanjutnya adalah *positioning and the competition*. Penempatan strategi menggunakan analisis pasar untuk meniai dimana politisi dan partai berada dalam kaitanya satu sama lain, dan menginformasikan cara menanggapi pesaing . Dalam menanggapi pesaing ini dapat mencakup memastikan perbedaan yang jelas antara politisi dan lawanya. Terdapat *branding* politik yang merupakan entitas yang lebih mengarah pada psikoogis yang terdiri dari kesan, asosiasi, dan persepsi keseluruhan terhadap suatu partai atau politisi. Branding bersifat jangka panjang, diciptaan dari perilaku di masa lalu dan sulit untuk diubah (Lees-Marshment, 2011, pp. 18–72).

1. *Leading Responsively*

Apabila seorang politisi ingin memenangkan pemilu ia haru bersifat responsif. Aturan penting pertama dalam bertindak responsif adalah bahwa analisis pasar dapat digunakan politis untuk mencapai perubahan bukan untuk mengubah diri merek sendiri. Peraturan kedua dalam memimpin adalah "*True Leadership: Balancing Leading And Following The Market*". Para pemimpin harus mencari dan mendengarkan analisis pasar dari berbagai sumber, seorang politisi harus bisa menyeimbangkan berbagai tuntutan dan ujian sesungguhnya bagi seorang politisi adalah mampu mempertimbangkan seluruh faktor dan memposisikan diri di ruang publik dengan cara yang suportif. Hubungan antara penasehat dan pemimpin, penasehat harus memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin (Lees-Marshment, 2011).

2. *Marketing The Party And Communicating*

Poin pertama dalam memasarkan partai politik adalah politisi membutuhkan sekelompok orang untuk berbagi pesan dan mereka kemudian akan membagikan pesan tersebut kepada teman, rekan kerja, dan keluarga. Oleh karena itu penting untuk memiliki relawan, hal ini yang nantinya akan mendukung perihal pendanaan serta *marketing vision and ideology*. Nantinya ada relawan yang memberikan support pendanaan maupun yang meluangkan

waktu agar partai mereka terpilih. Mereka merupakan anggota partai, mereka akan menjalankan aktivitas kantor lokal partai, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kampanye, membagikan selebaran menggalang dukungan pemilih, dapat dikatakan mereka merupakan urat nadi partai politik. Sementara itu berkaitan dengan *communicating*, dapat diartikan bahwa lingkungan politik umum bersifat jangka pendek sementara dalam pemerintahan elit partai harus fokus pada target jangka panjang. Maka dari itu penting untuk menggunakan seluruh media yang ada untuk memberikan lebih banyak pemikiran mengenai *positioning* terhadap pemerintah, *branding* maupun reputasi jangka panjang (Lees-Marshment, 2011).

Teori Jenifer Lee Mashment digunakan untuk menganalisis sejauh mana strategi yang digunakan partai Nasdem dalam perjuangan meningkatkan representasi keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2024, baik dalam menggunakan strategi konvensional, digital dan strategi dalam melakukan pengorganisasi partai politik.

Hanna Fenichel Pitkin menjelaskan representasi “*acting for*”<sup>87</sup> sebagai menghadirkan sesuatu yang tidak hadir secara harfiah. Definisi ini mencakup aspek simbolik dan substantif dari representasi, dimana perwakilan tidak hanya melambangkan kepentingan yang diwakili tetapi juga secara aktif bekerja untuk memajukan kepentingan tersebut “melibatkan perwakilan secara aktif bekerja untuk kepentingan terwakili” bukan “*standing for*” melibatkan perwakilan yang sekadar melambangkan atau mewakili kepentingan yang diwakili (Pitkin, 2023).

Pitkin juga menjelaskan representasi merupakan aktivitas karakteristik tertentu, yang ditentukan oleh norma-norma perilaku tertentu atau hal-hal tertentu yang diharapkan dilakukan oleh seorang perwakilan. Dengan adanya representasi, terkait dengan apa yang diharapkan dari seorang wakil, bagaimana ia harus bertindak, kewajibannya, dan bagaimana perannya didefinisikan.

Representasi merupakan aktivitas karakteristik tertentu, yang ditentukan oleh norma-norma perilaku tertentu atau hal-hal tertentu yang diharapkan dilakukan oleh seorang perwakilan. Dengan adanya representasi, maka juga akan dibahas mengenai apa yang diharapkan dari seorang wakil, bagaimana ia harus bertindak, kewajibannya, dan bagaimana perannya didefinisikan. Sifat representasi dan

perannya dalam membentuk sistem politik yang ideal. Representasi yang sebenarnya memerlukan sikap tanggap terhadap yang diwakili, dan perhatian terhadap keinginan atau kebutuhan mereka (Pitkin, 2023, pp. 26–55).

Brian McNair membedah dinamika hubungan media dan demokrasi, menjelaskan efek komunikasi politik terhadap opini publik, serta menyoroti peran media dalam membingkai isu dan membentuk wacana. Selain membahas hubungan struktural antara media dan politik, McNair juga menguraikan strategi komunikasi politik yang digunakan berbagai pihak. Ia mengkaji penggunaan iklan politik, hubungan masyarakat (*public relations*) politik, teknik kampanye partai, dan cara kelompok kepentingan memanfaatkan liputan media untuk mendapatkan “oksigen” publisitas. Bab-bab selanjutnya memperluas pembahasan ke ranah komunikasi politik internasional, termasuk bagaimana isu global dan kebijakan luar negeri dikomunikasikan lintas batas negara. McNair juga mengangkat fenomena *performance politics*, yakni bagaimana politik di era modern sering dikemas sebagai pertunjukan yang menonjolkan citra dan simbol ketimbang substansi kebijakan (McNair, 2003).

#### **2.1.4. Teori Representasi Politik**

Representasi politik merupakan mengacuan pada proses dimana pejabat terpilih bertindak atas nama dan membuat keputusan yang mencerminkan kepentingan serta preferensi konstituen yang memilih mereka. Representasi perempuan berarti dia yang terpilih mewakili kaum perempuan lainnya (Celis, 2009).

Konsep ini sangat mendasar bagi pemerintahan demokratis, karena memungkinkan suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, perwakilan politik berfungsi sebagai penghubung penting antara pemerintah dan rakyat, memastikan bahwa kebutuhan publik diperhitungkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Tanpa perwakilan politik, pemerintah akan kesulitan untuk mencerminkan secara akurat berbagai perspektif dan kebutuhan warganya (Celis & Childs, 2012).

Representasi terdapat beberapa jenis, diantaranya representasi simbolik, representasi normative, representasi deskriptif, dan representasi substantive.

Representasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya mengkomunikasikan ide dan gagasan yang muncul dari mayoritas, membentuk identitas dan mengakomodir kepentingan, dan menciptakan realitas sosial politik.

*Pertama*, Representasi Formal merupakan representasi melalui proses elektoral maupun non-elektoral dengan merujuk pada sistem perwakilan yang diatur secara hukum atau konstitusional. Biasanya terjadi melalui pemilihan umum, di mana individu dipilih untuk mewakili kelompok atau wilayah tertentu dalam lembaga legislatif (DPR, DPRD, dll). Contoh: Anggota DPR mewakili daerah pemilihan berdasarkan aturan sistem pemilu yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, peningkatan representasi perempuan di pemerintahan tidak selalu diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih baik untuk perempuan dan keluarga. Misalnya, di negara-negara di mana perempuan telah diangkat ke posisi kekuasaan simbolis tanpa otoritas pengambilan keputusan yang nyata, dampaknya terhadap kebijakan terkait gender mungkin minimal. Selain itu, dalam beberapa kasus, politisi perempuan telah bersekongkol dalam melanggengkan stereotip gender yang merugikan atau kebijakan yang tidak memprioritaskan kebutuhan kelompok terpinggirkan dalam gender mereka sendiri (Kiftiyah, 2019).

Representasi formal "Representasi politik di Indonesia melibatkan proses elektoral dan non-elektoral. Proses elektoral menghasilkan representasi politik formal di parlemen, sementara proses non-elektoral melibatkan gerakan politik oleh kelompok masyarakat sipil. Representasi politik tidak selalu membawa representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya sebagian (Liberti, 2021).

*Kedua*, representasi deskriptif berkaitan dengan kesamaan karakteristik antara wakil rakyat dan konstituennya, seperti jenis kelamin, etnis, agama, usia, atau latar belakang sosial. Ide dasarnya adalah: "mereka yang seperti kita lebih memahami kita." Contoh: Perempuan mewakili perempuan dalam parlemen; wakil dari kelompok minoritas etnis mewakili komunitasnya.

*Ketiga*, representasi substantif representasi yang merujuk pada tindakan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan kelompok yang diwakilinya, meskipun tidak berasal dari kelompok tersebut.

<sup>16</sup> *Voting, introducing and supporting legislation, speaking for women, expanding the political agenda, defining women's interests, gendering debates and policy content, lobbying the government, and providing feminist policy analysis and feedback are examples of acts that support women and address issues of particular importance to women in the public and/or private spheres, all of which contribute to substantive representation of women* (Celis & Childs, 2012).

*Keempat*, representasi simbolik keterkaitan dengan makna simbolis atau identitas yang diberikan masyarakat kepada seorang wakil atau lembaga politik. Sering kali berhubungan dengan kepercayaan dan legitimasi, bukan pada tindakan nyata. Contoh: Kehadiran perempuan dalam posisi menteri bisa menjadi simbol kemajuan gender, meski belum tentu mengubah kebijakan secara substantif.

Salah satu jenis representasi perempuan yang digunakan dalam pendidikan perempuan adalah representasi simbolik. Simbol matematika, simbol abstrak, dan notasi matematika semuanya digunakan dalam representasi simbolik. Siswa dalam kategori kemampuan tinggi mungkin memenuhi indikasi representasi simbolik dengan cukup baik, tetapi mereka masih belum mampu memenuhi penanda kemampuan representasi verbal dan visual secara keseluruhan, menurut analisis kemampuan representasi perempuan (Eddy Roflin, Iche Andriyanu Liberti, 2021).

*Kelima*, representasi responsif yaitu mengacu pada kemampuan wakil rakyat untuk mendengarkan, menanggapi, dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan konstituen. Ada hubungan dua arah antara wakil dan rakyat, dan ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat.

Kelima jenis representasi ini tidak berdiri sendiri dan seringkali saling beririsan dalam praktiknya. Representasi yang ideal adalah ketika perwakilan tidak hanya formal dan deskriptif, tetapi juga substantif dan responsif, sehingga kepentingan rakyat benar-benar diperjuangkan secara nyata dalam proses politik.

#### **2.1.5. Teori Politik Perempuan**

Keterwakilan perempuan di parlemen masih sekadar statistik. Meningkatkan kualitas representasi politik merupakan tantangan bagi partai politik dan gerakan perempuan. Keyakinan dan kepentingan perempuan harus

tercermin dalam gerakan perempuan. Untuk menghasilkan kandidat yang siap dan mampu menjalankan peran dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, partai politik juga harus berfokus pada proses rekrutmen, promosi, dan kaderisasi internal.

Perempuan pertama kali memasuki dunia politik pada pemilihan umum 1955, yang menghasilkan penambahan 17 anggota DPR, atau 0,7% dari 255 anggota. Partai politik atau afiliasinya tidak diragukan lagi merupakan organisasi perempuan yang paling aktif dalam pemilu. Organisasi perempuan yang berafiliasi dengan partai politik antara lain Parkiwa (Partai Kebangkitan Nasional) (1950), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) (Partai Komunis Indonesia) (1950), Persatuan Wanita Murba (Perwamu) (Partai Murba) (1950), Wanita Demokrat Indonesia (Partai Nasional Indonesia) (1951), Wanita Nasional (Partai Indonesia Raya) (1953), dan Gerakan Wanita Sosialis Indonesia (GWS) (Partai Sosialis Indonesia) (Jovani, 2014).

Selain itu, perwakilan perempuan dalam partai politik juga dapat memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan dan prioritas yang diajukan oleh organisasi-organisasi ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat aktif dalam partai politik, ada kemungkinan yang lebih besar bahwa isu-isu yang penting bagi perempuan akan ditangani dan diprioritaskan. Ini dapat mengarah pada kebijakan yang lebih inklusif dan beragam yang lebih mencerminkan kebutuhan dan pengalaman semua anggota masyarakat. Selain itu, memiliki representasi perempuan yang lebih setara dalam partai politik juga dapat berfungsi sebagai simbol kuat kemajuan menuju kesetaraan gender di arena politik (Amalia, 2023).

Perempuan pertama kali memasuki dunia politik pada pemilihan umum 1955, yang menghasilkan penambahan 17 anggota DPR, atau 0,7% dari 255 anggota. Partai politik atau afiliasinya tidak diragukan lagi merupakan organisasi perempuan yang paling aktif dalam pemilu. Organisasi perempuan yang berafiliasi dengan partai politik antara lain Parkiwa (Partai Kebangkitan Nasional) (1950), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) (Partai Komunis Indonesia) (1950), Persatuan Wanita Murba (Perwamu) (Partai Murba) (1950), Wanita Demokrat Indonesia (Partai Nasional Indonesia) (1951), Wanita

Nasional (Partai Indonesia Raya) (1953), dan Gerakan Wanita Sosialis Indonesia (GWS) (Partai Sosialis Indonesia) (Jovani, 2014).

#### 2.1.6. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Idealnya konsep <sup>94</sup>partisipasi perempuan dalam politik tentunya harus dikonsepsi dengan dengan model kaderisasi kaum perempuan untuk bisa aktif di partai politik. Kasusnya pada beberapa organisasi partai politik kaderisasi partai dilakukan asal-asalan yang penting terdapat keterwakilan perempuan di partai politik. Sehingga perempuan yang ada dan bergabung di partai politik tidak sungguh-sungguh dibekali pengetahuan dan keterampilan bagaimana menjadi perempuan yang sukses berkarir di partai politik.

Perwakilan politik adalah batu penjur demokrasi yang membantu menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan keadilan bagi semua anggota masyarakat (Hutabarat et al., 2021).

Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan politik yang memperkuat keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam berpartisipasi dalam politik. <sup>53</sup>Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan mendukung bagi perempuan agar mereka merasa nyaman dan didukung dalam berperan aktif dalam kehidupan politik lokal. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik lokal akan semakin meningkat dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Hayes & Hibbing, 2017).

Namun, isu mendasar dalam politik perempuan adalah ketidakadilan yang diakibatkan oleh kesenjangan antara hak politik perempuan, tanggung jawab, dan posisi politik mereka dengan laki-laki. Posisi perempuan dalam partai politik, hingga saat ini, mereka hanya dianggap sebagai anggota dalam hal kepemimpinan (Fitriyanti, 2011).

Misalnya, di negara-negara seperti Rwanda di mana kuota gender telah diterapkan, telah terjadi kemajuan signifikan dalam hal pengesahan undang-undang yang mempromosikan <sup>96</sup>kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan. Ini termasuk undang-undang yang menangani isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, hak reproduksi, dan diskriminasi di tempat

kerja, yang semuanya berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari perempuan dalam masyarakat (Gwiazda, 2021).

Perempuan dalam fungsi pemerintahan tidak bisa diremehkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika perempuan dilibatkan dalam badan pengambilan keputusan politik, ada fokus yang lebih besar pada isu-isu seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Perempuan membawa perspektif dan pengalaman unik ke meja, yang mengarah pada kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif yang menguntungkan semua anggota masyarakat (Chueri & Damerow, 2023). Di negara-negara di mana perempuan memegang sejumlah besar posisi politik, sering kali terjadi penurunan korupsi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Oleh karena itu, meningkatkan jumlah perempuan dalam politik bukan hanya masalah kesetaraan, tetapi juga cara untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan pemerintahan secara keseluruhan.

Menurut Yubahas Ilyas dalam (Artina, 2016) teori yang mendasari gerakan politik perempuan adalah teori feminisme, dan banyak dari ahli yang menjadikan teori feminisme sosial sebagai teori dasar gerakan politik perempuan merupakan kesadaran kaum perempuan bahwa mereka mengalami ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan peran di masyarakat dan bergerak untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Ketidakseimbangan tersebut umum terjadi di dalam lingkungan sosial dan bahkan di dalam lingkup keluarga sendiri dalam apalagi dalam hal politik. Terdapat dimensi dalam hal menegakan prinsip gerakan politik perempuan diantaranya keseimbangan, kesesuaian, kesesuaian hak, bergerak ke arah perubahan lebih baik, bergerak dengan prinsip bersamaan bergotong royong.

#### **2.1.7. Sistem Pemilihan Umum**

"Sistem Pemilu adalah sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia, yang awalnya merupakan sistem proporsional tertutup dan kemudian berkembang menjadi sistem proporsional terbuka mulai tahun 2009. Perubahan sistem Pemilu tersebut memberikan konsekuensi tersendiri dalam konteks penyelenggaraan Pemilu (Kartiko, 2009; Sukriono, 2009; *Edi Agus*, 2019; *Atili Yusril and Firman Latuda*, 2022).

Sistem Pemilu yang berkembang di Indonesia memungkinkan rakyat <sup>95</sup> untuk memilih dengan bebas siapa yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Perubahan menjadi sistem proporsional terbuka menunjukkan evolusi dalam upaya menciptakan proses pemilihan umum yang lebih transparan dan inklusif. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat menjadi lebih penting dalam menentukan arah dan kebijakan negara.

Dengan mempromosikan keberagaman gender di dalam jajaran mereka, partai politik dapat menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif yang benar-benar melayani kepentingan semua warga negara. Selain itu, peningkatan representasi perempuan dalam partai politik dapat menginspirasi dan memberdayakan perempuan lain untuk lebih terlibat secara politik dan mencari peran kepemimpinan, menciptakan umpan balik positif yang memperkuat lanskap politik secara keseluruhan (Hayes & Hibbing, 2017).

Misalnya, ketika partai politik secara aktif merekrut dan mendukung kandidat perempuan, seperti Partai Kesetaraan Perempuan di Inggris, mereka dapat lebih baik menangani isu-isu penting bagi perempuan seperti hak reproduksi dan kesetaraan upah. Ini tidak hanya menghasilkan perspektif yang lebih beragam dalam proses pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik secara keseluruhan terhadap sistem politik (Amalia, 2023).

Namun, isu mendasar dalam politik perempuan adalah ketidakadilan yang diakibatkan oleh kesenjangan antara hak politik perempuan, tanggung jawab, dan posisi politik mereka dengan laki-laki. Posisi perempuan dalam partai politik, hingga saat ini, mereka hanya dianggap sebagai anggota dalam hal kepengurusan (Fitriyanti, 2011).

<sup>6</sup> Menurut hasil penelitian tentang partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang, ada kecenderungan rendah dibandingkan laki-laki (Sacchet, 2005). *Pertama*, pasalnya, mereka lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga atau domestik. Memang diakui bahwa ada beberapa keterbatasan bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik. Tiga di antaranya yang menonjol yaitu, pertama, aspek supply and demand. Supply berkaitan dengan faktor-faktor prinsipal yang menentukan kemampuan politik perempuan.

Terkait masalah rekrutmen politik perempuan, permintaan merupakan faktor institusional dan politis. Karena perempuan mungkin mengantisipasi tantangan praktis dalam menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan jabatan politik, penawaran dan permintaan tidak saling bergantung.

*Kedua*, isu sosialisasi politik berkaitan erat dengan keterbatasan kemampuan politik perempuan. Perempuan yang tersosialisasi secara politik lebih cenderung mengaitkan status tanpa harus berjuang untuk mendapatkannya. Githesen dan Prestage berpendapat bahwa konflik antara status yang dicapai dan status yang dikaitkan, yang muncul dari proses sosialisasi politik, merupakan salah satu isu yang dihadapi perempuan dalam politik.

*Ketiga*, Faktor situasional, seperti masalah dengan ibu. Hambatan terbesar bagi perempuan untuk memasuki dunia politik dan pemerintahan tampaknya adalah pengasuhan anak di rumah. Isu penting lainnya adalah perempuan pekerja semakin kekurangan waktu, sehingga mereka tidak dapat mengadopsi pandangan politik tertentu. Keterlibatan politik perempuan tidak terlembagakan akibat situasi ini (Zaenal, 2020).

Andin dan Harahap (2017) menerangkan:

“Realitas sosial yang menggambarkan kecenderungan minimumnya partisipasi politik perempuan dan rendahnya keterwakilan mereka dalam legislatif tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang disinyalir amat kuat pengaruhnya adalah budaya politik. Budaya politik lahir dari budaya bangsa yang ada dalam masyarakat. Budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Budaya yang dominan di Indonesia adalah budaya patrimonialistik. Menurut Gaffar (2004:115) dalam (Budiman et al., 2020; Muslimat, 2020; Ramadhany & Rahmawati, 2020) budaya patrimonialistik adalah budaya di mana pemerintah ada di bawah kontrol seseorang dan kelompoknya. Budaya patrimonialistik ini memiliki karakteristik: (1) kecenderungan untuk memperkuat sumberdaya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya; (2) kebijaksanaan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik; (3) *rule of law*, merupakan sesuatu yang bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa (*rule of man*); dan (4) kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik (Adeni & Harahap, 2017).”

Orientasi dan keterlibatan masyarakat ditentukan oleh budaya yang dianut masyarakat ini, dan karena orientasi inilah hanya sedikit perempuan

yang memilih untuk mencalonkan diri. Lebih lanjut, masyarakat Indonesia dicirikan oleh budaya patriarki yang kuat yang secara konsisten menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Menurut Murniati (2004:8), sistem patriarki adalah sistem yang dilambangkan oleh laki-laki, atau ayah. Laki-laki memiliki wewenang untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan dalam sistem ini. Karena rasionalnya konsisten dengan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau gender, alih-alih gender, sistem ini dianggap alami (Adeni & Harahap, 2017).

<sup>23</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu dan Pemilukada (Fitriyanti, 2001) dalam (Mulyono, 2010).

<sup>13</sup> Pada suatu tatanan masyarakat, khususnya masyarakat demokratis diasumsikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam pergaulan yang demokratis. Dalam pergaulan tersebut, kebebasan individu hanya boleh dibatasi oleh kebebasan yang lainnya. Menurut Rawls, dari sudut pandang keadilan sebagai kewajaran, kebebasan dapat dibatasi karena hal itu dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kebebasan politik; namun demikian, jika kesenjangan tersebut diperlukan untuk melindungi kebebasan kelompok terpinggirkan, maka hal itu dapat diterima (Fahmi, 2016).

Organisasi politik, atau singkatnya orpol, adalah kekuatan politik yang hadir dalam pertumbuhan dan perkembangan banyak negara. Terdapat organisasi politik di hampir setiap negara di dunia, termasuk angkatan bersenjata, organisasi masyarakat, partai politik, dan kelompok-kelompok penekan lainnya (Prayuda et al., 2020).

Perkembangan partai politik yang berfungsi sebagai kekuatan melawan penjajah inilah yang menentukan sejarah partai politik di negara-negara berkembang. Untuk mengamankan kemerdekaan negara mereka, partai politik berorganisasi dan berjuang bersama militer.

Pergerakan kemerdekaan di Indonesia, bertolak dari munculnya organisasi-organisasi yang bergerak dari lingkungan etnis seperti pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan

kesadaran orang Jawa. "Di samping itu lahir pula kelompok-kelompok yang berdasarkan suku kedaerahan seperti Paguyuban Pasundan (1914), Serikat Sumatera (1918), Serikat Ambon (1929), Rukun Minahasa dan Kaum Betawi (1923) (Nimrah dan Sakaria et al., 2015).

"Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran faham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan<sup>?</sup>badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Setelah dikeluarkan Ketetapan Pemerintah pada tanggal 3 Nopember 1945, maka terbentuklah berbagai partai politik yang pada umumnya merupakan kelanjutan daripada organisasi-organisasi sosial, dan partai-partai politik yang dibentuk baik<sup>101</sup> da masa kolonial Belanda maupun pada masa kekuasaan Jepang." (Prayuda et al., 2020).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dinamika<sup>39</sup> partisipasi politik perempuan di Indonesia, baik dalam konteks pemilu, legislatif, hingga gerakan akar rumput. Salah satu penelitian<sup>43</sup> oleh Rizki Priandi dan Kholis Roisah dalam Jurnal Ilmu Pembangunan

Terdapat Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dinamika<sup>39</sup> partisipasi politik perempuan di Indonesia, baik dalam konteks pemilu, legislatif, hingga gerakan akar rumput. Salah satu penelitian<sup>43</sup> oleh Rizki Priandi dan Kholis Roisah dalam Jurnal Ilmu Pembangunan Hukum Indonesia (2019) menyoroti pentingnya posisi strategis perempuan dalam parlemen. Penelitian<sup>45</sup> ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis fluktuasi keterwakilan perempuan akibat kebijakan politik. Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan berbeda dalam pendekatan metodologinya, karena menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan fokus secara spesifik pada organisasi sayap partai Garnita Malahayati Partai Nasdem.

Penelitian oleh Muhammad Ar Rafii dan Elan Jaelani dalam *Jurnal Aliansi* (2024) menyoroti persoalan ketercapaian kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif.<sup>33</sup> Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peran lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu dalam menjamin keterwakilan perempuan melalui regulasi dan sanksi. Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan berbeda

dalam fokus kajiannya, karena lebih menitikberatkan pada aktivitas organisasi perempuan di dalam partai politik, bukan pada aspek kebijakan formal.

Penelitian oleh Tyas Retno Wulan (2016) dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak* memetakan gerakan perempuan di Indonesia sebagai upaya penguatan ruang publik, khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian ini menitikberatkan pada dampak gerakan perempuan pasca disahkannya regulasi terkait kuota dan perlindungan perempuan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki arah berbeda, karena fokusnya pada ranah politik praktis dan struktur internal partai di tingkat nasional.

Penelitian oleh Very Wahyudi (2018) mengulas hambatan budaya patriarki dalam keterlibatan perempuan di politik, dengan menekankan bahwa rendahnya partisipasi perempuan berasal dari konstruksi sosial yang memandang politik sebagai ranah laki-laki. Penelitian ini bersifat teoretis dan reflektif dalam membahas persoalan representasi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berbeda dari segi pendekatannya, karena lebih menekankan pada pengamatan empiris langsung melalui studi lapangan.

Penelitian oleh Amaliatul Walidain dan Novia Kencana (2018) membahas peran politik perempuan melalui tinjauan historis terhadap organisasi PKK sebagai bentuk gerakan perempuan yang bermitra dengan pemerintah. Penelitian ini berfokus pada peran domestik dan sosial perempuan dalam ruang publik. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus berbeda, karena menitikberatkan pada Garnita Malahayati sebagai organisasi politik strategis dalam pemenangan pemilu dan pendidikan politik berbasis gender.

Penelitian oleh Linda Dwi Erianty (2016) menelaah <sup>7</sup> **pemikiran politik perempuan Nahdlatul Ulama dalam perspektif feminisme**. Penelitian ini mengidentifikasi dua arus pemikiran mainstream dan non-mainstream yang menekankan kesetaraan gender melalui jalur formal maupun informal. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam pendekatannya, karena akan menelusuri praktik langsung dan strategi Garnita Malahayati sebagai bagian dari struktur partai politik.

Penelitian Satu-satunya artikel yang secara langsung membahas Garnita Malahayati sebagai objek kajian adalah artikel oleh Bambang Arianto dalam jurnal internasional *Demos* (2019). Artikel ini mengevaluasi efektivitas Garnita dalam kontestasi pemilu 2014 di Yogyakarta, dengan temuan bahwa organisasi ini sering dijadikan simbol pelengkap tanpa strategi pemberdayaan nyata. Penelitian yang akan dilakukan mengembangkan ruang lingkup lebih luas, dengan fokus pada Garnita tingkat nasional dan peranannya dalam pencapaian keterwakilan perempuan di DPR RI.

Penelitian oleh Muhamad Budiana (2023) dalam *Jurnal Saintitute* berjudul *Women and Politics: Representation of Women in Political Parties* bertujuan menyelidiki status perempuan dalam partai politik dan organisasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis representasi perempuan pada tingkat manajemen partai dan posisi kandidat dalam pemilu, dengan fokus khusus pada konteks Amerika Serikat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persentase perempuan yang menjadi kandidat masih rendah, meskipun sejumlah partai telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam posisi manajerial. Hambatan kelembagaan dan budaya, seperti stereotip gender, peran domestik tradisional, dan akses terbatas terhadap sumber daya politik, menjadi faktor utama pembatas. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam ruang lingkungannya, karena akan secara spesifik mengkaji strategi dan peran organisasi sayap partai Garnita Malahayati dalam mendorong keterwakilan politik perempuan di Indonesia.

Penelitian oleh Manon Tremblay (2007) dalam *Jurnal Democratization* terbitan Taylor and Francis, berjudul *Democracy, Representation, and Women: A Comparative Analysis*, membahas faktor-faktor yang memengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen dalam konteks perbandingan antarnegara. Penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi legislator perempuan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, yang bervariasi tergantung pada tingkat kematangan demokrasi suatu negara. Dalam demokrasi yang masih baru, sistem pemungutan suara menjadi faktor dominan, sedangkan dalam demokrasi yang telah mapan, nilai-nilai egaliter tentang peran gender lebih

berpengaruh. Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi bersifat kompleks dan beragam, sehingga analisis keterwakilan perempuan tidak bisa disamaratakan antar negara. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam fokus dan konteksnya, karena akan menelaah keterwakilan perempuan secara spesifik dalam struktur partai politik Indonesia melalui studi kasus organisasi Garnita Malahayati.

Penelitian oleh Jeffrey A. Karp dan Susan A. Banducci (2008) dalam *Jurnal ScienceDirect* berjudul <sup>18</sup> *When Politics is Not Just a Man's Game: Women's Representation and Political Engagement* meneliti keterkaitan antara representasi perempuan dan keterlibatan politik warga negara, khususnya perempuan. Dengan menggunakan data dari Comparative Study of Electoral Systems (CSES), penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan sebagai kandidat dan pejabat publik dapat meningkatkan keterlibatan serta sikap positif terhadap proses politik, meskipun dampaknya relatif lemah. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus berbeda karena menelaah dinamika internal organisasi sayap partai perempuan dan pengaruhnya terhadap representasi politik di Indonesia.

Penelitian oleh Karen Bird (2004) dalam *Hamilton on Canada* berjudul <sup>63</sup> *The Political Representation of Women and Ethnic Minorities in Established Democracies* mengembangkan kerangka analisis komparatif untuk menjelaskan representasi politik perempuan dan kelompok etnis minoritas. Fokus utamanya adalah pada faktor-faktor mikro seperti ukuran dan kohesi kelompok, pengalaman tinggal, serta relasi antara kelompok minoritas dan mayoritas. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan tidak mengeksplorasi dinamika etnis atau hubungan antar-kelompok, melainkan memusatkan perhatian pada strategi representasi politik perempuan dalam organisasi sayap partai.

Penelitian oleh Danil Stokemer (2007) dalam *Taylor & Francis* berjudul <sup>18</sup> *Why are there Differences in the Political Representation of Women in the 27 Countries of the European Union?* menganalisis variasi representasi perempuan di parlemen negara-negara Uni Eropa dengan memperhitungkan sistem pemilu, kuota, ideologi partai, dan posisi manajerial perempuan.

Penelitian ini menambahkan perspektif baru pada studi representasi gender. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam pendekatannya karena lebih memusatkan perhatian pada peran organisasi sayap partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam satu konteks nasional, yakni Indonesia.

Penelitian oleh Fabrizio Giraldo (2015) dalam *American Journal of Political Science* berjudul *The Temporary Importance of Role Models for Women's Political Representation* menyelidiki pengaruh kehadiran tokoh perempuan dalam politik terhadap munculnya kandidat perempuan lainnya, berdasarkan data pemilu kota di Swiss. Temuannya menunjukkan bahwa efek role model bersifat sementara dan menurun seiring waktu. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam pendekatan dan konteksnya, karena akan memfokuskan pada strategi dan motivasi kader perempuan yang terpilih dalam struktur organisasi sayap partai di Indonesia.

Penelitian oleh Melani M. Hughes dan Pamela Paxton (2018) dalam *Springer Nature* berjudul *The Political Representation of Women Over Time* memetakan perkembangan representasi politik perempuan secara global sejak 1945 hingga 2015. Mereka mengidentifikasi empat pola pertumbuhan representasi: tidak berubah, keuntungan inkremental, pertumbuhan cepat, dan dataran tinggi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan bersifat lebih terbatas, karena hanya fokus pada satu partai politik dan peran organisasi sayap perempuannya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Indonesia.

Penelitian oleh Hanane Darhour dan Drude Dahlerup (2013) dalam *Women's Studies International Forum* berjudul *Sustainable Representation of Women Through Gender Quotas* menganalisis keberlanjutan representasi perempuan pasca penerapan kuota gender dalam tiga pemilu di Maroko. Mereka menekankan pentingnya melihat kuota tidak hanya sebagai alat kuantitatif, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi jangka panjang. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan tidak menyoroti perbandingan sistem kuota antarnegara, melainkan memfokuskan pada ketercapaian representasi politik perempuan dalam Pemilu 2024 oleh satu partai politik di Indonesia.

Penelitian oleh Silvia Erzeel dalam *Sage Journal* berjudul <sup>77</sup> *Political Parties, Ideology, and the Substantive Representation of Women* membahas bagaimana ideologi partai memengaruhi representasi substantif perempuan. Ia menekankan perlunya membedakan antara kepentingan gender dan feminis serta melihat dampak ideologi <sup>6</sup> secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam ruang lingkupnya, karena tidak mengkaji ideologi lintas negara atau sistem, melainkan berfokus pada partai politik tertentu dan strategi internal organisasi sayap partainya dalam mendukung keterwakilan perempuan.

Penelitian oleh Muhamad Budiana (2023) dalam *Jurnal Saintitute* berjudul *Women and Politics: Representation of Women in Political Parties* bertujuan menyelidiki status perempuan dalam partai politik dan organisasi di <sup>32</sup> Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis representasi perempuan pada tingkat manajemen partai dan posisi kandidat dalam pemilu, dengan fokus khusus pada konteks Amerika Serikat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persentase perempuan yang menjadi kandidat masih rendah, meskipun sejumlah partai telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam posisi manajerial. Hambatan kelembagaan dan budaya, seperti stereotip gender, peran domestik tradisional, dan akses terbatas terhadap sumber daya politik, menjadi faktor utama pembatas. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berbeda dalam ruang lingkupnya, karena akan secara spesifik mengkaji strategi dan peran organisasi sayap partai Garnita Malahayati dalam mendorong keterwakilan politik perempuan di Indonesia.

Penelitian dengan judul "*Identities Constructed and Reconstructed: Representations of Asian Women in Britain*", Parminder Bhachu (2024) mengkritik representasi yang sering diberikan kepada perempuan Asia di Inggris sebagai sosok pasif, tertindas tradisi, dan tidak memiliki peran politik. Ia menegaskan bahwa gambaran tersebut banyak diproduksi oleh perspektif feminisme Barat dan studi antropologi yang mengabaikan dimensi ras, kelas, dan pengalaman diaspora. Bhachu menunjukkan bahwa perempuan Asia justru merupakan agen aktif yang terlibat dalam perjuangan anti-rasisme, anti-

imperialisme, serta kegiatan serikat pekerja dan aksi protes, sehingga pandangan yang menempatkan mereka sebagai kelompok “tak berdaya” adalah keliru. Selain itu, ia menyoroti bagaimana perempuan Asia terus-menerus merekonstruksi identitas melalui praktik budaya sehari-hari, seperti mode dan konsumsi etnik, yang tidak sekadar melestarikan tradisi asal tetapi juga menjadi bentuk inovasi, kreativitas, dan perlawanan terhadap stereotip identitas yang kaku. Dari sisi metodologi, tulisan ini menggunakan pendekatan analisis literatur kualitatif dan teori kritis, dengan menelaah wacana-wacana dominan yang membentuk citra perempuan Asia serta menawarkan kerangka interseksional yang mempertimbangkan ras, kelas, gender, dan konteks diaspora. Dengan demikian, Bhachu menekankan bahwa identitas perempuan Asia di Inggris tidak bersifat statis, melainkan hasil negosiasi dinamis yang merefleksikan keterlibatan aktif mereka dalam ranah politik dan budaya.

Studi berjudul “Gender and ethnic diversity in academic general surgery department leadership” karya Al-Faraaz Kassam dan tim (2021) meneliti representasi gender dan etnis dalam kepemimpinan akademik pada departemen bedah umum di Amerika Serikat. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan bahwa meskipun jumlah peserta pelatihan bedah dari kelompok perempuan dan minoritas semakin meningkat, hal tersebut tidak tercermin dalam struktur kepemimpinan di tingkat akademik. Dengan menggunakan metode observasional deskriptif, peneliti mengumpulkan data dari 118 program bedah umum yang tercatat dalam database FREIDA. Informasi mengenai ketua departemen, direktur program, wakil ketua bidang pendidikan, dan kepala divisi diperoleh melalui situs web resmi masing-masing departemen, sementara identifikasi gender dan etnis dilakukan berdasarkan data publik yang tersedia, seperti nama, foto, dan profil akademik. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan yang signifikan: 85,3% ketua departemen adalah laki-laki dan 79,3% berkulit putih; posisi direktur program juga didominasi laki-laki (74,6%), begitu pula wakil ketua pendidikan (77,3%). Sementara itu, representasi perempuan relatif lebih besar pada posisi associate program director (38,5%). Dari total lebih dari 785 kepala divisi, 73,4% berasal dari kelompok kulit putih, dengan representasi minoritas lebih menonjol hanya

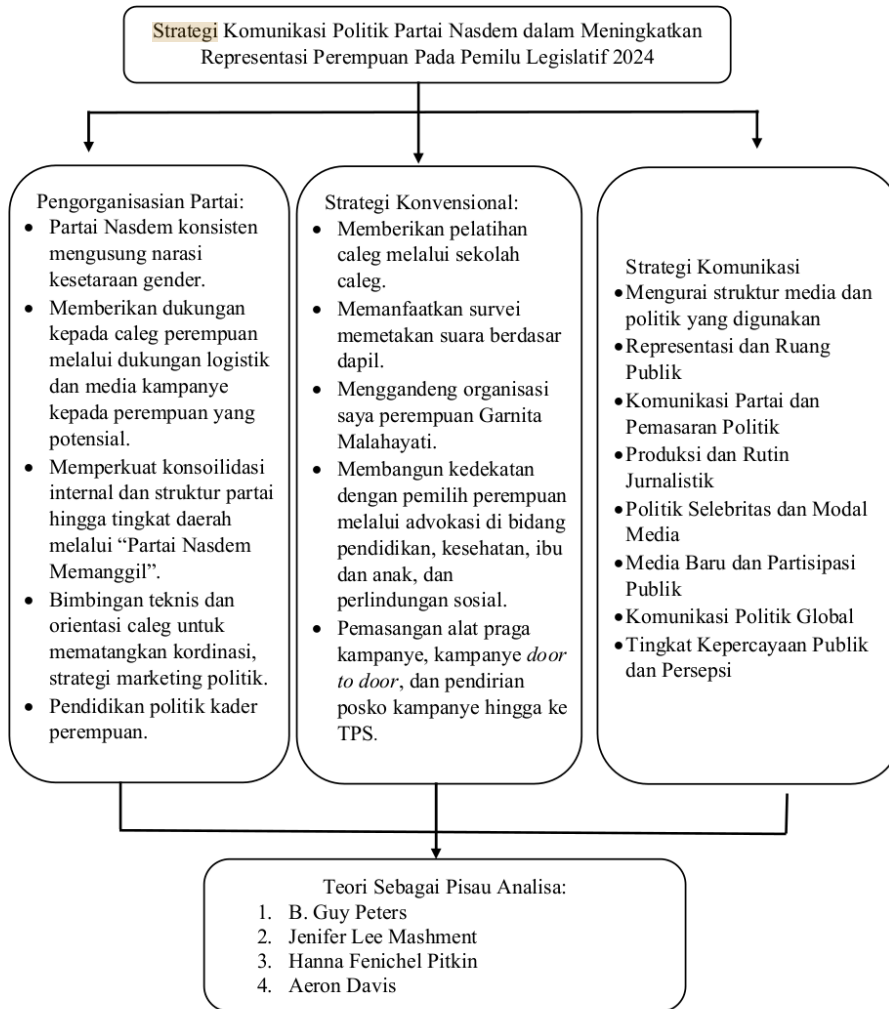
pada bidang trauma, sedangkan perempuan melebihi 10% pada divisi tertentu seperti kolorektal, toraks, pediatrik, dan bedah plastik/burn. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam keberagaman pada level peserta didik, kepemimpinan akademik dalam bidang bedah umum.

78

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 4.1

#### Kerangka Pemikiran



↓

Partai Nasdem Berhasil Meningkatkan Representasi Pada  
Pemilu Legislatif Tahun 2024

### 2.3.1 Keterangan Kerangka Pemikiran

Prestasi partai Nasdem dalam mempertahankan eksistensi perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2024 merupakan perjuangan yang cukup panjang. Tentu perjuangan yang sangat panjang ini mendapat pencapaian tertinggi pada pemilu tahun 2019 dan 2024 dengan 20,5% di 2019 menjadi 21,9% pada 2024. Pemilu 2019 partai Nasdem mendapatkan 32,20% tertinggi, dan pemilu 2024 mendapatkan 28,99% ditempat tertinggi. Prestasi ini tentu <sup>25</sup> tidak terlepas dari strategi internal partai Nasdem dan upaya partai Nasdem dalam merawat dail perempuan. Upaya yang dilakukan di internal partai meliputi: partai Nasdem konsisten mengusung narasi kesetaraan gender. Memberikan dukungan kepada caleg perempuan melalui dukungan logistik dan media kampanye kepada perempuan yang potensial, memperkuat konsolidasi internal dan struktur partai hingga tingkat daerah melalui “Partai Nasdem Memanggil. Bimbingan teknis dan orientasi caleg untuk mematangkan kordinasi, strategi marketing politik dan pendidikan politik kader.

Strategi konvensional atau tatap muka dilakukan partai Nasdem sebagai berikut: Memberikan pelatihan caleg melalui sekolah caleg, memanfaatkan survei elektoral untuk memetakan suara, menggandeng organisasi saya perempuan Garnita Malahayati, membangun kedekatan dengan pemilih perempuan melalui advokasi di bidang pendidikan, kesehatan, ibu dan anak, dan perlindungan sosial,

pemasangan alat pragra kampanye, *door to door* kampanye, dan pendirian posko kampanye hingga ke tempat TPS.

Keberhasilan strategi kelembagaan konvensional yang dilakukan partai Nasdem dalam meningkatkan representasi perempuan di pemilu 2024 tentu tidak terlepas dari strategi marketing politik secara digital. Strategi kelembagaan atau kepengurusan media digital yang dilakukan partai Nasdem menggunakan platform digital Instagram, Facebook, Twitter (X), dan Youtube Live. Menyebarkan konten video kreatif pendek melalui infografis, live interaktif membangun keterhubungan dengan masyarakat. Melakukan Posting kolase foto artistik, dan fitur iklan digital terarah menyoroti narasi-narasi gender, pendidikan perempuan, dan pemberdayaan perempuan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian merujuk pada setiap hal yang ditentukan peneliti dalam rangka mempelajari suatu topik melalui pengumpulan informasi untuk memperoleh Kesimpulan. Objek penelitian juga diartikan sebagai situasi sosial yang ingin diketahui permasalahannya. Untuk memahami objek penelitian, peneliti akan mengamati aktivitas (*activity*), pelaku (*actors*), dan tempat (*place*) dari objek yang ingin diteliti (Sugiyono, 2019, 285). Dalam penelitian ini, objek penelitian yang ingin diteliti adalah strategi marketing politik partai Nasdem dalam meningkatkan representasi perempuan pada pemilu legislatif tahun 2024.

Penelitian ini sangat menarik karena partai Nasdem dapat mempertahankan prestasi menjadi partai yang memiliki tingkat representasi tertinggi dalam meloloskan calon anggota legislatif perempuan di DPR-RI pada dua periode pemilu 2019 dan 2024. Indeks tertinggi perwakilan perempuan (IPK) masing pada pemilu 2019 sebesar 32,20% dan pada pemilu 2024 sebesar 28,99%. Partai Nasdem mengalahkan partai PKB pada pemilu tahun 2009 dengan nilai IPK sebesar 25% dan partai PPP dengan nilai IPK sebesar 25,64%.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi adalah penelitian yang memetakan kedudukan variabel dan mencari benang merah diantara hubungan-hubungan data yang diperoleh (Sugiyono, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini selalu bertugas untuk menjawab pertanyaan “*how*”. Ditambah dalam penelitian eksplanasi selalu berhubungan dengan pencarian sebab dan alasan mengapa fenomena tersebut terjadi (Prasetyo & Jannah, 2005). Pemilihan penelitian eksplanasi dipilih oleh penulis dengan alasan keinginan menggali informasi secara detil dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini didesain untuk menambah kekayaan informasi (*richness*) dan pemahaman mendalam (*deep understanding*).

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.3.1. Wawancara

Wawancara merujuk pada penggunaan metode pencarian data ketika peneliti akan menjalani penelitian dalam memperdalam fenomena yang ingin dikaji, maupun ketika peneliti bermaksud mendalami sisi responden lebih jauh. Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik wawancara ini bersifat fleksibel terhadap jawaban, sehingga proses penggalian informasi mampu dikembangkan melalui pertanyaan lanjutan yang berkaitan. Selain itu, umumnya peneliti memperoleh informasi khusus dari narasumber yang setelahnya dianalisis sebagaimana teknik yang digunakan (Sugiyono, 2019, 21).

Selama proses memperoleh data, peneliti hanya menentukan topik dan pertanyaan secara umum dan terbuka. Kemudian, peneliti memiliki pola mendapatkan informasi dari narasumber yang tidak terbatas pada pertanyaan terstruktur dan memperoleh informasi secara diskusi dan bertanggungjawab. Selama berjalannya wawancara lokasi dapat ditentukan dengan kesepakatan bersama baik melalui pertemuan langsung, telepon, pertemuan daring, dan proses wawancara dapat direkam secara audio. Setelah mendapatkan informasi, peneliti akan menganalisis hasil wawancara melalui rekaman dan dikumpulkan dalam bentuk transkrip rekaman (Sugiyono, 2019, 305).

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan yang dengan sengaja dipilih untuk mempelajari suatu fenomena melalui seseorang maupun sebuah lokasi, dimana teknik ini berlaku dalam perolehan informasi melalui wawancara untuk satu kali atau beberapa kali selama penelitian (Creswell, 2012).

Tabel 3. 1  
**Daftar Informan Penelitian**

No.	INFORMAN	JABATAN	Intansi	Kode
1.	Andina Tresia Narang	Ketua Garnita Malahayati	DPR RI Nasdem	R.1

2.	Nining Idra Saleh	Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik	DPR RI Nasdem	R.2
3.	Heroik	Ketua	Perludem	R.3
4.	Ratu Munawaroh	DPR RI Partai PDI-P	Bidang Perempuan	R.4
5.	Eva Sundari	Ketua Bidang Migran	DPR RI Nasdem	R.5
6.	Willy Aditya	Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi/ Bappilu	Nasdem	R.6
7.	Prof. Valina Sungka Subekti	Pengamat Politik	Akademisi	R.7
8.	Ardana	Pengamat Politik	Akademisi	R.8
9.	Saan Mustopa	Wakil Ketua DPP Nasdem	DPR RI Nasdem	R.9

Sumber: olah data, 2025

### 3.3.2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis, gambar, rekaman, laporan resmi, arsip organisasi, surat keputusan, berita media massa, hingga data digital seperti unggahan media sosial atau situs web lembaga. Tujuannya adalah memperoleh data yang bersifat faktual, historis, maupun administratif yang dapat memperkuat hasil penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2018), studi dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara karena dapat memberikan bukti tertulis yang objektif terhadap fenomena yang sedang diteliti. Melalui dokumen, peneliti dapat menelusuri latar belakang, kebijakan, keputusan, maupun aktivitas suatu lembaga tanpa harus selalu terlibat langsung di lapangan. Misalnya, dalam penelitian tentang partai politik, studi

dokumentasi bisa mencakup analisis AD/ART partai, platform politik, hasil kongres, siaran pers, dan laporan kegiatan organisasi (Sugiyono, 2022).

Proses studi dokumentasi biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) identifikasi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, baik yang bersifat primer (dokumen resmi) maupun sekunder (artikel, publikasi ilmiah, atau laporan media); (2) pengumpulan dan verifikasi untuk memastikan keaslian dan keabsahan sumber; (3) koding dan kategorisasi isi dokumen untuk menemukan tema atau pola tertentu; dan (4) analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam dokumen tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi memiliki nilai penting karena dapat mengungkap konteks sosial dan politik yang tidak selalu muncul dalam wawancara. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, dokumen sering menjadi sumber data sekunder yang digunakan untuk analisis statistik. Keunggulan metode ini adalah datanya bersifat stabil, dapat diakses kembali, dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan dokumen yang tersedia serta kemungkinan bias dalam pencatatan informasi.

Dengan demikian, studi dokumentasi merupakan metode yang sangat berguna untuk memperkuat validitas data penelitian. Ia tidak hanya berfungsi sebagai bukti pendukung, tetapi juga sebagai sumber utama dalam memahami kebijakan, praktik kelembagaan, serta dinamika sosial-politik yang terekam dalam berbagai bentuk dokumen.

### **3.4. Sumber Data**

#### **3.4.1. Data Primer**

Data Primer merujuk pada teknik pengambilan data dengan bertemu objek yang diteliti, dimana dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi kepada informan utama. Melalui cara ini, narasumber dapat secara langsung memberikan informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2019). Sumber data primer akan menunjukkan sudut pandang dan informasi yang asli. Informasi yang dihasilkan dari data primer mampu memperoleh detail penelitian yang lebih baik (Creswell, 2012).

### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang tidak secara langsung berinteraksi dengan peneliti, dimana mampu didapatkan dalam dokumen, artikel, jurnal, buku, koran, majalah, maupun website yang juga disebut sebagai *library research* (Sugiyono, 2019). Meskipun data sekunder tidak diperoleh langsung di lapangan, namun data sekunder mampu memperkuat informasi dalam menganalisis dan memahami topik, masalah, dan fenomena penelitian. Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang mencakup catatan pribadi maupun publik yang berhubungan dengan masalah atau fenomena penelitian. Bentuk dokumen yang menjadi sumber data ialah jurnal, buku, surat kabar, website, arsip perpustakaan, serta dokumen lainnya (Creswell, 2012).

### 3.5. Teknik Analisis data

Analisis data pada penelitian kualitatif, dijalankan sewaktu proses pencarian data dan berakhirnya proses pencarian data, pada waktu tertentu. Saat berjalannya wawancara, penulis telah menganalisis respon narasumber. Jika respon narasumber setelah dianalisis belum terasa puas, maka penulis dapat menambahkan pertanyaan lanjutan, hingga tahap tertentu, didapatkan data yang dinilai akurat. Miles and Huberman (1984), menyatakan bahwa kegiatan pada analisis data kualitatif dijalankan dengan interaktif, juga berkelanjutan hingga selesai, sehingga datanya telah jenuh. Kegiatan pada analisis data, ialah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Proses analisis diperlihatkan dalam gambar di bawah (Sugiyono, 2019, 321).

**Gambar 3.1**  
**Langkah-Langkah Analisis Data**



Sumber: (Sugiyono, 2019, 322).

Merujuk pada gambar di atas, sesudah dijalankan akumulasi data, selanjutnya penulis menjalankan *anticipatory* sebelum dilakukan reduksi data. Terdapat sejumlah komponen pada analisis data, yakni *data collection*/pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), dan *data display* (penyajian data) (Sugiyono, 2019, 322).

1) *Data Collection*/Pengumpulan Data

Aktivitas utama dalam proses penelitian ialah mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi maupun kombinasi ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dijalankan berhari-hari, dapat pula berbulan-bulan, yang membuat perolehan data lebih banyak. Di proses pertama, penulis memahami konteks keseluruhan terhadap fenomena yang diteliti, setiap yang terlihat dan terdengar harus didokumentasikan. Melalui hal tersebut, penulis mampu mendapatkan data yang sangat banyak dan beragam.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Oleh karena data yang didapatkan pada saat di lapangan berjumlah banyak, sehingga memerlukan pencatatan yang hati-hati. Kian lama penulis ke lapangan, maka kian banyak, beragam, dan kompleks juga akumulasi data yang diperoleh. Disinilah analisis data menggunakan reduksi data menjadi penting untuk digunakan. Reduksi data merujuk pada ringkasan serta pemilahan aspek-aspek utama, berfokus pada faktor-faktor primer, pencarian topik dan *patern*. Dengan hal tersebut, data yang berhasil direduksi dapat memperlihatkan bentuk yang semakin jelas, untuk kemudian meminimalisir kesulitan penulis dalam menjalankan pencarian data selanjutnya. Reduksi data dapat menggunakan peralatan elektronik seperti komputer mini, melalui pemberian kode terhadap suatu indikator-indikator.

Notulensi penelitian yang berbentuk huruf besar, huruf kecil, angka, serta simbol-simbol yang masih berantakan, yang sulit dimengerti. Melalui tahap reduksi, maka penulis meringkas, memilah data utama yang penting, membuat klasifikasi, atas dasar huruf besar, huruf kecil, serta angka. Data yang kurang penting yang digambarkan pada simbol semacam %, #, @ dsb, dihilangkan karena dinilai tidak penting untuk peneliti.

Pada proses reduksi data, penulis umumnya diarahkan dengan teori dan tujuan yang diharapkan. Penelitian kualitatif memiliki tujuan utama, yaitu temuan. Maka dari itu, jika penulis pada saat menjalankan penelitian, mendapatkan bermacam pandangan asing dan tidak familiar, tidak berpattern, maka hal inilah yang harus menjadi fokus penulis untuk menjalankan reduksi data.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dijalankan pada bentuk ringkasan, kerangka, keterkaitan setiap kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex”. Hal yang umum diaplikasikan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif ialah melalui teknik yang berbentuk naratif.

**3.6. Lokasi Penelitian**

Lokus penelitian ini adalah pada Partai Nasdem, Nasdem Tower, Jl. R.P. Soeroso No. 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350.

**3.7. Waktu Penelitian**

Waktu dan pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dari Bulan Oktober 2024- Agustus 2025;

**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Nama kegiatan	Waktu Penelitian					
		Okt- Des 24	Jan- Feb25	Maret- Mei 25	Juni – Agust. 25	Sept.- Nov. 25	Des. 25
1	Pengajuan judul						
2	Pengerjaan proposal						
3	Seminar proposal						
4	Revisi proposal						
5	Pengumpulan data, analisis dan pengolahan data						
6	Bimbingan						



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Institusional Partai Nasdem**

Partai Nasdem didirikan pada tahun 2011 sebagai transformasi politik dari organisasi kemasyarakatan Nasdem. Partai ini hadir membawa semangat Gerakan Perubahan melalui konsep Restorasi Indonesia yang bertujuan untuk melakukan perombakan fundamental di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi utamanya adalah mewujudkan "Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya" (Partai Nasdem, 2024).

Pendirian partai ini menegaskan posisinya dalam spektrum politik Indonesia sebagai partai yang berlandaskan nasionalis-religius, dengan penekanan kuat pada nilai-nilai meritokrasi, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum (Partai Nasdem, 2024). Kehadiran Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2014 menjadi bukti kemampuan awal partai dalam menerjemahkan narasi "restorasi" menjadi dukungan elektoral yang signifikan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lahir dengan semangat Restorasi Indonesia, yaitu gerakan perubahan menuju kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat, adil, dan berdaulat. Visi Partai Nasdem adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya. Visi ini mencerminkan cita-cita partai untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan kokoh dalam jati diri kebudayaannya. Kemandirian ekonomi menjadi kunci agar bangsa tidak bergantung pada kekuatan luar, sedangkan kemartabatan budaya menjadi penegasan bahwa pembangunan harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam menjalankan visinya, Partai Nasdem memiliki misi untuk membangun sistem politik yang demokratis, bersih, dan berkeadilan. Partai ini berkomitmen memperkuat demokrasi substantif melalui peningkatan

partisipasi rakyat, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi yang transparan. Selain itu, Nasdem juga berupaya mewujudkan demokrasi ekonomi dengan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan nasional. Prinsip keadilan ekonomi dan pemerataan menjadi landasan utama agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan. Di sisi sosial budaya, Nasdem bertekad menanamkan kembali semangat gotong royong sebagai karakter bangsa Indonesia yang sejati, karena nilai inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan solidaritas sosial.

Adapun tujuan utama Partai Nasdem adalah membangun gerakan perubahan yang terorganisir dan berkelanjutan demi terwujudnya Restorasi Indonesia. Tujuan ini diwujudkan melalui penguatan kelembagaan partai, kaderisasi yang berorientasi pada kepemimpinan moral dan profesional, serta pembentukan partai yang tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen perjuangan rakyat. Dengan prinsip tanpa mahar politik, Nasdem ingin menegaskan dirinya sebagai partai yang berkomitmen pada politik bersih, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui visi, misi, dan tujuan tersebut, Partai Nasdem meneguhkan posisinya sebagai kekuatan politik yang membawa gagasan perubahan demi terciptanya Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaulat.

Struktur kepemimpinan Partai Nasdem periode terbaru dipimpin oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum. Susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2024-2029 merupakan hasil konsolidasi internal yang menunjukkan fokus pada peningkatan kapabilitas organisasi dan kemenangan pemilu. Beberapa posisi kunci dalam struktur DPP yang relevan dengan strategi politik partai meliputi:

Tabel 4.1.  
**Struktur Pengurus Partai Nasdem 2024-2029**

Jabatan	Nama Pengurus (2024-2029)
Ketua Umum	Surya Paloh
Wakil Ketua Umum	Saan Mustopa
Sekretaris Jenderal	Hermawi F. Taslim
Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi	Willy Aditya

Jabatan	Nama Pengurus (2024-2029)
Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu	Prananda Surya Paloh
Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan	Ivanhoe Semen
Ketua Bidang Perempuan dan Anak	Amelia Anggraini

Sumber: Partai Nasdem, 2025

Struktur ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) DPP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta tercatat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengurus yang sah (KPU RI, 2024). Keberadaan bidang-bidang spesifik, seperti Bidang Hubungan Sayap dan Badan, menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara DPP dengan organisasi-organisasi sayap, termasuk Garnita Malahayati, sebagai pilar penggerak elektoral partai ([www.nasdem.id](http://www.nasdem.id) diakses 19 November 2025).

Program dan strategi utama yang diterapkan oleh Partai NasDem menjelang Pemilu Legislatif 2024: *Pertama*, Konsolidasi internal partai dan penguatan struktur dari pusat hingga akar rumput; Partai Nasdem melakukan penguatan struktur organisasinya mulai dari tingkat DPP, DPW, DPD hingga DPC atau DPAC. Hal ini dilakukan agar partai memiliki mesin politik yang siap bergerak di seluruh wilayah pemilihan. Sebagai contoh, di Sumatera Barat, partai ini secara eksplisit disebutkan melakukan konsolidasi internal, pemetaan wilayah, dan pembekalan caleg.

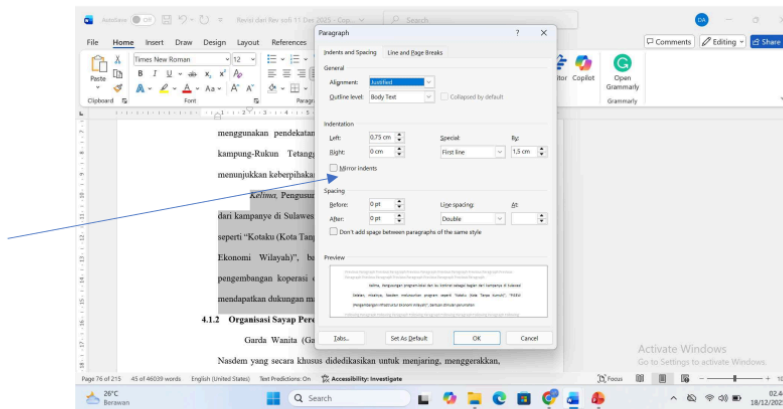
*Kedua*, Pemetaan wilayah dan Daerah Pemilihan (Dapil); Strategi partai mencakup pemetaan Dapil-strategis, analisis basis suara, serta identifikasi wilayah yang perlu diperkuat ataupun direbut. Di Sumbar misalnya, penelitian menunjukkan bahwa pemetaan wilayah menjadi bagian penting dari strategi kemenangan.

*Ketiga*, Pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen calon legislatif (caleg); Nasdem menitikberatkan pada pembentukan kader yang siap, pendidikan politik kepada pengurus internal dan masyarakat, serta proses rekrutmen caleg yang memperhatikan kapasitas dan konektivitas sosial. Contohnya, di Kabupaten Banyumas strategi mereka mencakup sekolah kader,

Akademi Bela Negara, dan program pendidikan politik (partainasdem.id di akses 20 Oktober 2025). Selain itu, di Provinsi Aceh ditemukan strategi rekrutmen terbuka, penerapan branding “tanpa mahar” serta orientasi pemenangan berbasis struktur.

*Keempat*, Strategi pemasaran politik dan kampanye ke generasi muda atau milenial; Partai juga mengembangkan strategi pemasaran politik yang menargetkan generasi muda dan pemilih milenial melalui pemanfaatan media sosial, kanal digital, dan aktivitas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebagai contoh, di Kota Jogja strategi pemasaran politik menggunakan pendekatan *marketing mix* (4P) yang mencakup aktivitas kampung-Rukun Tetangga, posyandu, forum “bank sampah” untuk menunjukkan keberpihakan partai ke isu lokal.

*Kelima*, Pengusungan program-lokal dan isu konkret sebagai bagian dari kampanye di Sulawesi Selatan, misalnya, Nasdem meluncurkan program seperti “Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)”, “PISEW (Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah)”, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), pengembangan koperasi dan pertanian sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat lokal.



#### 4.1.2. Organisasi Sayap Perempuan Partai Nasdem

Garda Wanita (Garnita) Malahayati adalah organisasi sayap Partai Nasdem yang secara khusus didedikasikan untuk menjaring, menggerakkan, dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Keberadaan Garnita merupakan manifestasi konkret komitmen Partai Nasdem dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam kehidupan politik

Garnita Malahayati, sebagai organisasi sayap perempuan Partai Nasdem, hadir dengan visi mewujudkan keterwakilan perempuan secara proporsional dalam kehidupan politik dan sosial guna menciptakan kesetaraan serta keadilan gender di Indonesia. Visi ini juga berorientasi pada penguatan peran perempuan sebagai aktor perubahan yang berdaya, mandiri, dan bermartabat dalam mendukung cita-cita Restorasi Indonesia. Dengan semangat *perempuan maju dan gemilang*, Garnita Malahayati menempatkan perempuan bukan hanya sebagai pelengkap dalam pembangunan bangsa, tetapi sebagai motor penggerak utama dalam membangun karakter bangsa dan memperjuangkan keadilan sosial di berbagai bidang kehidupan ([www.nasdem.id](http://www.nasdem.id) diakses 19 November 2025).

Untuk mencapai visi tersebut, Garnita Malahayati mengemban sejumlah misi strategis. Pertama, menyosialisasikan nilai-nilai Restorasi Indonesia di kalangan perempuan untuk memperkuat daya saing bangsa di era globalisasi. Kedua, membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, memperkuat kapasitas dan peran perempuan agar mampu menjadi pemimpin yang kompeten, memiliki integritas, serta mampu bersaing secara profesional di ruang publik. Selain itu, Garnita juga berkomitmen untuk mencetak kader perempuan yang tidak hanya aktif dalam kegiatan partai, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam proses legislasi dan kebijakan publik.

Adapun tujuan utama Garnita Malahayati adalah memperkuat posisi dan representasi perempuan dalam struktur Partai Nasdem serta lembaga-lembaga publik, baik legislatif maupun eksekutif. Garnita berupaya mendorong keterwakilan perempuan hingga mencapai dan melampaui kuota 30 persen, sebagai wujud nyata perjuangan politik yang inklusif dan berkeadilan. Di samping itu, organisasi ini juga fokus pada pemberdayaan perempuan melalui

pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, serta advokasi terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, Garnita Malahayati berperan penting dalam membangun generasi perempuan Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkomitmen pada nilai-nilai perubahan sebagaimana diusung oleh Partai Nasdem.

Peran strategis dan fokus perjuangan Garnita Malahayati mengambil nama dari sosok Laksamana Malahayati, simbol kepemimpinan dan keberanian perempuan Aceh, yang mencerminkan semangat juang dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan. Organisasi ini memiliki peran strategis ganda (DPW Nasdem Jateng, 2023); *Pertama*, Agen Kaderisasi Politik yaitu Garnita berfungsi sebagai "sekolah" politik bagi perempuan, melatih dan mencetak kader-kader wanita yang memiliki kompetensi untuk bersaing dalam kontestasi politik dan menduduki jabatan publik, baik di legislatif maupun eksekutif. *Kedua*, Mesin Penggalangan Massa yaitu melalui berbagai kegiatan sosial, pelatihan kewirausahaan, dan program yang berfokus pada isu perempuan dan anak, Garnita membangun basis massa yang loyal, yang pada akhirnya akan diterjemahkan menjadi dukungan elektoral bagi Partai Nasdem.

Fokus Garnita tidak hanya pada politik praktis, tetapi juga pada peningkatan posisi perempuan di bidang ekonomi, budaya, dan sosial, yang secara holistik mendukung program restorasi Indonesia (Partai Nasdem, 2021). Secara kelembagaan, Garnita Malahayati berada di bawah koordinasi langsung DPP Partai Nasdem. Kepemimpinan tertinggi organisasi sayap ini berada di tangan Ketua Umum DPP Garnita Malahayati Indira Chunda Thita Syahrul Limpo dan sekarang oleh Andina Thresia Narang, M.Kom.

Meskipun detail lengkap susunan pengurus harian (Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang) di tingkat DPP Garnita tidak selalu dipublikasikan secara eksplisit di kanal umum, keberadaan Ketua Umum yang aktif memimpin konsolidasi di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menjadi indikator utama efektivitas pergerakan organisasi sayap ini dalam menjalankan mandat partai (Nasdem DIY, 2023). Kekuatan Garnita terletak pada struktur yang merata hingga ke

tingkat wilayah, yang secara langsung mendukung kerja-kerja politik Ketua Bidang Perempuan dan Anak di DPP Partai Nasdem.

#### **4.1.3. Perolehan Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Tahun 2024**

Partai Nasdem merancang langkah strategis jauh hari sebelum Pemilu Legislatif 2025, dengan memperkuat konsolidasi internal melalui rangkaian kegiatan pelatihan kader dan rapat kerja. Sebagai contoh, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar tanggal 8 sampai dengan 10 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Partai Nasdem menyiapkan diri menghadapi tantangan politik nasional dengan menghadirkan ribuan kader dari seluruh Indonesia (PartaiNadem.id diakses 15 Oktober 2025).

Konsolidasi tersebut turut diwujudkan di tingkat daerah melalui agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan “Sekolah Kader”. Misalnya, di Kabupaten Bogor pada 21 Agustus 2025, seluruh pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor dinyatakan siap menghadiri Rakerwil dan sekolah kader di Lembang sebagai langkah untuk memperkuat struktur partai dan membangun program yang menyentuh masyarakat sebelum pemilu (nasdem.id diakses 15 Oktober 2025).

Di sisi ideologi dan kapasitas sumber daya manusia, Partai Nasdem juga melakukan internalisasi nilai dan wawasan politik partai. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Laboratorium Gerakan “LAGA Perubahan” angkatan ke-9 yang dilaksanakan di Jakarta Selatan pada 26 September 2025, Wakil Ketua Umum Saan Mustopa menyebut bahwa pendidikan politik ini dimaksudkan agar ideologi partai menjadi landasan perjuangan seluruh kader dan struktur partai menjelang pemilu (nasdem.id diakses 15 Oktober 2025).

Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2024, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil menempati posisi kelima secara nasional dengan raihan 14.660.516 suara sah, atau sekitar 9,6 persen dari total suara sah nasional (kpu.go.id diakses 24 November 2025).. Capaian ini menunjukkan peningkatan konsistensi Partai Nasdem dalam mempertahankan basis dukungan elektoral di berbagai daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur dan sebagian Jawa. Hasil ini sekaligus menegaskan posisi Nasdem sebagai salah satu kekuatan politik menengah yang memiliki pengaruh signifikan dalam percaturan politik

nasional, setelah melalui berbagai dinamika politik dan konsolidasi internal menjelang pemilu (kpu.go.id. diakses 20 September 2025).

Secara kelembagaan, Partai Nasdem berhasil memperoleh 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029, menempatkannya di jajaran lima besar partai dengan perolehan kursi terbanyak. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi partai dalam membangun jaringan kaderisasi, memperkuat struktur organisasi di tingkat daerah, serta mengusung figur-figur publik yang memiliki daya tarik elektoral tinggi. Dengan perolehan tersebut, Nasdem diharapkan dapat memainkan peran penting dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan, serta mendorong agenda politik perubahan yang menjadi identitas utama partai (kpu.go.id. diakses 20 September 2025).

Strategi tersebut mencerminkan bahwa Partai Nasdem tidak hanya fokus pada pendaftaran bakal calon legislatif atau kampanye, tetapi juga pada penguatan internal dan penyusunan peta jalan politik jangka menengah hingga 2029. Kegiatan-kegiatan seperti Bimtek dan Rakernas selain memperkuat kapasitas kader, juga berfungsi sebagai forum merumuskan langkah-langkah politik dan memperkuat sinergi antara struktur partai, legislatif, dan eksekutif.

Dengan demikian, perolehan posisi partai di Pemilu Legislatif 2024 dipersiapkan melalui kombinasi konsolidasi struktural dan penguatan ideologi serta kapasitas kader. Partai Nasdem menempatkan proses internal sebagai fondasi untuk memenangkan pemilu dan memperkuat kehadiran politiknya di parlemen maupun daerah, sekaligus sebagai pijakan untuk agenda politik berikutnya hingga 2029.

#### **4.2. Analisa Peningkatan Kader Perempuan Nasdem pada Pemilu Legislatif 2024: Pendekatan Kelembagaan.**

##### **4.2.1 Penempatan Kader Perempuan dalam Struktur Partai**

Peningkatan keterwakilan perempuan Partai NasDem pada Pemilu Legislatif 2024 tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari desain kelembagaan yang sistematis dan bersifat *gender-responsive institution*. Dalam perspektif teori kelembagaan (institutionalism), partai politik berperan sebagai arena yang menyediakan aturan, mekanisme, dan kultur yang mempengaruhi bagaimana aktor perempuan memperoleh akses,

sumber daya, dan peluang politik. Oleh karena itu, penempatan kader perempuan dalam struktur Partai NasDem menjadi bagian penting dari proses penguatan representasi perempuan, baik secara deskriptif maupun substantif.

Partai NasDem telah melakukan revitalisasi kelembagaan untuk memperkuat representasi substantif perempuan melalui tiga strategi utama: (1) penguatan sistem kaderisasi dan pendidikan politik berbasis afirmasi gender, (2) optimalisasi strategi kelembagaan politik dan media digital, dan (3) penguatan fungsi organisasi sayap partai perempuan, yakni Garnita Malahayati, sebagai institusi strategis.

Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan secara deskriptif (kuantitatif), tetapi juga mendorong perempuan berperan sebagai aktor substantif yang mampu membawa agenda kebijakan berbasis kebutuhan perempuan. Hal ini sejalan dengan konsep *substantive representation* Jane Mansbridge dan Pitkin, yang menekankan bahwa representasi politik perempuan tidak cukup diukur dari jumlah, tetapi dari kualitas gagasan yang diperjuangkan.

Sebagaimana Andina Tresia Narang sebagai Ketua Garnita Malahayati menerangkan;

“Tentunya menggunakan Strategi inklusif berbasis kesetaraan gender, serta penguatan peran Garnita Malahayati, kampanye berbasis isu perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi), serta keterlibatan tokoh perempuan di ruang publik.”

Diperkuat oleh Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Nining Indra Saleh, menerangkan:

“Strategi yang diterapkan berorientasi pada pendekatan inklusif yang menjunjung kesetaraan gender, memperkuat peran Garnita Malahayati, mengukung kampanye yang berfokus pada isu-isu perempuan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta mendorong keterlibatan aktif tokoh perempuan di ruang publik.”

Partai NasDem membangun sistem kaderisasi yang dirancang khusus untuk perempuan melalui program pelatihan, sekolah politik, pendampingan, dan ruang aman berpolitik. Menurut narasumber, kaderisasi perempuan tidak semata-mata dilakukan melalui pelatihan formal, tetapi melalui sistem

mentoring dan coaching untuk menguatkan kapasitas personal, elektoral, dan ideologis.

Garnita Malahayati dan Akademi Perempuan NasDem menjadi wadah strategis bagi kader perempuan untuk mengembangkan pemahaman politik, strategi kampanye, dan kemampuan komunikasi publik. Tidak hanya itu, Akademi Bela Negara juga turut mengambil peran dalam memberikan pendidikan ideologis dan pematangan wawasan kebangsaan bagi kader perempuan.

Program ini memampukan perempuan memasuki panggung politik bukan sebagai simbol pemenuhan kuota, tetapi sebagai agen perubahan yang memiliki kecakapan politik dan advokasi.

: Menurut Ketua Garnita, strategi kaderisasi dan pendampingan merupakan pembeda utama pendekatan NasDem terhadap perempuan, karena memberikan perlindungan, pelatihan, dan ruang aman untuk memperkuat kapasitas mereka.

Eva Sundari sebagai Ketua Bidang Migran DPP Nasdem juga menerangkan, bahwa:

“Rekrutmen perempuan menekankan pelatihan, pendampingan, dan ruang aman berpolitik. Sehingga nantinya para caleg perempuan mampu meningkatkan kapasitas elektoral dan basis konstituen mereka tidak hanya pada satu segmen saja tetapi semua segmen masyarakat.”

Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua Umum juga menerangkan, bahwa:

“Peran Garnita Malahayati sangat strategis dalam beberapa aspek: 1). Kaderisasi & Pendidikan Politik: Menyelenggarakan sekolah politik, pelatihan kepemimpinan, dan bimbingan teknis agar kader perempuan siap bersaing dalam pemilu. 2). Mobilisasi & Konsolidasi: Menggerakkan jaringan perempuan di berbagai daerah untuk memperluas basis dukungan caleg perempuan. 3). Advokasi Isu Perempuan: Mendorong isu pendidikan, kesehatan ibu-anak, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi sebagai agenda kampanye caleg perempuan. 4). Dukungan Moral & Logistik: Menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan moral, media, hingga logistik kampanye bagi caleg perempuan potensial. 5). Penguatan Representasi: Menjamin agar caleg perempuan tidak hanya menjadi pelengkap syarat kuota, tetapi juga tampil sebagai pemimpin dengan agenda nyata untuk rakyat. Dengan peran ini, Garnita Malahayati berkontribusi besar pada upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI, sehingga suara perempuan dapat lebih diperjuangkan dalam kebijakan nasional.”

Proses rekrutmen perempuan difokuskan pada penyediaan pelatihan, pendampingan, serta penciptaan ruang aman dalam berpolitik. Dengan demikian, calon legislatif perempuan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas elektoral serta memperluas basis konstituennya, tidak terbatas pada satu segmen, melainkan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Rekrutmen perempuan diarahkan pada penguatan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembentukan ruang aman untuk berpolitik. Langkah ini bertujuan agar caleg perempuan mampu mengembangkan kapasitas elektoral dan memperluas jangkauan konstituennya ke berbagai segmen masyarakat.

Sejak saat berdirinya, Partai NasDem dengan kokoh mengusung ideologi nasionalisme dan demokrasi dengan Pancasila sebagai azasnya. Melalui nasionalisme, Partai NasDem berupaya untuk menempatkan setinggi-tingginya kepentingan bangsa, negara, dan rakyat dalam setiap kebijakan, keputusan, serta arah strategis partai. ~~Sedangkan~~ di sisi lain, demokrasi menguatkan cita-cita nasionalisme tersebut dengan menjunjung tinggi supremasi sipil, kedaulatan rakyat, kesetaraan hukum, dan pada akhirnya mencapai keadilan sosial. Dua ideologi tersebut bertemu pada satu titik kulminasi, seperti apa yang dikatakan Heywood, bahwa dimungkinkan antar ideologi yang berdiri tunggal saling beririsan yang mampu membentuk suatu sintesis paradigma baru yang lebih solid dan paripurna dalam melihat realita sosial. Atas dasar hal tersebut, Partai NasDem berkomitmen untuk menguatkan ideologinya pada nasionalisme dan demokrasi sebagai pilar gagasan-aksi dengan Pancasila sebagai fondasi atas berdirinya pilar tersebut.”

Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Saan Mustopa juga menegaskan bahwa:

“Nasionalisme versi Partai Nasdem artinya siap untuk mendukung seluruh keterlibatan anak bangsa tanpa adanya diskriminasi ras, agama, suku, termasuk di dalamnya gender. Partai Nasdem memiliki keyakinan bahwa politik kebangsaan yang inklusif pada akhirnya menuntut dan menguatkan peran aktif perempuan agar terlibat dalam ruang serta kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan serta dinamika kuasa. Berkaitan dengan hal tersebut, demokrasi dalam konteks ideologi yang dianut Partai Nasdem juga bukan sekadar demokrasi yang bermuatan prosedural, tapi juga substantif, yaitu upaya nyata dalam memperjuangkan kesetaraan,

keadilan, dan representasi yang seimbang-proporsional. Prinsip demokrasi yang seperti itu, Kami meyakini bahwa pada akhirnya akan mendorong partai bukan hanya memastikan keterwakilan perempuan secara kuota afirmatif 30% misalnya, tapi secara yakin memberi ruang kaderisasi dan nominasi yang berbasis pada merit.”

Dari perspektif struktur kelembagaan, NasDem memberikan ruang signifikan kepada kader perempuan untuk menduduki jabatan strategis. Data wawancara menunjukkan adanya lebih dari dua puluh lima kader perempuan di posisi DPP, Dewan Pakar, Majelis Tinggi, dan Dewan Pertimbangan. Selain itu, beberapa kader perempuan NasDem menempati jabatan publik penting seperti <sup>55</sup> Wakil Ketua MPR RI (Lestari Moerdijat), <sup>29</sup> Ketua Komisi IX DPR RI (Felly Estelita Runtuwene), hingga jabatan <sup>86</sup> Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar). Penempatan <sup>86</sup> ini menunjukkan bahwa kader perempuan tidak hanya ditempatkan pada posisi administratif, tetapi juga pada posisi strategis pengambilan kebijakan, yang memperkuat *political empowerment* perempuan di ruang kekuasaan.

Secara kelembagaan, NasDem juga mengembangkan sistem kaderisasi melalui Akademi Bela Negara (ABN) dan Akademi Perempuan NasDem. Keduanya menjadi instrumen pendidikan politik, penguatan ideologi, pelatihan kepemimpinan, dan pembentukan kapasitas elektoral kader perempuan. Melalui program ini, kader perempuan disiapkan untuk tidak hanya memenuhi kuota, tetapi siap mengemban tanggung jawab sebagai legislator yang substantif, responsif, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap kebijakan publik. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara struktur, ideologi, dan kaderisasi yang memungkinkan kader perempuan berkembang secara berkelanjutan.

Di sisi lain, organisasi sayap perempuan Garnita Malahayati memiliki peran krusial dalam memperkuat pengaruh perempuan dalam partai. Garnita tidak hanya menjadi wadah kaderisasi, tetapi juga ruang advokasi isu perempuan, mobilisasi suara, dan dukungan logistik saat kampanye. Selain itu, Garnita menjadi *initial scout* dalam mengidentifikasi figur perempuan potensial dari berbagai latar belakang, baik profesional,

aktivis, akademisi, maupun tokoh masyarakat. Dengan jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa, Garnita memastikan kader perempuan tidak hanya aktif di pusat, tetapi juga memiliki basis sosial dan dukungan politik di akar rumput.

Selain aspek kelembagaan internal, sistem pemilu proporsional terbuka juga menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. Sistem ini memerlukan biaya politik tinggi dan jaringan sosial yang kuat, yang sering kali menjadi hambatan bagi perempuan. Namun, NasDem mengatasi hambatan tersebut melalui kebijakan *politik tanpa mahar*, pelatihan kampanye digital, strategi narasi kesetaraan, dan dukungan logistik dari partai. Dengan cara ini, kader perempuan mendapatkan akses terhadap sumber daya kampanye, yang memungkinkan mereka bersaing lebih setara dengan kandidat laki-laki.

Sebagai upaya memperkuat representasi perempuan, yaitu dengan didorongnya kader perempuan untuk menduduki jabatan penting struktur Partai NasDem. Dalam struktur kepengurusan secara de jure dan de facto terdapat sekitar 25 kader perempuan yang menjabat struktur di Partai NasDem, baik dari fungsionaris, dewan pertimbangan, dewan pakar, serta majelis tinggi partai. Sedangkan di Parlemen sendiri, Partai NasDem memiliki 19 anggota DPR RI perempuan yang secara aktif bersuara, memperjuangkan segala kepentingan perempuan yang seringkali belum didengar secara holistik. Partai NasDem juga berkomitmen untuk menempatkan peran perempuan dalam posisi kepemimpinan politik dan institusi, misalnya <sup>69</sup> Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi NasDem adalah Ibu Lestari Moerdijat yang secara aktif terlibat dalam isu-isu perempuan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fraksi Nasdem juga mendapatkan posisi Ketua Komisi IX yang diisi oleh kader perempuan juga, Ibu Felly Estelita Runtuwene yang diamanatkan tugas untuk mengawal dan mengawasi terkait dengan isu kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Periode pemerintahan kemarin juga Partai NasDem mendapatkan kepercayaan untuk mengisi pos jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada saat yang bersamaan Partai NasDem juga kembali menempatkan kekuatan perempuan sebagai pengambil kebijakan,

pada saat itu Ibu Siti Nurbaya Bakar. Hal ini pada intinya menjadi catatan dan komitmen kuat Partai NasDem dalam menempatkan perempuan pada ruang pengambilan keputusan dan aras kekuasaan. Ini juga selaras dengan banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kepemimpinan perempuan ternyata cenderung lebih efektif dalam menyelesaikan krisis dibandingkan laki-laki.

Kader perempuan dalam struktur NasDem berperan strategis dalam rekrutmen caleg perempuan 2024. Bukan sebatas pelaksanaan teknis, tetapi secara substantif menjembatani nilai ideologis Partai NasDem dengan praktik politik representasi yang setara. Hanna Pitkin pernah mengatakan bahwa dalam konteks representasi yang sifatnya substantif berarti perempuan memperjuangkan kepentingan perempuan melalui kebijakan.

Lewat gagasan tersebut, Partai Nasdem mendorong kader perempuan di struktur partai untuk memastikan proses rekrutmen caleg menghasilkan representasi substantif. Ini semua dilakukan lewat berbagai metode, misalnya Nasdem menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka lewat Nasdem Memanggil yang basisnya adalah keterbukaan, kesetaraan, dan meritokrasi. Kader perempuan khususnya tingkat struktur itu menjadi *initial scout* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan figur perempuan potensial. Selain itu, secara kelembagaan, Partai Nasdem berkomitmen terhadap kesetaraan utamanya terhadap perempuan lewat dibentuknya <sup>108</sup> Garnita Malahayati, sayap pemberdayaan perempuan di Partai Nasdem. Melalui Garnita Malahayati para kader perempuan ini diajak untuk memahami ideologi partai, strategi kelembagaan, dan kepemimpinan politik. Hasilnya, persentase caleg perempuan Partai NasDem pada Pemilu 2024 termasuk salah satu yang tertinggi di antara partai besar, menunjukkan sistem rekrutmen yang proaktif dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, penempatan kader perempuan dalam struktur partai dan strategi kelembagaan NasDem menunjukkan adanya kesinambungan antara *political will*, *institutional design*, dan *substantive empowerment*. Penempatan perempuan di struktur partai tidak hanya memperkuat representasi deskriptif, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju representasi substantif dan transformasi kekuasaan yang lebih

inklusif. Dengan demikian, peningkatan kader perempuan Partai NasDem pada Pemilu 2024 merupakan hasil dari konsolidasi politik berbasis institusi, ideologi, dan strategi afirmasi yang terencana.

#### **4.2.2 Ideologi Partai Politik**

Ideologi partai memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter kelembagaan NasDem. Sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Ketua DPP Partai NasDem, partai mengusung ideologi nasionalisme dan demokrasi yang berorientasi pada kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan. Nasionalisme dipahami sebagai komitmen terhadap keterlibatan seluruh warga negara, tanpa diskriminasi termasuk gender, sementara demokrasi substantif menuntut adanya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, bagi NasDem, perempuan bukan sekadar pelengkap kuota, tetapi aktor politik yang memiliki hak, kapasitas, dan peran dalam memperjuangkan kepentingan publik. Dalam pandangan Hanna Pitkin, hal ini merepresentasikan pergeseran dari *representasi deskriptif* (sekadar kehadiran perempuan) menuju *representasi substantif*, di mana perempuan memperjuangkan isu dan kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Partai NasDem melakukan pembekalan ideologi terhadap calon anggota DPR RI dengan tahapan sebagai berikut; *Pertama*, perlu dipahami bersama bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pembekalan ideologi di Partai NasDem itu memang umumnya dilakukan secara terpadu, baik lewat pendidikan formal, penugasan politik, dan pendalaman karakter ideologis dengan nilai perjuangan restorasi yang dicanangkan oleh Ketua Umum Partai NasDem Bapak Surya Paloh, yaitu memperbaiki sistem, memperkuat demokrasi, dan mengembalikan politik pada cita-cita kebangsaan yang sebenarnya. *Kedua*, Partai NasDem memiliki metode kaderisasi yang sifatnya formal, berjenjang, serta berkelanjutan, yaitu Akademi Bela Negara (ABN) yang menjadi pusat pendidikan politik utama partai. Di ABN, seluruh kader ditempa dan diberikan pemahaman yang mendalam utamanya terkait Ideologi Partai NasDem, kepemimpinan politik yang pro-rakyat, serta isu-isu prioritas yang berkaitan dengan masyarakat secara

langsung. <sup>59</sup> *Ketiga*, selain itu juga ada beberapa hal yang sifatnya pendalaman karakter lewat pembinaan. Ini penting karena ideologi tidak hanya ditanamkan lewat kurikulum yang sifatnya formal, tetapi juga melalui keteladanan kader senior dan pimpinan partai. Dalam banyak kesempatan, Bapak Surya Paloh menekankan bahwa kader NasDem harus menjadi nasionalis yang berlandaskan pada integritas, bukan sekadar politisi yang menang berkompetisi.

Dalam pemanfaatan media, Partai Nasdem dan Garnita Malahayati mengadopsi pendekatan kombinasi. <sup>41</sup> Media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, dinilai sangat efektif untuk menasar pemilih muda, sementara kampanye tatap muka tetap penting di daerah. Kombinasi keduanya menjadi strategi terbaik untuk mendapatkan simpati masyarakat saat kampanye.

Caleg perempuan secara khusus didorong untuk menggunakan platform digital dengan konten narasi yang berfokus pada perspektif kesetaraan. Konsistensi pesan kampanye caleg perempuan berfokus pada isu-isu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, survei elektoral digunakan untuk memetakan isu prioritas perempuan, seperti pendidikan anak, kesehatan, perlindungan sosial, dan UMKM perempuan, yang mempermudah segmentasi isu.

Penelitian menemukan bahwa Partai NasDem memberikan dukungan logistik dan fasilitas kampanye berbasis afirmasi gender. Fasilitas tersebut meliputi akses dana kampanye, materi publikasi, pelatihan komunikasi, promosi melalui jaringan relawan, dan media partai. Dukungan ini dijalankan melalui mekanisme struktural, bukan hanya berdasarkan kedekatan personal.

Model ini memperkuat peran kelembagaan partai dalam menciptakan *equal playing field* bagi caleg perempuan, sehingga perempuan tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi benar-benar memiliki daya saing elektoral. Hal ini mencerminkan implementasi representasi substantif yang mengedepankan kualitas dan kecakapan perempuan.

NasDem memanfaatkan media sosial (Instagram, TikTok, Facebook) dan media tatap muka dalam strategi kelembagaan elektoral. Media sosial

efektif menasar pemilih muda, sementara tatap muka dan kampanye door-to-door lebih efektif membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Caleg perempuan didorong menggunakan konten digital berbasis perspektif kesetaraan gender, bukan hanya citra personal. Strategi ini menghasilkan politik ide, bukan sekadar politik figur. Pendekatan ini mencerminkan model strategi substantif, di mana narasi kampanye mengangkat isu pendidikan, kesehatan, ekonomi perempuan, perlindungan sosial, dan anak.

Analisis mengenai Ideologi Partai Politik (NasDem), khususnya dalam hal bagaimana ideologi tersebut diimplementasikan melalui pelatihan politik dan peningkatan moralitas atau etika dalam merekrut dan mencalonkan kader perempuan untuk Pileg 2024; ideologi Partai NasDem yang menekankan restorasi dan inklusivitas diinternalisasi secara sistematis kepada kader perempuan melalui program pelatihan politik yang terstruktur, memastikan bahwa rekrutmen <sup>90</sup> tidak hanya berorientasi pada kuantitas tetapi juga kualitas dan integritas.

Komitmen terhadap ideologi ini diwujudkan melalui kebijakan afirmasi 30% yang dijalankan sebagai komitmen nyata, melampaui sekadar pemenuhan formalitas regulasi. Program utama penguatan ideologi ini adalah Akademi Perempuan NasDem dan Akademi Bela Negara NasDem, yang secara rutin menyelenggarakan pendidikan politik untuk membekali kader dengan wawasan kebangsaan dan keterampilan politik.

Peningkatan moralitas dan etika kader NasDem tercermin dari penekanan partai pada kaderisasi yang kuat, memastikan bahwa popularitas atau politik selebritas tidak menjadi satu-satunya modal, melainkan harus diimbangi dengan kemampuan dan integritas calon legislatif. Partai juga berupaya menciptakan ruang aman berpolitik dan memberikan pendampingan, yang merupakan langkah etis untuk mendorong partisipasi perempuan tanpa hambatan. Ratu Munawaroh dari partai PDI Perjuangan juga berpendapat;

“Beberapa tahun sebelum itu kita memang sudah diberikan dan itu selalu secara bertala kalau beberapa tahun kemudian tidak diadakan itu biasanya karena kesibukan kita menghadapi Pileg, kita menghadapi Pilpres, kemudian kemarin kan ada beberapa kejadian di partai yang membutuhkan perhatian yang sangat serius karena untuk ikut sekolah partai itu juga kan

membutuhkan persiapan atau planning yang juga nggak main-main juga jadi tidak boleh kita asal mengadakan sekolah partai jadi semuanya harus disiapkan secara matang (Ratu Munawaroh, DPR RI PDI Perjuangan, 12 November 2025).”

Secara ideologis, kelembagaan politik NasDem dibangun di atas pendekatan inklusif berbasis kesetaraan gender, di mana caleg perempuan didorong menonjolkan narasi ini dalam konten media sosial mereka. Pesan kampanye yang disampaikan oleh caleg perempuan difokuskan pada isu substantif yang berpihak pada rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, menunjukkan orientasi ideologis yang bertanggung jawab dan etis. Melalui upaya terpadu ini, NasDem memastikan kader perempuan yang dicalonkan tidak hanya sekadar memenuhi kuota, tetapi benar-benar hadir sebagai pemimpin yang membawa agenda substantif yang selaras dengan nilai-nilai restorasi dan kesetaraan partai.

Program kaderisasi perempuan di lingkungan Partai NasDem secara konkret diwujudkan melalui peluncuran Akademi Perempuan NasDem, yang diresmikan oleh Ketua Umum Surya Paloh pada 28 Februari 2025 di NasDem Tower, Jakarta. Berdasarkan pemberitaan Metro TV News (2025) dan unggahan akun resmi Instagram Partai NasDem, program ini bertujuan **memperkuat kapasitas kader perempuan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan**, dan pembekalan komunikasi publik. berikut postingan di Instagram Nasdem;

**Gambar 4.1**  
**Poster Akademi Pendidikan Perempuan Nasdem**



Sumber: Instagram Nasdem, 2025

Fakta ini menunjukkan bahwa NasDem memandang pembangunan kapasitas perempuan sebagai bagian dari strategi jangka panjang partai dalam mewujudkan kesetaraan representasi politik. Dengan demikian, pernyataan informan tentang adanya pendidikan politik internal bagi kader perempuan memiliki dasar empiris yang kuat, sekaligus menggambarkan bentuk penerapan nyata dari prinsip afirmasi partai terhadap kader perempuan.

Dukungan kelembagaan terhadap perempuan juga diwujudkan melalui aktivitas organisasi sayap perempuan, Garnita Malahayati NasDem. Garnita berfungsi sebagai wadah kaderisasi, advokasi sosial, serta motor penggerak kegiatan berbasis komunitas perempuan. Berdasarkan laporan Metro TV News (21 Juli 2025), Garnita merayakan ulang tahun ke-14 dengan meluncurkan program nasional bertajuk Garnita Bergerak, yang berfokus pada kegiatan sosial, kewirausahaan perempuan, dan pemberdayaan masyarakat akar rumput.

Kegiatan ini juga tercatat dalam laman NasDem Jakarta dan Berita Jatim, yang menegaskan konsistensi Garnita dalam menjalankan program strategis di tingkat daerah. Data tersebut mendukung temuan wawancara yang menyebutkan bahwa NasDem <sup>111</sup>memberikan ruang aktual bagi perempuan untuk berperan tidak hanya dalam tataran elektoral, tetapi juga dalam aktivitas sosial-politik berbasis komunitas.

#### 4.2.3 Peran Aktifis Perempuan dalam Partai Politik

Temuan lapangan mengindikasikan bahwa NasDem menerapkan pendekatan kelembagaan yang melibatkan kebijakan afirmasi, struktur kepemimpinan inklusif, penguatan organisasi sayap Garnita Malahayati, dukungan logistik dan media kampanye, pendidikan politik, hingga pemanfaatan kampanye digital berbasis kesetaraan gender. Dampaknya <sup>84</sup>tidak hanya pada keterwakilan jumlah (deskriptif), tetapi juga pada kualitas peran substantif anggota legislatif perempuan. Caleg perempuan juga didorong supaya menggunakan media sosial, sebagaimana Willy Aditya sebagai Wasekjend Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, menerangkan;

Dikatakan Willy:

“Caleg perempuan aktif didorong menggunakan media sosial dengan konten narasi kesetaraan apapun isu yang dibahas mengerecut pada perspektif

kesetaraan, sehingga produksi konten kreatif mampu menyampaikan pesan konsisten terhadap isu semua bidang dengan sudut pandang kesetaraan (Willy Aditya, 2025).

Partai NasDem menerapkan kebijakan afirmasi gender secara lebih maju dibandingkan partai lain. Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua DPP Partai Nasdem menyebut bahwa penerapan kuota 30% perempuan bukan hanya formalitas, tetapi dijalankan sebagai mekanisme nyata untuk membuka akses politik bagi perempuan. Hal ini terbukti dari capaian keterwakilan perempuan NasDem yang mencapai 30,4%.

Melalui kebijakan tersebut, perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap atau pengisi daftar partai, tetapi didorong untuk menjadi calon potensial yang memiliki peluang elektoral kuat. Prinsip ini berdampak pada munculnya kepercayaan diri kader perempuan serta semakin banyaknya perempuan yang berani memasuki arena politik.

Ditegaskan juga oleh Eva Sundari, bahwa;

“Ketua Partai kami adalah salah satu Tokoh yang sangat inklusif, beliau memberikan ruang yang seluas luasnya untuk para kader Perempuan selain tentunya Ada kebijakan afirmasi 30% itu bukan hanya kuota yang harus kita penuhi tetapi memang ruang yang harus dimanfaatkan betul betul oleh partai politik sehingga NasDem hari ini adalah satu-satunya partai politik yang lolos kebijakan tersebut dengan persentase 30,4% selain itu banyak juga program seperti Akademi Perempuan NasDem sebagai wadah Pendidikan politik kader perempuan mempersiapkan para caleg-caleg perempuan yang kompeten (Eva Sundari; 2025).

Pertanyaan di atas, juga didukung oleh ketua Garnita Malahayati sebagai berikut:

“Perempuan di Partai NasDem mendapat dukungan logistik dan media kampanye melalui mekanisme partai yang menekankan kesetaraan dan afirmasi gender. Partai menyediakan bantuan berupa akses dana kampanye, materi publikasi, pelatihan strategi kelembagaan politik, serta promosi melalui media partai dan jaringan relawan. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen NasDem terhadap kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan dan penguatan kapasitas politik mereka.”

Keterwakilan perempuan yang meningkat ini menunjukkan pencapaian *the politics of presence*, yaitu perempuan hadir secara nyata dalam struktur partai dan parlemen, bukan sekadar simbol. Strategi ini sesuai dengan

pandangan Pitkin dalam teori representasi deskriptif (Pitkin, 2023). Salah satu temuan signifikan adalah bahwa NasDem memiliki mekanisme pendidikan politik perempuan yang terstruktur melalui Akademi Perempuan Nasdem dan Akademi Bela Negara. Melalui pelatihan dan sekolah politik ini, calon legislator perempuan dibekali kemampuan dalam manajemen kelembagaan, komunikasi publik, pembuatan narasi politik, strategi elektoral, hingga pembentukan citra diri.

Ketua Perludem Heroik, meningkatnya keterwakilan perempuan NasDem juga membawa dampak pada representasi substantif, yaitu kemampuan perempuan menyuarakan kepentingan publik dalam kebijakan. Valina Sungka Subekti sebagai pengamat politik juga berpendapat bahwa masuknya perempuan di parlemen memungkinkan munculnya kebijakan yang responsif gender, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan Nasdem mulai dikenal vokal dalam isu publik, aktif dalam pembahasan legislasi, dan terlibat dalam pengawasan kebijakan. Dengan demikian, strategi kelembagaan NasDem tidak hanya menghasilkan representasi deskriptif, tetapi mengarah pada representasi substantif.

Keberhasilan Nasdem dalam memberikan ruang bagi perempuan membangun kepercayaan publik terhadap komitmen partai dalam isu kesetaraan. Masyarakat menilai bahwa strategi politik perempuan NasDem tidak berbasis simbolisme, tetapi mencerminkan komitmen ideologi partisipatif dan inklusif. Namun, masyarakat tetap menuntut pembuktian nyata melalui kualitas kerja legislator perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik telah memasuki fase konsolidasi, bukan lagi sekadar penetrasi.

Peningkatan Kader Perempuan NasDem pada Pileg 2024 dengan Rujukan hasil Wawancara Partai NasDem menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan representasi politik perempuan pada Pemilihan Legislatif 2024, di mana peran kader perempuan di dalam struktur organisasi menjadi kunci. Komitmen ini diwujudkan melalui kepemimpinan partai yang inklusif yang mendukung kader perempuan secara luas (Ardana; 2025) . Partai tidak

hanya menjalankan kebijakan afirmasi 30% sebagai formalitas, tetapi sebagai peluang nyata, terbukti dengan tercapainya keterwakilan perempuan sebesar 30,4% di parlemen. Dikuatkan juga oleh Valina dan Ardana sebagai pengamat politik, keduanya berpendapat sebagai berikut:

Valina menjelaskan:

“Melihat hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, memang terdapat peningkatan persentase perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR. Silakan dicek kembali, peningkatannya memang tidak terlalu besar, tetapi tetap ada kenaikan. Namun di sisi lain, jika Anda membaca hasil penelitian dari CSAS, dari sekian banyak perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR, sebagian besar memiliki latar belakang dinasti politik. Jadi, ini bukan sepenuhnya kabar yang menggembirakan. Secara kuantitatif memang meningkat, tetapi sebagian besar berasal dari latar belakang dinasti politik. Silakan Sofi cek kembali hasil penelitian dari CSAS tersebut, beberapa waktu setelah pengumuman KPU mengenai keterpilihan legislatif pada Pemilu 2024.

Terkait Partai NasDem, saya tidak tahu secara pasti jumlah keterpilihan perempuannya saat ini, apakah mengalami peningkatan atau tidak. Jadi, saya belum tahu jumlah pastinya untuk Partai NasDem. Berdasarkan data Pemilu 2024, partai politik dengan keterwakilan perempuan terbanyak di DPR RI adalah Partai NasDem, disusul Partai PDIP, dan kemudian Partai Gerindra (Subekti & Ardana, 2025).”

Menurut Ardana kader perempuan menduduki jabatan strategis di DPP, seperti Ibu Eva Sundari dan Ibu Siar Aggreta Siagian, menunjukkan bahwa mereka terlibat langsung dalam perumusan kebijakan partai. Selain itu, caleg perempuan memperoleh dukungan logistik dan media yang adil dari partai melalui kebijakan kesetaraan internal. Peran sentral dalam penguatan kader perempuan dipegang oleh organisasi sayap partai, yaitu Garnita Malahayati. Garnita berperan strategis dalam kaderisasi, mobilisasi dukungan, advokasi isu perempuan, serta dukungan moral dan logistik bagi caleg perempuan.

Aktivis ini <sup>106</sup> tidak hanya memobilisasi dukungan, tetapi juga aktif dalam advokasi isu-isu substantif dan memberikan dukungan moral serta logistik kepada caleg, yang semuanya disokong oleh kepemimpinan partai yang inklusif. Komitmen ideologis NasDem terhadap kesetaraan diwujudkan melalui kebijakan afirmasi 30% yang dijalankan sebagai komitmen nyata, terbukti dengan pencapaian 30,4% keterwakilan perempuan di legislatif.

Selain kuota, aturan internal partai mencakup pemberian dukungan logistik dan media yang adil serta implementasi program penguatan kapasitas

seperti Akademi Perempuan Nasdem dan Akademi Bela Negara Nasdem. Pendampingan dan penyediaan ruang aman berpolitik juga menjadi bagian dari upaya partai untuk mengatasi hambatan struktural yang dihadapi perempuan. Dalam konteks sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, NasDem merespons dengan strategi yang fokus pada peningkatan kompetensi elektoral individual kader perempuan. Rekrutmen difokuskan pada peningkatan kapasitas elektoral melalui pelatihan agar mereka mampu bersaing.

Strategi kampanye dioptimalkan melalui kombinasi efektif antara media sosial untuk menjangkau pemilih muda, dan kampanye *door-to-door* yang kuat dalam membangun kedekatan personal. Basis kampanye diperkuat dengan pemanfaatan hasil survei untuk memetakan isu-isu prioritas perempuan, memastikan pesan kampanye lebih tepat sasaran dan mampu meraih suara terbanyak. Sinergi antara aktivis, kebijakan afirmasi internal, dan strategi elektoral ini memastikan kader perempuan NasDem bukan sekadar pelengkap, melainkan pemimpin yang kompeten dalam sistem kompetisi terbuka.

28 Meskipun kuota 30% diwajibkan dalam pencalonan, angka keterpilihan perempuan di tingkat nasional (DPR RI) pada Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai target kuota substantif 30%. Peningkatan tipis dari 20,5% menjadi 21,9% menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural parpol telah memenuhi kuota 30% caleg perempuan, tantangan dalam memenangkan kursi secara substansial masih besar. Namun, data ini menggarisbawahi pentingnya strategi partai yang efektif untuk mengubah calon menjadi kursi.

Partai Nasdem menjadi contoh menarik karena berhasil mencatatkan diri sebagai partai dengan Indeks Prestasi Keterwakilan Perempuan (IPK) tertinggi dalam dua pemilu terakhir (2019 dan 2024). Fakta dan data partai Nasdem (pemilu 2024); Indeks Prestasi Keterwakilan (IPK) Perempuan 2024: Partai NasDem mencapai 28,99% (berdasarkan 20 kursi perempuan dari total 69 kursi partai), menjadikannya partai politik dengan IPK tertinggi pada Pemilu 2024 (CSIS, 2024). Persentase Caleg Perempuan Terpilih di DPR RI

2024: NasDem meraih 30,4% kursi caleg perempuan terpilih (21 orang) dibandingkan total kursi partai, angka ini melebihi ambang batas kuota 30% (Heroik Perludem, 2025).

Dari aspek kebijakan struktural, Partai NasDem termasuk salah satu partai yang secara eksplisit menyatakan komitmen terhadap afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30%. Pernyataan resmi partai ini terekam dalam laman Kemenko PMK (2024) serta situs NasDem DPR RI, yang menegaskan bahwa komitmen gender merupakan bagian integral dari strategi politik partai. Selain itu, dukungan terhadap penguatan representasi perempuan yang diperkuat, yang menegaskan keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan (AKD) sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.

Dalam konteks ini, komitmen afirmatif NasDem dapat dipahami sebagai wujud implementasi prinsip justice as fairness dalam sistem representasi politik, di mana partai berupaya memastikan keterlibatan perempuan secara substantif, bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif kuota. <sup>4</sup> Dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.2**  
**Akademi Perempuan Nasdem 2025**



Sumber: Media Sosial Nasdem, 2025

### Tokoh Perempuan NasDem yang Terpilih dan Menempati Jabatan

Strategis:

1. Lestari Moerdijat sebagai Wakil Ketua MPR RI; Disebut sebagai contoh nyata kader perempuan yang diberi posisi strategis dalam struktur partai dan lembaga negara, menunjukkan keberpihakan partai terhadap kualitas dan kapasitas perempuan.
2. Irma Suryani Chaniago sebagai anggota DPR RI dan Tokoh Perempuan Vokal di NasDem. Menjadi representasi kader perempuan yang aktif, vokal, dan memiliki kapasitas substantif dalam advokasi kebijakan publik.
3. <sup>62</sup> Stti Nurbaya Bakar – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kabinet Indonesia Maju) Dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan NasDem yang berhasil menempati jabatan tingkat nasional (menteri), memperkuat representasi substantif perempuan dalam kebijakan lingkungan dan pembangunan.
4. Eva Sundari sebagai Ketua Bidang Migran DPP NasDem (sebelumnya kader PDIP); Ia bergabung ke NasDem karena partai ini dinilai lebih memberikan keleluasaan dan ruang gerak bagi perempuan.
5. <sup>103</sup> Felly Estelita Runtuwene sebagai Ketua Komisi IX DPR RI (Data dari konteks kelembagaan partai, menduduki posisi strategis dalam legislasi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial).
6. Yumna Adiyani atau kader perempuan Garnita Malahayati sebagai representasi kader perempuan akar rumput dan aktivis internal (disebut dalam konteks kader perempuan aktif di Garnita)

Secara praksis, dukungan terhadap perempuan juga ditunjukkan melalui aktivitas kampanye dan kelembagaan politik partai. Acara “Semarak Kartini Garnita Malahayati” yang digelar di NasDem Tower pada April 2024 menjadi salah satu representasi nyata kampanye berbasis narasi kesetaraan gender. Dalam acara tersebut, Surya Paloh menegaskan pentingnya peran perempuan dalam kemajuan bangsa dan menyerukan agar perempuan NasDem menjadi pelopor perubahan sosial. Kegiatan ini diliput secara luas oleh Metro TV News dan kanal media sosial resmi partai. Fakta tersebut menunjukkan bahwa NasDem tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan

internal, tetapi juga berupaya membangun citra publik dan media yang menonjolkan keterlibatan aktif perempuan dalam politik. Hal ini sejalan dengan teori representasi substantif yang menekankan pentingnya tindakan nyata dan artikulasi kepentingan perempuan di ruang publik, bukan sekadar kehadiran formal dalam struktur politik (Pitkin, 1967).

#### 4.2.4 Aturan Partai Politik Terkait Gender

Secara aturan main, Partai NasDem selalu mematuhi dan bahkan melampaui ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU <sup>19</sup> Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan setiap partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun bagi Partai NasDem, kebijakan ini tidak berhenti sebagai kewajiban hukum, melainkan komitmen kuat secara ideologis dalam membangun demokrasi yang setara dan berkeadilan gender. Ini juga berlaku dalam struktur internalnya, bahwa Partai NasDem secara konsisten mengadopsi prinsip 30% keterwakilan perempuan di berbagai level organisasi, mulai dari tingkat DPP hingga DPC.

Dahlerup pernah bicara bahwa kuota gender adalah bentuk *fast track to equality* yang tidak bisa dicapai hanya melalui mekanisme alamiah kompetisi politik yang bias gender. Dalam konteks ini Partai NasDem, melihat bahwa kebijakan kuota ini sejalan dengan visi partai untuk menjadi penggerak perubahan (restorasi) dalam mempercepat pembenahan struktur demokrasi agar lebih adil dan setara. Sebagaimana Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua Umum DPP Nasdem menyampaikan;

Saan Mustopa menyatakan:

“Partai NasDem secara rutin menyelenggarakan pendidikan politik bagi kader perempuan sebagai bagian dari upaya membangun partai yang modern, inklusif, dan berbasis kapasitas. Pendidikan politik ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan tentang sistem politik dan regulasi pemilu, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kepemimpinan, kelembagaan pada membangun persepsi publik, dan kemampuan advokasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, kader perempuan dipersiapkan agar mampu berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik di tingkat partai maupun di lembaga legislatif. Program pendidikan politik tersebut dilaksanakan melalui berbagai jenjang dan platform pelatihan, mulai dari Sekolah Kader NasDem, pelatihan tematik oleh Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik, hingga kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sayap perempuan Garnita Malahayati NasDem. Kegiatan ini umumnya memadukan aspek teori dan praktik, melibatkan akademisi, praktisi politik, serta tokoh-tokoh internal

partai sebagai fasilitator. Dengan model pembelajaran yang berkelanjutan, partai memastikan proses kaderisasi perempuan berjalan sistematis dan menghasilkan politisi yang berkompeten serta beretika. Pendidikan politik bagi kader perempuan juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai ideologis Partai NasDem, seperti semangat Restorasi Indonesia, kesetaraan gender, dan politik tanpa mahar. Melalui kegiatan ini, partai berupaya membentuk generasi politisi perempuan yang memiliki integritas, pemikiran kritis, dan orientasi pelayanan publik. Dengan demikian, pendidikan politik yang dilakukan NasDem bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban organisasi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas representasi politik perempuan di Indonesia.”

Data empiris mengenai strategi, program, dan efektivitas kelembagaan politik Partai Nasdem dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024, yaitu:

“Strategi utama politik kelembagaan berbasis kesetaraan gender; yaitu Partai Nasdem menggunakan strategi kelembagaan politik yang bersifat inklusif dan berbasis kesetaraan gender untuk meningkatkan representasi perempuan (Andina Thresia Narang, 2024). Strategi ini berfokus pada empat pilar utama; 1). Strategi inklusif berbasis kesetaraan gender, 2). Penguatan peran Organisasi Sayap, yaitu Garnita Malahayati, 3). Kampanye yang berfokus pada isu-isu perempuan yang konkret, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, 4). Keterlibatan aktif tokoh-tokoh perempuan di ruang publik.

Ketua Umum Garnita Malahayati menekankan bahwa perbedaan strategi kelembagaan dalam merekrut dan mengampanyekan calon legislatif (caleg) perempuan dibandingkan dengan caleg laki-laki terletak pada pendekatan rekrutmen. Proses rekrutmen perempuan Nasdem menekankan pada pemberian pelatihan, pendampingan, dan penciptaan ruang aman berpolitik. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar caleg perempuan mampu meningkatkan kapasitas elektoral dan memperluas basis konstituen mereka, tidak hanya pada satu segmen, tetapi mencakup semua segmen masyarakat.

Komitmen Partai Nasdem terhadap kesetaraan gender didukung oleh kebijakan dan program khusus. Ketua Partai (Surya Paloh) digambarkan sebagai tokoh yang sangat inklusif dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi kader perempuan. Kebijakan afirmasi 30% dalam tubuh Nasdem tidak hanya dilihat sebagai kuota yang harus dipenuhi, tetapi sebagai ruang yang wajib

dimanfaatkan secara optimal oleh partai politik. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ini terbukti dengan persentase keterwakilan perempuan Nasdem yang lolos melebihi ambang batas, yaitu mencapai 30,4%.

Selain afirmasi kuota, dukungan pengorganisasian diperkuat melalui program; *Pertama*, Akademi Perempuan NasDem: Wadah pendidikan politik yang digagas oleh Garnita Malahayati untuk mempersiapkan caleg perempuan yang kompeten. *Kedua*, "Partai Nasdem Memanggil": Program ini dinilai efektif untuk kaderisasi, membuka ruang seleksi terbuka, dan secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri kader perempuan di daerah. *Ketiga*, Bimbingan Teknis Caleg: Program ini secara rutin membekali caleg perempuan dengan keterampilan komunikasi, strategi kampanye, dan manajemen tim. *Keempat*, Pendidikan Politik: Diselenggarakan secara rutin tidak hanya melalui Sayap Partai seperti Akademi Perempuan, tetapi juga dipelopori oleh Akademi Bela Negara (ABN) NasDem. Dukungan logistik dan media kampanye dari partai diberikan secara proporsional sesuai potensi caleg, dan prinsipnya tidak membedakan antara kader perempuan atau laki-laki (Saan Mustopa, 2025).

Organisasi Sayap Partai Perempuan, Garnita Malahayati, memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung peningkatan keterwakilan kader perempuan di DPR RI dalam Pemilu 2024 (Nining Indra Saleh, 2024). Garnita adalah wadah utama kader perempuan untuk memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak dan ibu.

Peran Garnita Malahayati terbagi dalam lima aspek utama; *Pertama*, Kaderisasi & Pendidikan Politik: Menyelenggarakan sekolah politik, pelatihan kepemimpinan, dan bimbingan teknis agar kader perempuan siap bersaing dalam pemilu. *Kedua*, Mobilisasi & Konsolidasi: Menggerakkan jaringan perempuan di berbagai daerah untuk memperluas basis dukungan caleg perempuan. *Ketiga*, Advokasi Isu Perempuan: Mendorong isu pendidikan, kesehatan ibu-anak, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi sebagai agenda kampanye caleg perempuan. Advokasi ini dinilai sangat efektif karena menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. *Keempat*, Dukungan Moral & Logistik: Menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan moral, media,

hingga logistik kampanye bagi caleg perempuan potensial. *Kelima*, Penguatan Representasi: Menjamin agar caleg perempuan tampil sebagai pemimpin dengan agenda nyata untuk rakyat, bukan hanya sebagai pelengkap syarat kuota.

Basis gerakan Garnita Malahayati sama luasnya dengan Partai Nasdem, menjangkau seluruh provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Oleh karena itu, Garnita aktif membantu pergerakan mobilisasi relawan perempuan, kampanye berbasis komunitas, serta advokasi kebijakan perempuan (Andina Thresia Narang, 2025).

#### **4.2.5 Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak bagi peningkatan kader perempuan Nasdem pada pileg 2024**

Kutipan tidak langsung dari Ketua Garnita menyatakan bahwa semua isu kampanye perempuan diarahkan untuk memiliki perspektif kesetaraan dan keberpihakan terhadap perempuan, sehingga membentuk pesan yang lebih substantif. Dalam pandangan kelembagaan, partai politik merupakan arena pembentukan norma, pelatihan, dan reproduksi kekuasaan. Strategi NasDem menunjukkan bahwa institusi (Garnita, akademi politik, sekolah kader) menjadi *agent of transformation* dalam memperkuat peran politik perempuan. Institusi tersebut berhasil mengubah politik yang sebelumnya maskulin menjadi lebih inklusif dan terbuka bagi kepemimpinan perempuan.

Meskipun struktur media partai dinilai cukup baik, narasumber menekankan perlunya fokus yang lebih tajam pada narasi perempuan (Andina Thresia Narang, 2025). Figur publik yang didukung Nasdem berdampak positif dalam meningkatkan daya tarik, namun hal ini harus diimbangi dengan kaderisasi yang matang agar tidak hanya mengandalkan popularitas semata.

Secara keseluruhan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Nasdem dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dinilai cukup tinggi karena adanya konsistensi afirmasi. Namun, masyarakat tetap menuntut bukti nyata dari kinerja caleg perempuan di parlemen. Aktivis pemilu, pengamat politik, serta anggota legislatif perempuan dari partai lain, diperoleh gambaran bahwa strategi kelembagaan Partai NasDem berperan signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Strategi tersebut

tidak hanya bersifat seremonial atau administratif, tetapi berjalan secara substantif melalui penguatan kapasitas politik kader, dukungan organisasi, mobilisasi perempuan, serta pembentukan citra dan legitimasi perempuan sebagai aktor politik.

Menurut Heroik ketua Perludem berpendapat bahwa pelatihan ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri perempuan serta memperkuat daya tawar politik mereka di hadapan publik dan institusi partai. Dampaknya, perempuan tidak hanya hadir sebagai calon legislatif, tetapi siap tampil dengan modal sosial, politik, dan intelektual yang kuat untuk menjawab kebutuhan pemilih. Program ini menjadi bukti bahwa NasDem membangun kompetensi politik perempuan secara substantif, bukan hanya administratif.

Nasdem memanfaatkan media digital sebagai ruang strategis kampanye politik perempuan. Media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook digunakan untuk membangun narasi kesetaraan gender, memperkenalkan identitas caleg perempuan, serta memberikan edukasi publik tentang pentingnya representasi perempuan. Konten kampanye perempuan diarahkan untuk selalu terkait dengan isu pendidikan, ekonomi keluarga, Usaha Mikro Kecil Menengah, perlindungan perempuan dan anak, serta kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat perempuan. Strategi ini terbukti efektif menarik simpati kalangan perempuan muda dan pemilih rasional. Dengan demikian, kampanye digital tidak hanya menjadi alat promosi, tetapi juga instrumen konstruksi diskursus dan identitas politik perempuan.

Organisasi ini memiliki struktur gerakan yang sejalan dengan partai, menjangkau hingga ke tingkat desa, sehingga efektif dalam mobilisasi relawan perempuan dan pelaksanaan kampanye berbasis komunitas. Peran Garnita diperkuat dengan program pendidikan politik berlapis melalui Akademi Perempuan Nasdem dan Akademi Bela Negara Nasdem yang rutin menyelenggarakan pelatihan untuk membekali kader dengan keterampilan politik yang terbukti efektif meningkatkan kompetensi.

Dalam strategi rekrutmen dan pencalonan, Nasdem menerapkan pendekatan yang responsif gender dan berbeda dari caleg laki-laki. Rekrutmen

difokuskan pada pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan penyediaan ruang aman berpolitik agar caleg perempuan mampu meningkatkan kapasitas elektoralnya. Strategi kelembagaan politiknya menekankan pendekatan inklusif berbasis kesetaraan gender dan menonjolkan isu-isu yang relevan dengan perempuan seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi Partai menggunakan kombinasi media sosial dan tatap muka yang dinilai paling efektif (Ratu Munawaroh, 2025).

Platform digital <sup>41</sup> seperti Instagram dan TikTok digunakan untuk menjangkau pemilih muda, di mana caleg perempuan didorong aktif dengan konten yang menonjolkan narasi kesetaraan gender. Sementara itu, kampanye *door to door* dianggap efektif membangun kedekatan personal dan simpati. Terakhir, partai memanfaatkan hasil survei untuk memetakan isu-isu prioritas perempuan (misalnya pendidikan anak dan UMKM), sehingga strategi kampanye dapat diarahkan lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, NasDem memastikan caleg perempuan tidak sekadar memenuhi kuota, melainkan tampil sebagai pemimpin yang membawa agenda substantif bagi kepentingan publik.

Peningkatan signifikan kader perempuan Partai Nasdem pada Pileg 2024 didukung oleh sinergi antara peran aktivis, aturan internal yang kuat, dan strategi yang disesuaikan dengan sistem pemilu. Di tingkat internal, dukungan nyata datang dari individu dan kelompok seperti Ibu Eva Sundari dan Ibu Willy Aditya, Ibu Nning Indra Saleh, Ibu Andina Tresia Narang dan Anggota Legislatif lain yang terpilih di Partai Nasdem, serta para aktivis perempuan yang dikoordinasi melalui sayap partai Garnita Malahayati.

Angka 30,4% ini menunjukkan bahwa strategi NasDem berhasil secara substansial melampaui rata-rata nasional dan memenuhi target kuota afirmasi bukan hanya di tahap pencalonan, tetapi juga di tahap keterpilihan. Keberhasilan NasDem dalam mengoptimalkan keterwakilan perempuan dapat dikaitkan dengan beberapa strategi terlembagakan dan taktis; *Pertama*, rekrutmen dan Pengkaderan yang Inklusif; Partai NasDem secara konsisten memberikan kesempatan yang sangat luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan mencalonkan diri. Mereka tidak hanya memenuhi syarat 30%

secara administratif, tetapi berupaya merekrut kader perempuan yang memiliki kualitas, kredibilitas, dan potensi dukungan dari masyarakat. *Kedua*, Peningkatan Kapasitas Caleg Perempuan; Partai politik, termasuk NasDem, menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pembekalan bagi calon legislatif perempuan. Pelatihan ini seringkali berfokus pada;

- 1). Kemampuan Berbicara di Depan Umum (*Public Speaking*): Mengatasi hambatan kelembagaan politik perempuan.
- 2). Pemahaman Isu-Isu Gender: Memastikan caleg perempuan memiliki platform kebijakan yang relevan dan berbasis keadilan gender.
- 3). Strategi Kampanye Modern: Pemanfaatan media sosial (Facebook, Instagram, TikTok) dan media luar ruang (baliho) secara efektif, seperti yang terlihat dalam studi kasus caleg NasDem di tingkat lokal.

Strategi kelembagaan caleg perempuan NasDem di lapangan seringkali informatif dan persuasif, fokus pada pengenalan diri, latar belakang, serta program yang relevan dengan komunitas. Beberapa studi kasus lokal menunjukkan caleg perempuan NasDem menggunakan program berbasis komunitas, seperti program kesehatan, sosial, atau layanan administrasi kependudukan sebagai *entry point* untuk memperoleh dukungan publik, khususnya dari kelompok perempuan (ibu-ibu rumah tangga dan pengajian).

Dapat disimpulkan bahwa ;Pertama, pencapaian keterwakilan kuantitatif yang signifikan: nasdem berhasil mencapai tingkat keterwakilan perempuan terpilih (30,4%) di dpr ri yang melampaui syarat minimal 30% dalam daftar caleg, menunjukkan efektivitas strategi. Kedua, pendorong kompetisi Pantar partai keberhasilan nasdem dan beberapa partai lainnya dalam mencapai angka tinggi mendorong partai lain untuk berinvestasi lebih serius dalam rekrutmen dan pemenangan caleg perempuan. Ketiga, legitimasi kebijakan afirmasi Nasdem membuktikan bahwa kebijakan kuota afirmasi dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata keterpilihan, bukan sekadar "pelengkap administrasi".

Pencapaian Partai NasDem dalam meningkatkan representasi perempuan hingga 30,4% merupakan studi kasus keberhasilan Teori Kuota (seperti yang dijelaskan oleh Drude Dahlerup), yang didukung oleh pelembagaan

Institusionalisme Gender. Partai telah melembagakan norma kesetaraan ke dalam struktur internal, dimulai dari dukungan elite yang inklusif hingga penyesuaian prosedural dalam implementasi kebijakan afirmasi.

Hal ini diperkuat oleh Teori Pilihan Rasional Partai (berdasarkan kerangka Anthony Downs dan James S. Coleman). Partai bertindak sebagai aktor rasional yang berinvestasi pada peningkatan kapasitas elektoral kader perempuan, menyadari bahwa kuota harus diikuti dengan kompetensi untuk memenangkan sistem suara terbanyak. Investasi ini diwujudkan melalui program-program seperti Akademi Perempuan Partai Nasdem, yang bertujuan mengubah caleg menjadi kandidat yang kompetitif dan memiliki nilai tawar tinggi.

Lebih lanjut, NasDem menggunakan aktivis perempuan dan Garnita Malahayati sebagai agen mobilisasi yang efisien, mengoptimalkan kampanye door-to-door dan pemanfaatan survei untuk memetakan isu secara strategis. Meskipun demikian, keberhasilan ini dihadapkan pada tantangan berat dalam mencapai Representasi Substantif. Tantangan pertama adalah mengatasi hambatan kultural terkait visibilitas di media dan dilema politik figur. Tantangan kedua, dan yang paling krusial, adalah menjawab ekspektasi publik yang masih menantikan bukti konkret dari kinerja legislatif kader perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi penuh atas kebijakan afirmasi NasDem akan diuji oleh kemampuan kader terpilih dalam menghasilkan kebijakan yang responsif gender dan relevan dengan kepentingan masyarakat.

Peningkatan representasi politik perempuan di Partai NasDem, yang berhasil mencapai angka signifikan 30,4%, merupakan perwujudan keberhasilan teori kuota yang didukung oleh Institusionalisme Gender yang kuat dalam internal partai. Komitmen ini bermula dari elite partai dengan kepemimpinan yang dikenal sangat inklusif dan pro terhadap peningkatan peran perempuan.

Kebijakan afirmasi 30% dilembagakan bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai komitmen nyata yang tercermin dalam prosedur internal, termasuk pemberian dukungan logistik dan media yang adil serta penyediaan ruang aman berpolitik bagi calon legislatif perempuan. Langkah-langkah prosedural ini

bertujuan menghilangkan bias gender kelembagaan yang mungkin menghambat partisipasi perempuan. Secara strategis, tindakan NasDem dapat dianalisis menggunakan Teori Pilihan Rasional Partai.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, partai bertindak rasional dengan mengalokasikan investasi untuk memastikan kader perempuan mampu bersaing secara individual. Investasi ini diwujudkan melalui program-program penguatan kapasitas seperti Akademi Perempuan NasDem dan Akademi Bela Negara NasDem, yang secara rutin menyelenggarakan pendidikan politik. Program ini fokus pada peningkatan kompetensi, wawasan kebangsaan, dan kapasitas elektoral, mengubah kuota menjadi kualitas. Mobilisasi juga dioptimalkan secara rasional melalui Garnita Malahayati, di mana aktivis perempuan dimanfaatkan untuk kampanye berbasis komunitas dan *door-to-door* serta advokasi isu substantif. Pemanfaatan hasil survei untuk memetakan isu-isu prioritas perempuan semakin menegaskan pilihan rasional partai untuk mengarahkan pesan kampanye agar tepat sasaran dan efektif meraih suara.

Meskipun demikian, keberhasilan ini tidak terlepas dari tantangan. Tantangan pertama adalah hambatan dalam Institusionalisme Gender terkait budaya politik, yang terlihat dari kebutuhan untuk memperkuat narasi profil tokoh perempuan di media serta mengatasi dilema politik antara pemanfaatan figur populer dengan penguatan kaderisasi yang berbasis integritas. Tantangan terbesar, yang menguji keberhasilan transisi dari Representasi Deskriptif ke Representasi Substantif, terletak pada ekspektasi publik. Meskipun kebijakan afirmasi meningkatkan dukungan, masyarakat masih menantikan bukti konkret dari kinerja kader perempuan di parlemen. Oleh karena itu, legitimasi penuh atas upaya kesetaraan partai akan bergantung pada kemampuan kader terpilih dalam menghasilkan kebijakan yang responsif gender.

Strategi kelembagaan Partai NasDem terbukti berdampak signifikan terhadap peningkatan representasi politik perempuan, baik secara deskriptif maupun substantif. Strategi ini berjalan melalui kombinasi pendidikan politik, afirmasi struktural, penguatan organisasi sayap perempuan, dukungan logistik, pemanfaatan media digital, dan pembentukan narasi kesetaraan. Keberhasilan

ini tidak hanya menghasilkan kehadiran perempuan dalam parlemen, tetapi juga memperkuat kontribusi substantif mereka dalam memperjuangkan kebijakan publik yang responsif gender.

#### 4.3 Pembahasan

Strategi kelembagaan Partai NasDem dalam meningkatkan representasi politik perempuan pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan afirmasi secara formal, tetapi melalui pendekatan institusional yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Strategi ini dibangun atas lima pilar utama kelembagaan, yaitu: ideologi partai, struktur organisasi, model kaderisasi, peran sayap perempuan, dan dukungan dalam sistem pemilu.

*Pertama*, secara ideologis, NasDem mengusung prinsip *Restorasi Indonesia* dengan semangat kesetaraan, inklusivitas, dan politik tanpa mahar, yang menjadi basis filosofi bagi pembukaan ruang politik yang luas bagi perempuan. Partai memandang keterlibatan perempuan bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, tetapi sebagai bagian dari perjuangan ideologis untuk membangun demokrasi substantif. Pendidikan politik bagi perempuan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kepemimpinan, dan kepekaan terhadap isu publik. Dengan demikian, ideologi menjadi landasan awal politik inklusif untuk menciptakan *gender-responsive institution*.

*Kedua*, strategi kelembagaan juga dilakukan melalui penempatan kader perempuan dalam struktur pengambilan keputusan di internal partai. Wawancara menunjukkan bahwa lebih dari 25 perempuan menduduki jabatan penting di struktur Partai NasDem, baik sebagai fungsionaris, dewan pertimbangan, maupun majelis tinggi partai. pada level nasional, NasDem menempatkan perempuan dalam posisi strategis seperti Evita Nursanati Wakil Ketua MPR RI, Ketua Komisi di DPR, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menunjukkan adanya political will partai untuk memberi ruang perempuan dalam *decision-making arena*, tidak hanya sebagai pelengkap struktur.

*Ketiga*, strategi penguatan kapasitas melalui pendidikan politik dan kaderisasi menjadi bagian penting dari pendekatan kelembagaan. NasDem memiliki wadah formal kaderisasi melalui Akademi Bela Negara (ABN) dan

Akademi Perempuan NasDem yang menjadi sarana pelatihan kepemimpinan, pembekalan teknis pencalegan, strategi kampanye, dan penguasaan isu publik. Pelatihan ini membantu caleg perempuan memahami sistem pemilu, komunikasi politik, serta membangun kecakapan strategis sehingga mampu bersaing secara kompetitif dalam kontestasi legislatif. Strategi kaderisasi ini memastikan kader perempuan tidak hanya memenuhi kuota, tetapi juga memiliki kesiapan dan kapasitas substantif sebagai legislator.

*Keempat*, peran sayap perempuan *Garnita Malahayati* menjadi instrumen kelembagaan yang sangat strategis. Garnita tidak hanya berfungsi sebagai organisasi perempuan formal dalam struktur partai, tetapi juga sebagai wadah kaderisasi, advokasi isu perempuan, mobilisasi dukungan relawan, dan dukungan logistik bagi caleg perempuan. Wawancara menunjukkan bahwa Garnita aktif membangun jaringan perempuan hingga tingkat akar rumput, menyelenggarakan pendidikan politik, membentuk basis dukungan, serta memastikan caleg perempuan memiliki kesiapan kampanye dan dukungan moral maupun material selama proses pemilu. Dengan demikian, Garnita menjadi jembatan antara partai dan komunitas perempuan di tingkat lokal dan nasional.

*Kelima*, strategi kelembagaan juga tampak dalam kebijakan rekrutmen dan pencalonan. Nasdem menerapkan rekrutmen terbuka, meritokratis, dan berbasis kapasitas individu, sehingga membuka akses partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dari berbagai latar belakang—profesional, akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat. Selain itu, NasDem tidak hanya memenuhi kuota 30%, tetapi melampauinya hingga mencapai 30,4% daftar calon legislatif perempuan, dan menempatkan mereka pada posisi elektoral yang strategis untuk meningkatkan peluang keterpilihan. Pendekatan <sup>37</sup> ini menunjukkan bahwa partai tidak hanya menjalankan afirmasi formal, tetapi juga afirmasi substantif dalam sistem pencalonan.

Selain lima pilar tersebut, strategi kelembagaan NasDem juga menerapkan kombinasi dukungan logistik, pelatihan komunikasi media, narasi kampanye berbasis kesetaraan gender, hingga kolaborasi dengan figur publik perempuan untuk meningkatkan daya tarik elektoral. Dukungan media digital dan pelatihan penguatan citra publik membantu caleg perempuan membangun

kapasitas elektoral yang lebih kompetitif, utamanya dalam sistem proporsional terbuka.

Dengan demikian, strategi kelembagaan Partai NasDem dalam meningkatkan representasi politik perempuan pada Pemilu 2024 bukan hanya berbasis pada pemenuhan kuota, tetapi menghasilkan transformasi kelembagaan yang mendukung partisipasi perempuan secara substantif, sistematis, dan berkelanjutan.

Penerapan strategi kelembagaan Partai NasDem berdampak langsung pada peningkatan representasi perempuan, baik secara institusional, elektoral, maupun kualitas kepemimpinan politik perempuan. Dampak ini terlihat dari beberapa aspek berikut:

*Pertama*, dampak paling nyata terlihat pada peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur partai dan jabatan publik. Strategi penempatan perempuan pada posisi strategis menghasilkan kepercayaan politik yang lebih tinggi terhadap kader perempuan. Perempuan NasDem berhasil menembus posisi kunci seperti <sup>64</sup>Wakil Ketua MPR RI (Lestari Moerdijat), Ketua Komisi DPR RI (Felly Estelita), <sup>19</sup>hingga jabatan menteri (Siti Nurbaya). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai pemenuhan kuota, tetapi juga dipercaya memegang peran substantif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan mereka memberi dampak pada menguatnya political of presence dan political of ideas, yaitu kehadiran yang membawa gagasan dan kontribusi nyata dalam kebijakan publik.

*Kedua*, penerapan strategi kaderisasi melalui Akademi Bela Negara dan Akademi Perempuan NasDem berdampak pada penguatan kapasitas politik dan kesiapan elektoral kader perempuan. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pelatihan teknis, pendidikan politik, dan pembekalan strategi kampanye membuat caleg perempuan lebih percaya diri, memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik, memahami isu publik, dan mampu menyusun program politik berbasis kebutuhan masyarakat. Dampaknya, perempuan bukan hanya siap bertarung secara elektoral, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat pasca terpilih.

*Ketiga*, melalui peran organisasi sayap Garnita Malahayati, strategi partai berdampak pada kemampuan perempuan membangun basis sosial dan dukungan politik dari akar rumput. Garnita menjadi jembatan antara caleg perempuan dengan komunitas lokal, kelompok perempuan, UMKM, dan jaringan relawan. Hal ini menghasilkan peningkatan kepercayaan publik dan keterlibatan pemilih perempuan serta kelompok marginal. Dampaknya, perempuan tidak hanya dilihat sebagai simbol politik, tetapi sebagai agen perubahan yang memahami isu keluarga, ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

*Keempat*, dampak juga terlihat pada meningkatnya citra publik dan penerimaan sosial terhadap kepemimpinan politik perempuan. Masyarakat semakin melihat bahwa perempuan memiliki kemampuan, kapasitas intelektual, dan ketegasan dalam politik. Tokoh seperti Irma Suryani dan Lestari Moerdijat menjadi representasi perempuan yang vokal dalam parlemen dan mampu memperjuangkan isu sosial, kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan. Hal ini menciptakan perubahan paradigma dari politik yang maskulin menuju politik yang lebih inklusif dan responsif gender.

*Kelima*, strategi afirmasi dan pencalonan internal juga berdampak pada meningkatnya peluang keterpilihan perempuan secara elektoral. NasDem tidak hanya memenuhi kuota 30% pencalonan, tetapi juga memberikan nomor urut strategis, dukungan logistik, serta fasilitasi kampanye digital dan media. Dampaknya, perempuan memiliki kapasitas dan instrumen politik untuk bersaing dalam sistem proporsional terbuka yang selama ini biasanya menguntungkan kandidat laki-laki.

*Keenam*, dampak jangka panjang dari strategi ini adalah transformasi budaya politik partai. Perempuan kini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi bagian dari aktor politik utama dalam proses perumusan kebijakan dan arah politik partai. Perempuan mulai memegang peran penting dalam perencanaan strategis, advokasi kebijakan, dan pembentukan agenda politik partai.

Meskipun Partai NasDem menunjukkan komitmen kuat yang menghasilkan capaian representasi perempuan hingga 30,4%, penerapan

strategi politiknya menghadapi sejumlah tantangan substantif. Tantangan utama terletak pada kapasitas elektoral dan persaingan individual, di mana meskipun partai menyediakan ruang aman berpolitik dan pelatihan melalui akademi internal, kebutuhan untuk memastikan kader perempuan mampu meningkatkan kapasitas elektoral dan menembus berbagai lapisan masyarakat secara konsisten tetap menjadi pekerjaan rumah besar dalam sistem suara terbanyak.

Meskipun Partai Nasdem dinilai progresif dalam mendorong representasi politik perempuan melalui penguatan struktur kelembagaan, pendidikan politik, dan aktivasi organisasi sayap partai, proses implementasi strategi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan yang muncul <sup>97</sup> tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, ideologis, teknis, dan sumber daya. Narasi berikut menyajikan analisis mendalam berdasarkan perspektif informan terkait.

#### 1. Hambatan Struktural dan Kelembagaan Internal Partai

Berdasarkan wawancara, salah satu hambatan utama berasal dari struktur internal partai yang belum sepenuhnya mengintegrasikan isu gender ke dalam sistem pengambilan keputusan. Informan menyebut bahwa tidak semua pengurus daerah memiliki komitmen yang sama terhadap penguatan peran perempuan. Beberapa DPW dan DPD masih menjadikan perempuan hanya sebagai pelengkap administratif untuk memenuhi syarat kuota 30%, bukan sebagai kader potensial.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik Ardana, menerangkan bahwa:

“Sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang kita gunakan saat ini memang memberikan ruang yang lebih luas bagi semua calon, termasuk perempuan, untuk berkompetisi secara langsung di hadapan rakyat. Sistem ini memungkinkan masyarakat menilai kemampuan dan rekam jejak masing-masing calon tanpa terlalu terikat pada nomor urut. Dalam pandangan Partai NasDem, mekanisme seperti ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang partisipatif dan meritokratis, di mana keterpilihan ditentukan oleh kepercayaan publik, bukan semata oleh struktur partai. Namun, kita juga melihat bahwa sistem ini tidak otomatis menjamin peningkatan keterwakilan perempuan. Kompetisi terbuka sering kali menuntut modal sosial, ekonomi, dan politik yang kuat, yang dalam banyak kasus masih menjadi tantangan bagi calon

perempuan. Karena itu, bagi kami di NasDem, kuncinya adalah bagaimana partai mampu memberikan dukungan nyata kepada kader perempuan baik dalam bentuk pendidikan politik, strategi kampanye, maupun penguatan kapasitas agar mereka bisa bersaing secara sehat dan setara. Partai NasDem meyakini bahwa peningkatan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya bergantung pada sistem pemilu, tetapi juga pada komitmen internal partai untuk membangun ekosistem politik yang inklusif dan berkeadilan gender. Itulah sebabnya, kami terus mendorong kaderisasi, mentoring, dan afirmasi terhadap perempuan dalam struktur partai. Dengan cara itu, sistem proporsional suara terbanyak bisa benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang memperkuat peran dan representasi politik perempuan di parlemen” (Ardana; 2025).

Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses kader perempuan terhadap sumber daya organisasi dan dukungan elektoral seperti pendanaan, pelatihan, hingga akses media. Hal ini menunjukkan adanya persoalan gatekeeping politik di tingkat daerah, di mana kontrol sumber daya masih didominasi oleh figur laki-laki senior partai (Valina Sungka; 2025).

## 2. Tantangan Budaya Politik Patriarkal dan Resistensi Gender

Informan juga menjelaskan bahwa sebagian besar hambatan muncul dari budaya politik Indonesia yang masih patriarkal. Perempuan sering kali dianggap kurang layak menjadi politisi karena dianggap emosional, kurang rasional, atau tidak mampu menanggung beban politik. Tekanan budaya ini memengaruhi kepercayaan diri kader perempuan, bahkan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap caleg perempuan.

Heroik sebagai Ketua PERLUDEM juga menerangkan, bahwa:

“Pelatihan caleg atau “Sekolah Caleg” yang diselenggarakan Partai NasDem dinilai efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan politik caleg perempuan untuk menghadapi kontestasi elektoral. Program ini dirancang secara sistematis untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai sistem pemilu, strategi kampanye, etika politik, serta penguatan kapasitas komunikasi publik. Melalui pendekatan berbasis praktik dan studi kasus, Sekolah Caleg membantu calon legislatif perempuan memahami dinamika politik elektoral sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam menyusun narasi politik yang substantif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Efektivitas program ini juga terletak pada model pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, di mana peserta dilatih oleh praktisi politik, akademisi, dan anggota legislatif senior NasDem yang telah berpengalaman. Proses ini menciptakan ruang mentoring dan transfer pengetahuan yang sangat relevan bagi caleg perempuan, terutama dalam hal strategi membangun basis konstituen, pengelolaan kampanye, serta

kelembagaan media. Pendekatan ini menjadikan Sekolah Caleg bukan sekadar forum pelatihan teknis, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan kepercayaan diri bagi perempuan yang terjun ke dunia politik. Bagi kader perempuan, Sekolah Caleg memiliki dampak jangka panjang dalam memperkuat kemandirian politik dan daya saing elektoral. Program ini membantu mereka menavigasi tantangan struktural yang sering dihadapi perempuan dalam politik, seperti keterbatasan sumber daya dan dominasi figur laki-laki di ruang publik. Dengan peningkatan kapasitas yang komprehensif, caleg perempuan Partai NasDem lebih siap berkompetisi secara setara dan berpeluang lebih besar untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, Sekolah Caleg menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan representasi politik perempuan yang berkualitas dan berintegritas.”

Beberapa informan juga menyebut bahwa di tingkat akar rumput, masyarakat masih mempertanyakan kapasitas perempuan sebagai legislator, terutama dalam isu pembangunan, regulasi hukum, dan kebijakan publik. Kondisi ini menciptakan tantangan dalam membangun legitimasi elektoral bagi caleg perempuan meskipun mereka memiliki kompetensi yang memadai.

### 3. Hambatan dalam Akses Sumber Daya Politik dan Infrastruktur Kampanye

Meskipun NasDem memberikan dukungan logistik dan fasilitas pelatihan, banyak kader perempuan menghadapi kendala dalam pengelolaan dana kampanye dan akses terhadap jaringan politik lokal. Informan menyebut bahwa perempuan sering tidak memiliki basis finansial yang kuat, sementara sistem pemilu proporsional terbuka masih sangat transaksional dan membutuhkan biaya tinggi.

Hal ini menjadi tantangan serius karena perempuan harus bersaing dengan kandidat laki-laki yang memiliki jaringan finansial, sosial, dan politik lebih kuat, terutama di daerah yang kultur patriarkalnya masih tinggi.

### 4. Tantangan Kapasitas Digital dan Branding Politik

Walaupun strategi kampanye digital dinilai efektif untuk meningkatkan keterjangkauan dan citra caleg perempuan, informan menyebut bahwa

sebagian kader perempuan masih terkendala dalam literasi digital dan kemampuan membangun identitas politik melalui media sosial.

Penggunaan media digital membutuhkan kemampuan untuk membentuk narasi, mengelola interaksi publik, dan memahami algoritma digital campaign. Namun, tidak semua perempuan mendapat pelatihan intensif atau pendampingan teknis di daerah, sehingga strategi ini belum menjadi kekuatan kolektif secara merata.

#### 5. Lemahnya Konsolidasi Sayap Perempuan di Tingkat Lokal

Meskipun Garnita Malahayati efektif di tingkat nasional dan sebagian provinsi, informan menyebut di beberapa daerah organisasi ini masih belum berjalan optimal. Koordinasi antara Garnita dengan struktur partai inti belum sepenuhnya solid, sehingga kader perempuan tidak selalu mendapatkan pendampingan hingga level desa atau kecamatan. Hambatan koordinasi dan kelembagaan membuat potensi mobilisasi politik perempuan tidak maksimal di banyak dapil.

#### 6. Hambatan dalam Transformasi Representasi Deskriptif ke Representasi Substantif

Walaupun jumlah perempuan meningkat, tantangan muncul saat perempuan memasuki arena legislatif dan berusaha membawa isu substantif. Informan dari akademisi menyatakan bahwa sebagian perempuan yang terpilih belum sepenuhnya mampu menyuarakan kepentingan perempuan secara konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh struktur parlemen yang masih dikuasai elite politik lama, serta terbatasnya kapasitas kader dalam advokasi kebijakan publik.

Ditambah lagi, perempuan sering ditempatkan dalam komisi nonstrategis atau sektor sosial semata, sehingga membatasi ruang mereka dalam isu pembangunan, keuangan, atau hukum.

Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua DPP Nasdem, menerangkan bahwa;

“Sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang kita gunakan saat ini memang memberikan ruang yang lebih luas bagi semua calon, termasuk perempuan, untuk berkompetisi secara langsung di hadapan rakyat. Sistem ini memungkinkan masyarakat menilai kemampuan dan rekam jejak

masing-masing calon tanpa terlalu terikat pada nomor urut. Dalam pandangan Partai NasDem, mekanisme seperti ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang partisipatif dan meritokratis, di mana keterpilihan ditentukan oleh kepercayaan publik, bukan semata oleh struktur partai. Namun, kita juga melihat bahwa sistem ini tidak otomatis menjamin peningkatan keterwakilan perempuan. Kompetisi terbuka sering kali menuntut modal sosial, ekonomi, dan politik yang kuat, yang dalam banyak kasus masih menjadi tantangan bagi calon perempuan. Karena itu, bagi kami di NasDem, kuncinya adalah bagaimana partai mampu memberikan dukungan nyata kepada kader perempuan baik dalam bentuk pendidikan politik, strategi kampanye, maupun penguatan kapasitas agar mereka bisa bersaing secara sehat dan setara. Partai NasDem meyakini bahwa peningkatan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya bergantung pada sistem pemilu, tetapi juga pada komitmen internal partai untuk membangun ekosistem politik yang inklusif dan berkeadilan gender. Itulah sebabnya, kami terus mendorong kaderisasi, mentoring, dan afirmasi terhadap perempuan dalam struktur partai. Dengan cara itu, sistem proporsional suara terbanyak bisa benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang memperkuat peran dan representasi politik perempuan di parlemen.”

Tantangan kedua berkaitan dengan citra dan narasi publik. Meskipun struktur media dan alokasi ruang publik sudah memadai, partai mengakui bahwa struktur media masih perlu diperkuat dalam narasi profil tokoh perempuan agar konten yang menonjolkan narasi kesetaraan gender dapat bersaing secara efektif. Tantangan ketiga adalah dilema politik internal, yaitu perjuangan untuk tidak bergantung pada popularitas semata dan menekankan kaderisasi yang kuat, memastikan bahwa calon perempuan memiliki integritas dan agenda substantif di tengah pragmatisme politik figur. <sup>104</sup> Tantangan terbesar, dan yang paling kritis, adalah mempertahankan legitimasi dan memenuhi ekspektasi publik. Meskipun kebijakan afirmasi meningkatkan dukungan, masyarakat secara keseluruhan masih menantikan bukti konkret dari kinerja kader perempuan di parlemen, yang menyiratkan bahwa ujian sesungguhnya adalah kualitas Representasi Substantif pasca-pemilu.

Meskipun demikian, hasil triangulasi data menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen partai di tingkat pusat dengan implementasi di tingkat daerah. Beberapa partai termasuk Nasdem masih menghadapi tantangan dalam memenuhi proporsi minimal 30% calon legislatif perempuan di seluruh daerah pemilihan (INFID; 2024).

Valina Sungka sebagai pengamat politik dari akademisi menyampaikan:

“penilaian saya bahwa Nasdem cukup terbuka terhadap kader perempuan di daerah. Namun, ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dalam menjangkau perempuan yang belum tertarik pada politik. Menurutnya, hambatan partisipasi perempuan seringkali muncul dari faktor sosial, seperti waktu rapat yang tidak ramah bagi perempuan atau kebiasaan politik yang maskulin. Ia menyarankan agar partai menciptakan lingkungan dan jadwal yang lebih inklusif sehingga perempuan merasa nyaman berpartisipasi dalam politik. (Valina Sungka, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa afirmasi politik terhadap perempuan masih menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya, dominasi jaringan politik laki-laki, dan rendahnya ketersediaan kader perempuan yang siap secara elektoral. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun NasDem telah menunjukkan komitmen ideologis dan kelembagaan yang kuat terhadap penguatan peran perempuan, proses implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan kelembagaan dan konsistensi kebijakan pada level organisasi partai di daerah.

Dengan demikian, hasil temuan ini memperlihatkan bahwa dukungan Partai NasDem terhadap caleg dan kader perempuan tidak berhenti pada tataran normatif atau simbolik, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, program kaderisasi, advokasi sosial, dan kampanye publik yang terukur. Namun, efektivitas kebijakan afirmasi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan teori representasi politik (Pitkin, 1967) dan perspektif gerakan sosial (Tilly, 2004), yang menekankan bahwa representasi substantif membutuhkan dukungan institusional yang kuat serta keberlanjutan mobilisasi sosial di tingkat akar rumput.

Meskipun tantangan dukungan finansial dan logistik sering dialami caleg perempuan secara umum, Partai NasDem dinilai telah melakukan upaya sistematis, bahkan dengan mengalokasikan perempuan ke nomor urut yang strategis. Dalam sistem Pemilu Indonesia, nomor urut 1 dan 2 sering kali dianggap menguntungkan. Penempatan caleg perempuan di nomor urut strategis adalah salah satu bentuk afirmasi internal partai.

Meskipun keberhasilan Partai Nasdem patut diacungi jempol, tantangan representasi substantif masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh partai politik:

1. Kualitas versi kuantitas yaitu fokus harus bergeser dari sekadar memenuhi kuota 30% menjadi memastikan bahwa perempuan yang terpilih memiliki kapasitas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan isu-isu keadilan gender.
2. Dukungan internal yang belum merata yaitu masih ada indikasi bahwa beberapa caleg perempuan di berbagai partai, meskipun telah dicalonkan, kurang mendapat dukungan finansial, logistik, dan keamanan yang memadai dari partai, sehingga mereka harus berjuang secara individu (Perludem).
3. Kultur Maskulinitas Politik: Lingkungan internal partai politik masih menghadapi tantangan "maskulinitas politik" dan "sindrom *queen bee*" (persaingan tidak sehat antar caleg perempuan) yang dapat menghambat kemajuan perempuan (Akademisi).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Partai NasDem berhasil mencapai 30,4% keterwakilan perempuan di DPR RI melalui strategi inklusif dan terencana. Langkah utamanya meliputi rekrutmen terbuka, pelatihan kader melalui Akademi Perempuan NasDem, dukungan organisasi sayap Garnita Malahayati, serta penempatan caleg perempuan pada nomor urut strategis. Strategi ini diperkuat oleh kelembagaan politik berbasis komunitas dan kepemimpinan partai yang berkomitmen pada kesetaraan gender.

Strategi tersebut menjadikan NasDem sebagai contoh penerapan nyata kebijakan afirmasi 30%. Kesetaraan gender tidak hanya menjadi formalitas, tetapi terinstitusionalisasi dalam struktur dan budaya partai. Kader perempuan NasDem mampu bersaing secara elektoral dan meningkatkan representasi politik perempuan secara signifikan di parlemen.

Tantangan utama meliputi kesenjangan kapasitas elektoral yang menuntut pelatihan berkelanjutan, dominasi politik figur, serta keterbatasan narasi media dalam mengangkat peran perempuan. Ujian terbesarnya adalah memastikan representasi deskriptif berubah menjadi representasi substantif, yakni keterlibatan nyata perempuan dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif gender.

#### **5.2 Saran**

Secara praktis secara teoritis menggunakan kerangka Institusionalisme Gender untuk menganalisis hambatan kultural, seperti dilema politik figur dan efektivitas narasi media, untuk memberikan kontribusi akademik yang lebih kuat, dan secara praktis penelitian ini perlu ditingkatkan dengan fokus pada verifikasi faktual (triangulasi data) untuk mengaitkan klaim wawancara (misalnya, Akademi Perempuan) dengan bukti dokumen dan link media sosial yang spesifik. Secara analitis, penelitian harus mendalami Representasi Substantif, membandingkan janji kampanye dengan kinerja pasca-pemilu, dan secara teoritis menggunakan kerangka Institusionalisme Gender untuk menganalisis hambatan kultural, seperti dilema

politik figur dan efektivitas narasi media, untuk memberikan kontribusi akademik yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas. 2006. *Idealisme perempuan indonesia dan amerika*. Makassar: Eramedia
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminism : Sebuah kata hati*. Jakarta: Kompas
- Beilharz, Peter. 2005. *Teori-teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Rajab. (2022). *Perempuan Dalam Modernisme Dan Postmodernisme*. Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
- Cohen, Joshua. (1996). "Procedure and Substance in Deliberative Democracy." in Shawn
- Davis, A. (2002). *Political Communication and Social Theori*. *Routledge New York*.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Feybe M.P Wuisan. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014)*
- Huntington, Samuel & Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Kristin N. Wilie, (2018). *PARTY INSTITUTIONALIZATION AND WOMEN'S REPRESENTATION IN DEMOCRATIC BRAZIL*, James Madison University, Virginia, Cambridge University Press.
- McNair, B. (2003). *AN INTRODUCTION TO POLITICAL COMMUNICATION*. *Routledge New York*, 1-250. <https://doi.org/10.4324/9780203699683>
- Nurudin, dkk., *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Samadhi, WillyPurnama, *Blok Politik Kesejahteraan Merebut Kembali Demokrasi*, (Yogyakarta: PolGov UGM, 2016).
- Subono, Nur Iman. 2003. *Wanita dan Partisipasi Politik*. Penerbit Yayasan Jurnal Wanita dan The Japan Fondation.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal, (Makassar: Alauddin University Press 2012).

Prasetyo, B., & Jannah, M. L. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. PT. RajaGrafindo Persada.

Zed, Mestika, dan Hasril Chaniago, (2018), *Riwayat Hidup dan Perjuangan Ruhana Kuddus Tokoh Perempuan yang Mendahului Zaman*, Padang: UNP Press.

#### Jurnal Artikel

Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(2), 7.

Amalia, I. R. (2023). Partisipasi Perempuan Dalam Politik: Tantangan Dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender. *Literacy Notes*, 1–11. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/79%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/79/38>

Arianto, B. (2020). Menakar Sayap Politik Perempuan : Studi Garnita Malayahati Partai NasDem Yogyakarta. *Ijd-Demos*, 1(3). <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i3.25>

Arifin, R., Politik, S., Dalam, I., Struktural, P., Aditama, R., & Michael, R. (2021). PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK ( Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang ). *Jurnal Mozaik*, XIII(1), 33–46.

Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 123–141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>

Brilliant, C., Iqbal, G. T., Zaki, A., Rohman, F., Studi, P., Pemerintahan, I., & Brawijaya, U. (2022). *Kelembagaan Sosiologis Terkait Ketiadaan Politikus Perempuan Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Trenggalek Clariesa Brilliant 1 , George Towar Iqbal Tawakkal 2\* , Ahmad Zaki Fadur Rohman 3*. 8090, 183–196. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23304>

Budiman, A., Nurholis, E., & Erlina, T. (2020). Pelatihan wawasan Kebangsaan Bagi Pertahanan Sipil (HANSIP) Di Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*. <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/4107>

Celis, K. (2009). Substantive representation of women (and improving it): What it is and should be about. *Comparative European Politics*, 7(1), 95–113. <https://doi.org/10.1057/cep.2008.35>

Celis, K., & Childs, S. (2012). The Substantive Representation of Women: What to Do with Conservative Claims? *Political Studies*, 60(1), 213–225. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00904.x>

Churi, J., & Damerow, A. (2023). Closing the gap: how descriptive and

- substantive representation affect women's vote for populist radical right parties. *West European Politics*, 46(5), 928–946. <https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2113219>
- Davis, A. (2002). Political Communication and Social Theori. *Routledge New York*.
- Eddy Roflin, Iche Andriyanu Liberti, P. (2021). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.1127>
- Fahmi, K. (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 167–186. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>
- Gwiazda, A. (2021). Analysing the “what” and “when” of women's substantive representation: the role of right-wing populist party ideology. *East European Politics*, 37(4), 681–701. <https://doi.org/10.1080/21599165.2021.1873775>
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404–430.
- Hayes, M., & Hibbing, M. V. (2017). The Symbolic Benefits of Descriptive and Substantive Representation. *Political Behavior*, 39(1), 31–50. <https://doi.org/10.1007/s11109-016-9345-9>
- Hoefler, R. (2022). The Multiple Streams Framework : Understanding and Applying the Problems , Policies , and Politics Approach. *Journal of Policy Practice and Research*, 1–5. <https://doi.org/10.1007/s42972-022-00049-2>
- Hutabarat, D. T. H., Sinta, N., Dwiva, N. A., Raihandi, M. A., Ardiansyah, A., Febrian, S., & Akbar, G. (2021). Memahami Makna Demokrasi Dalam Pendidikan Demokrasi. *Romeo : Review of Multidisciplinary Education, Culture and Pedagogy*, 1(1), 103–109. <https://doi.org/10.55047/romeo.v1i1.60>
- Jovani, A. (2014). Perkembangan Gerakan Politik Perempuan Indonesia. *Jurnal Pamator*, 7(1), 139.
- Kenny, M., & Verge, T. (2013). Contagion theory revisited : When do political parties compete on women ' s representation ? *XI Congreso AECPA*, 1–28.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.874>
- Komarudin, S. Z. C. U. (2019). *Demokratisasi dan tantangan kelembagaan partai politik di indonesia: suatu analisa politik dalam periode pemilu tahun 2009-2019*. 1–16.
- Lees-Marshment, J. (2011). The political marketing game. In *The Political Marketing Game*. <https://doi.org/10.1057/9780230299511>
- M. Jafar AW. (2015). Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(9), 208–218.
- McNair, B. (2003). AN INTRODUCTION TO POLITICAL COMMUNICATION. *Routledge New York*, 1–250. <https://doi.org/10.4324/9780203699683>
- Mulyono, I. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. 1–6. [http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah\\_STRATEGI\\_MENINGKATKAN\\_KETERWAKILAN\\_PEREMPUNAN\\_Oleh-Ignatius\\_Mulyono.pdf](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUNAN_Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf)
- Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(02), 131. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.181>
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg

- Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014 ). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Peters, G. (2020). Institutional Theory in Political Science : The New Institutionalism . Perspectives from Central and Eastern Europe. *The Nispacee Journal of Public Administration and Policy*, XII(December 2019), 2. <https://doi.org/10.2478/nispa-2019-0024>
- Pitkin, H. F. (2023). the Concept of Representation. *The Concept of Representation*, 1–324. <https://doi.org/10.1525/9780520340503>
- Prasetyo, B., & Jannah, M. L. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. (2020). POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS). *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol. 3(No. 2), 97–111. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- Prayudi, Harefa, M., Satya, V. E., Suhayati, M., Retnaningsih, H., & Muhammad, S. V. (2024). *Parliamentary Review*. IV(2), 1–49.
- Ramadhan, M., & Rizal, P. (2023). *Sistem Pemilihan Umum di Negara Skandinavia : Studi Kasus Perbandingan Pada Sistem Pemilihan Umum di Norwegia dan Swedia*. June.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39–62. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>
- Rawat, P. S. (2014). Patriarchal beliefs, women's empowerment, and general well-being. *Vikalpa*, 39(2), 43–55. <https://doi.org/10.1177/0256090920140206>
- Roselina, W. (2019). Representasi Politik Perempuan Di Partai Nasional Demokrat Representation of Women'S Politics in the Democrat National Party. *Dimensi*, 8(3), 516–526.
- Sacchet, T. (2005). Political Parties : When do they work for Women ? *UN Expert Group Meeting on Equal Participation of Women and Men in Decision-Making Processes, with Particular Emphasis on Political Participation and Leadership 24 to 27 October 2005, December*, 1–14.
- Siti Zaetun, & Mar'iyah, C. (2020). Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *The Journalish: Social and Government*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Umagapi, J. L. (2020). *TANTANGAN DAN PELUANG WOMEN ' S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION : dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik , meskipun kenaikannya tidak signifikan hanyalah masalah gender d*. 19–34.

#### Website

- katadata.co.id (22 November 2024). Perolehan Kursi Perempuan pada Pemilu 2024. diakses tanggal 16 Maret 2025. Dari <http://www.katadata.co.id/perolehan-kursi-perempuan-pada-pemilu-tahun-2024>.

- Kompas.com (27 Agustus 2024). Nasdem usul parliamentary threshold berjenjang 7 persen untuk DPR RI. diakses 17 Maret 2025 pukul 19.20 WIB dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/27/16002101/Nasdem-usul-parliamentary-threshold-berjenjang-7-persen-untuk-dpr-ri>
- Epenulis.com (28 Juni 2024). Mengenal Kampanye Nasdem di Era Digital; Membawa Perubahan dalam bentuk online. Diakses 23 Juli 2025 pukul 15.00 WIB. <https://epenuis.com/artikel/mengenal-kampanye-revolusioner-partai-nasdem-di-era-digital-membawa-perubahan-dalam-bentuk-online-711a29a250.php>
- News.detik.com (23 Mei 2019). Nasdem Pamer Pamer Anggota DPR Perempuan Lebih dari 30% di Periode 2019-2024” diakses 15 Agustus 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-4562493/nasdem-pamer-anggota-dpr-perempuan-lebih-dari-30-di-periode-2019-2024>.
- KPU RI. (2024). *Data Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024*. Diakses dari laman resmi KPU.
- Nasdem DIY. (2023). *Garnita Siap Cetak Kader Wanita Menjadi Pemimpin*. Diakses dari laman DPW Nasdem DIY, Maret 2023.
- Partai Nasdem. (2021). *Garnita Malahayati NasDem Tingkatkan Posisi Perempuan di Berbagai Bidang*. Diakses dari laman resmi Partai Nasdem, Desember 2021.
- Partai Nasdem. (2024). *Pengurus DPP*. Diakses dari laman resmi Partai Nasdem.
- DPW Nasdem Jateng. (2023). *Garnita Malahayati Archives*. Diakses dari laman DPW Partai Nasdem Jawa Tengah.

Partai Politik dan Representasi Politik Perempuan : Studi Kasus Strategi Kelembagaan Politik Partai Nasdem Dalam Meningkatkan Representasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

*Anina Cahista P.*  
28/4/2026

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	issuu.com Internet Source	1%
2	repository.unigal.ac.id Internet Source	1%
3	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
5	doaj.org Internet Source	<1%
6	pt.scribd.com Internet Source	<1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1%
9	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%
10	matakita.co Internet Source	<1%

11	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="https://ojs.cahayamandalika.com">ojs.cahayamandalika.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="https://haloedukasi.com">haloedukasi.com</a> Internet Source	<1 %
16	Karen Celis. "Substantive Representation of Women (and Improving it): What it is and should be About?", Comparative European Politics, 2009 Publication	<1 %
17	<a href="https://pt.slideshare.net">pt.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="https://www.tandfonline.com">www.tandfonline.com</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to LPPM Student Paper	<1 %
20	<a href="https://jateng.nasdem.id">jateng.nasdem.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="https://repository.bakrie.ac.id">repository.bakrie.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	<1 %
23	<a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %

24	<a href="https://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="https://repository.um-surabaya.ac.id">repository.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	Artanti Paramesti, Revo Linggar Vandito. "IMPLEMENTATION OF GENDER QUOTAS IN AFFECTING WOMEN'S EXISTENCE: CASE STUDY OF WOMEN'S REPRESENTATION IN THE DKI JAKARTA DPRD PERIOD 2019-2024", SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2024 Publication	<1 %
28	<a href="http://www.puskapol.ui.ac.id">www.puskapol.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="https://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
30	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
31	<a href="http://jead.gau.ac.ir">jead.gau.ac.ir</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="https://repository.uph.edu">repository.uph.edu</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
34	Arina Aftitrya Izzati, Slamet Bambang Riyono. "Penerapan Internet Sehat dan Aman untuk Menanamkan Kebiasaan Bijak dalam Penggunaan Media Sosial pada Siswa SMP",	<1 %

# Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025

Publication

---

35	<a href="http://anggaradana.blogspot.com">anggaradana.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://ejournal.uigm.ac.id">ejournal.uigm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://jdih.wajokab.go.id">jdih.wajokab.go.id</a> Internet Source	<1 %
38	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Student Paper	<1 %
39	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://journal.stmiki.ac.id">journal.stmiki.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://jurnal.untirta.ac.id">jurnal.untirta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://lpmrhedor.com">lpmrhedor.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://www.ojs.uma.ac.id">www.ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

---

48 Maela, Siti Nur. "Manajemen Keuangan Pondok Pesantren Berbasis Aplikasi CARDS (Studi Kasus di Pondok Pesantren Az Zahra Al Gontory dan Pondok Pesantren Al Qur'an Al Yusufiyah).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)  
Publication

<1 %

---

49 Submitted to Trisakti University  
Student Paper

<1 %

---

50 [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

51 Submitted to Universitas Diponegoro  
Student Paper

<1 %

---

52 [uinsgd.ac.id](http://uinsgd.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

53 Submitted to Universitas Trunojoyo  
Student Paper

<1 %

---

54 [etheses.uinsgd.ac.id](http://etheses.uinsgd.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

55 [gorontalopost.jawapos.com](http://gorontalopost.jawapos.com)  
Internet Source

<1 %

---

56 [www.jurnal-id.com](http://www.jurnal-id.com)  
Internet Source

<1 %

---

57 [dirdosen.budiluhur.ac.id](http://dirdosen.budiluhur.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

58 [ecpr.eu](http://ecpr.eu)  
Internet Source

<1 %

---

59	<a href="http://eprints.uad.ac.id">eprints.uad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://nikenayularasatii.blogspot.com">nikenayularasatii.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://phd.lib.uni-corvinus.hu">phd.lib.uni-corvinus.hu</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://www.antaranews.com">www.antaranews.com</a> Internet Source	<1 %
65	Alex Alex, Nasiwan Nasiwan, Abdillah Abdillah, Mutiah Haris. "Women in local politics: Insights from Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia", Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2023 Publication	<1 %
66	Submitted to Pembroke High School Student Paper	<1 %
67	Shelly Adelina, Any Soetjipto. "Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy", Jurnal Perempuan, 2014 Publication	<1 %
68	<a href="http://lppm.ulm.ac.id">lppm.ulm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://menaramadinah.com">menaramadinah.com</a> Internet Source	<1 %
70	Mukhayatun, Mukhayatun. "Manajemen Pendidikan Pesantren Tahfiz Al-Hikmah 2	<1 %

Benda Brebes", Institut Agama Islam Negeri  
Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

---

71	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
72	batamtoday.com Internet Source	<1 %
73	docplayer.info Internet Source	<1 %
74	epenulis.com Internet Source	<1 %
75	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
76	jdi.h.dpd.go.id Internet Source	<1 %
77	journal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
78	repositori.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
79	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
80	trainingcentre.unwomen.org Internet Source	<1 %
81	Ari Hervina, Hertanto Hertanto, Arizka Warganegara. "Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019", Journal of	<1 %

Research in Social Science and Humanities,  
2021

Publication

---

82 Baharudin Baharudin. "PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK DI INDONESIA", Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2024 <1 %  
Publication

---

83 Delly Maulana. "FENOMENA DEMOKRATISASI LOKAL DI PROVINSI BANTEN", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018 <1 %  
Publication

---

84 Ihbal, Ahmad. "Pengaruh Struktur Dewan Terhadap Kinerja Keuangan: Peran Mediator Skor Environmental Social Governance (Studi Empiris pada Perusahaan Publik Pasar Berkembang Asean yang Terdaftar di Database Bloomberg Periode Tahun 2013-2019)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %  
Publication

---

85 Lúgaro Izuibejeres, Maria Carolina. "Multiliteracias em Estudantes Surdos de Ensino Médio: Contributos de um Programa de Intercompreensão em Línguas", Universidade de Aveiro (Portugal) <1 %  
Publication

---

86 Maulana, Zidan Abid. "Pemaknaan Pesan Moral Pada Channel Youtube Tekotok Segmen Full Movie Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) <1 %  
Publication

---

87 Sri Budi Eko Wardani. "Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi", Jurnal Penelitian Politik, 2018  
Publication <1 %

---

88 Yeby Ma'asan Mayrudin, Bayu Nurrohman, Dewi Sri Astuti. "Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik", ijd-demos, 2022  
Publication <1 %

---

89 artikelpendidikan.id  
Internet Source <1 %

---

90 dpragrogol.blogspot.com  
Internet Source <1 %

---

91 economy.okezone.com  
Internet Source <1 %

---

92 ejournal.unesa.ac.id  
Internet Source <1 %

---

93 ejournal.unisbablitar.ac.id  
Internet Source <1 %

---

94 es.scribd.com  
Internet Source <1 %

---

95 fr.scribd.com  
Internet Source <1 %

---

96 journal.iainkudus.ac.id  
Internet Source <1 %

---

97 journal.pubmedia.id  
Internet Source <1 %

---

98 journal.unibos.ac.id  
Internet Source <1 %

---

99	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
100	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
101	<a href="http://repository.itbwigalumajang.ac.id">repository.itbwigalumajang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
102	<a href="http://repository.unpar.ac.id">repository.unpar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
103	<a href="http://www.lensajatim.id">www.lensajatim.id</a> Internet Source	<1 %
104	<a href="http://www.medcom.id">www.medcom.id</a> Internet Source	<1 %
105	<a href="http://www.msn.com">www.msn.com</a> Internet Source	<1 %
106	Rahayuningsih, Esti. "Strategi Komunikasi Organisasi Untuk Meningkatkan Citra Madrasah di MTs Muhammadiyah Purwokerto.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %
107	<a href="http://journal.walisongo.ac.id">journal.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
108	Bambang Arianto. "Menakar Sayap Politik Perempuan : Studi Garnita Malayahati Partai NasDem Yogyakarta", ijd-demos, 2020 Publication	<1 %
109	Faizi, Muhammad Nur. "Model Peningkatan Kinerja Pemasaran Melalui Digital Marketing, Marketing Capability dan Marketing	<1 %

## Innovation", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

---

110 Kenawas, Yoes C.. "Dynasty Inc.: The Emergence and Endurance of Political Dynasties in Indonesia", Northwestern University, 2024 <1 %

Publication

---

111 Setiyawan, Bambang Agus. "Strategi Komunikasi Lapak Aduan Banyumas Dalam Mewujudkan Good Governance.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) <1 %

Publication

---

112 Sholeh, Muhammad. "Kontribusi Pondok Pesantren Mitra UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dalam Pengembangan Budaya Religius Masyarakat Banyumas", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) <1 %

Publication

---

113 Turohmah, Farida. "Implementasi Etika Perspektif Imam Al Ghazali Dalam Strategi Pembelajaran Guru pai di smk Farmasi Majenang Kabupaten Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) <1 %

Publication

---

114 [ejournal2.undip.ac.id](http://ejournal2.undip.ac.id) <1 %

Internet Source

---

115 [journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id) <1 %

Internet Source

---

116 [jurnalpolitik.ui.ac.id](http://jurnalpolitik.ui.ac.id) <1 %

Internet Source

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On